



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
KOMISI VI DPR RI**

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: IV
Jenis Rapat	: Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perindustrian RI dan Kepala BKPM.:
Hari, Tanggal	: Selasa, 23 Juni 2020
Pukul	: 10.24 WIB – 15.10 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VI DPR RI Gedung Nusantara I Lt.1 Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Ketua Rapat	: Gde Sumarjaya Linggih, S.E.,M.AP, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabag Sekretariat Komisi VI DPR RI
Acara	: Pembahasan RKA K/L dan RKP K/L tahun 2021
Hadir	: PIMPINAN: <ol style="list-style-type: none">1. Faisol Riza, S.S (F-PKB)2. Aria Bima (F-PDIP)3. Gde Sumarjaya Linggih, S.E., M.AP. (F-PG)4. Martin Manurung, S.E., M.A. (F-Nasdem)

ANGGOTA:

FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)

5. Gilang Dhielafararez, S.H., LL.M.
6. Rieke Diah Pitaloka
7. ST. Ananta Wahana, S.H
8. Sonny T. Danaparamita
9. Ir. Deddy Yevri Hanteru Sitorus M.A.
10. Dr. Evita Nursanty, M.Sc.
11. Sondang Tiar Debora Tampubolon
12. dr. H. Mufti A. N. Anam

FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)

13. Ir. H.M. Idris Laena, M.H.
14. Drs. Mukhtarudin

- 15. Lamhot Sinaga
- 16. H. Singgih Januratomoko, S.K.H., M.M
- 17. Trifena M. Tinal, B.Sc.
- 18. Nusron Wahid

FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA)

- 19. Khilmi
- 20. Andre Rosiade
- 21. Ir. H. La Tinro La Tunrung
- 22. M. Husein Fadlulloh, B.Bus., M.M., MBA.

FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM)

- 23. Drs. H. Nyat Kadir
- 24. H. Subardi, S.H., M.H.
- 25. Zuristy Firmadata, S.E., M.M
- 26. Muhammad Rapsel Ali

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)

- 27. Ir. H. M. Nasim Khan
- 28. Marwan Ja'far
- 29. Siti Mukaromah, S.Ag., M. AP

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

- 30. Dr. Ir. E. Herman Khaeron, M.Si
- 31. H. Anton Sukartono Suratto, M.Si
- 32. Hj. Melani Leimena Suharli
- 33. Putu Supadma Rudana
- 34. Edhie Baskoro Yudhoyono, M,Sc

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)

- 35. Amin AK, M.M.
- 36. Drs. Chairul Anwar, Apt
- 37. Hj. Nevi Zuairina
- 38. Mahfudz Abdurrahman , S.Sos

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

- 39. Nasril Bahar, S.E
- 40. Daeng Muhammad, S.E., M.Si.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)

- 41. H. Ach. Baidowi, S.Sos., M.Si.
- 42. Elly Rachmat Yasin

Anggota Ijin

Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H. (F-P.Gerindra)

Undangan

1. Menteri Perindustrian RI, Agus Gumiwang Kartasasmita, beserta jajaran;
2. Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia beserta jajaran.

Jalannya Rapat:**KETUA RAPAT (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP):****Yang terhormat ..(suara terputus)****Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Menteri Perindustrian, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, begitu juga Bapak Kepala BKPM, Bapak Bahlil Lahadalia beserta para jajarannya.**

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu melimpahkan karunianya kepada kita bisa melaksanakan rapat secara fisik dan virtual Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perindustrian dan Kepala BKPM, pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Selanjutnya, sehubungan dengan kondisi yang masih tidak kondusif saat ini terkait dengan penyebaran Covid-19 dan berdasarkan hasil keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI pada Jumat tanggal 27 Maret 2020, bahwa rapat-rapat yang dilakukan alat kelengkapan dewan AKD dan mitra kerja Pemerintah, dilakukan dengan ketentuan antara lain: berdasarkan Pasal 254 Ayat (4) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tatib menyebutkan bahwa semua jenis Rapat DPR RI dihadiri oleh anggota, kecuali dalam keadaan tertentu, yakni keadaan bahaya dengan kepentingan yang memaksa, keadaan luar biasa, keadaan konflik, bencana alam dan keadaan tertentu setidak-tidaknya *urgency* nasional. Rapat dilaksanakan secara virtual dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, bagi Anggota hadir secara virtual. Maka, daftar hadir Anggota dapat dilakukan secara elektronik. DPR RI melakukan *live streaming*, diliput oleh Parlemen TV, media cetak dan media elektronik lainnya, mendapatkan sumber semuanya dari TV Parlemen. Pencatatan rapat dilakukan oleh staf sekretariat Komisi VI DPR RI dan rekaman rapat akan tersimpan dalam aplikasi Zoom. Maka, dengan tidak mengurangi rasa hormat. Rapat kerja ini dilakukan secara fisik dan virtual dan hasil kesimpulan dalam rapat kerja ini mengikat untuk Komisi VI DPR RI dengan Kementerian Perindustrian dan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Menurut laporan dari Sekretariat Komisi VI DPR RI, berdasarkan daftar hadir secara fisik dan virtual, telah hadir saat ini telah hadir 6 fraksi dan pada saat ini telah hadir 13 dan akan menyusul lagi beberapa orang teman yang mungkin secara virtual maupun fisik akan hadir.

Dengan demikian, kourum telah terpenuhi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 281 Ayat 1 Peraturan DPR RI tentang tata tertib. Maka, perkenankan kami membuka rapat kerja pada hari ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Setuju ya.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.24 WIB)

Selanjutnya, kami minta kesepakatan karena, rapat kerja dihadiri secara fisik dan virtual sesuai keputusan rapat pimpinan DPR RI tanggal 17 Juni 2020. Tata cara rapat Komisi AKD pada masa *new normal* yang diikuti oleh Bapak, Ibu Anggota Komisi VI DPR RI secara fisik dan virtual, yaitu:

1. Rapat fisik dan virtual agar lebih efisien dan efektif, maksimum 4 jam.

ANGGOTA :

2 (dua) jam saja.

KETUA RAPAT :

Nggak, diininya, ini aturannya bos. Nanti, kita tentukan. Ini aturan aturan *new normal* yang ini, saya bacakan dulu. Jadi, karena ini aturannya 4 jam, mungkin kita disini akan mencoba untuk untuk lebih mempercepat. Nanti, kita tentukan jamnya ya.

2. Setiap Anggota hadir fisik dapat menyampaikan pertanyaan dan tanggapan dari setiap Anggota Fraksinya.
3. Peliputan pelaksanaan rapat Komisi dilakukan oleh TV Parlemen.

Alur rapat sebagai berikut: Pembukaan, presentasi singkat oleh Kementerian dan Lembaga, pertanyaan Anggota, tanggapan Menteri dan Lembaga, tanggapan balik Anggota, tanggapan akhir Menteri dan lembaga, kesimpulan dan penutup.

Kami juga ingin mendapatkan persetujuan, apakah rapat kita pada hari ini bisa kita akhiri pada pukul, nah ini. Disini tepatnya, Pak. 11 lah ya, 11 ya.

(RAPAT:SETUJU)

Ini hanya permulaan, Bos. Ini hanya indikatif dan setelah ini nanti kita akan banyak bahas juga pada saat nanti kita menjadikan indikatif ini menjadi definitif. Jadi, masih panjang perjalanan kita untuk membahas, membedah anggaran yang sangat minim ini. Ini kenapa saya bilang sangat minim, karena di di departemen yang lain, anggaran Kementerian kita sama kepala ini hanya di seorang direktur. Ini kalau kta melihat, mungkin di Kementerian Pendidikan dan Pertahanan itu, mungkin Eselon III anggarannya seperti anggaran Kementerian kita.

Terima kasih, kami ucapkan kepada para undangan atas kehadiran waktunya untuk menghadiri rapat kerja hari ini sesuai undangan yang kami sampaikan, agenda rapat pada hari ini adalah pembahasan RKA KEP, RKA, RKL dan RKP K/L Kementerian Perindustrian dan Lembaga Penanaman Modal tahun 2021.

Bapak, Ibu dan Hadirin yang kami muliakan.

Sebagaimana kita ketahui, tata cara pelaksanaan tugas Komisi VI dalam bidang anggaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Ayat (2) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib antara lain adalah mengadakan pembicaraan pendahuluan rancangan APBN, yang meliputi rencana kerja pemerintah serta rencana kerja dan anggaran kementerian dan lembaga dalam ruang lingkup tugas Komisi dan usulan anggota mengenai program pembangunan daerah pemilihan bersama dengan Pemerintah untuk disampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI.

Perlu kami sampaikan bahwa rapat kerja Komisi VI DPR RI pada hari ini adalah sesuai dengan Surat Pimpinan Badan Anggaran dengan Nomor AG/05596/DPRRI/5/2020 tanggal 6 Mei 2020 mengenai penyampaian rancangan pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2021 dan RKP tahun 2021, menjadwalkan rapat kerja Komisi-Komisi dengan mitra kerjanya antara tanggal 16-26 Juni.

Untuk itu kami persilakan, nanti kepada Pak Menteri untuk menyampaikan. Mungkin, secara garis besarnya tentang RKP-nya karena ini merupakan pagu indikatif yang akan nanti dibawa dalam postur anggaran 2021 yang dibawakan nanti presiden pada pidato presiden tanggal 16 Agustus biasanya. Nggak tahu mungkin nanti karena sering ada perubahan juga semenjak beberapa tahun ini bisa jadi tanggal 15 Agustus, bisa jadi tanggal 14 Agustus, pidato presiden tentang anggaran ini.

Maka, kiranya ini pagu definitif. Mudah-mudahan, dari pagu kira-kira ini adalah pagu indikatif dan kita berharap, kalau kemarin ini terus terang anggaran dari BUMN dikurangi 20%, 20%. Kami sangat sedih juga ke BUMN yang ngurus sekian banyak uang, harus berkurang 20% dan kami mendengar juga sebagian dari kawan-kawan dari Perindustrian dan BKPM ini juga berkurang. Ini, mungkin ini akan menjadi telaah bersama oleh teman-teman, sehingga apa tujuan dari pada kita bersama-sama bisa *survive* dalam kondisi pandemi ini bisa terjadi. Di *mute* dulu yang di.. sudah? Oh, speakernya kebuka.

Ok, selanjutnya kami persilakan. Untuk itu kami kepada Menteri Perindustrian untuk menyampaikan penjelasan terkait acara Rapat Kerja hari ini. Kami persilakan, penjelasan dari Menteri perindustrian dan kemudian nanti sekaligus dengan Pak Kepala BKPM. Silakan, Pak Menteri.

MENTERI PERINDUSTRIAN RI (AGUS GUMIWANG KARTASASMITA):

..(suara tidak terdengar)..

Sudah? Terima kasih.
Mohon izin dimulai, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan.
Sebenarnya untuk apa aja juga boleh. Ini anggarannya kecil.

MENTERI PERINDUSTRIAN RI (AGUS GUMIWANG KARTASASMITA):

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat Pagi,
Salam Sejaterah untuk kita semua,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.

**Yang saya hormati, yang juga kami hormati dan kami banggakan Pimpinan Komisi VI,
Segecap Anggota Komisi VI yang terhormat,
Kepala BKPM beserta jajarannya,
Kepala Penjabat Kementerian Perindustrian, dan
Bapak-Ibu Sekalian.**

Izinkan kami dari Kementerian Perindustrian menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Komisi VI DPR RI yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan penjelasan tentang pembahasan RKAKL dan RKBKL tahun 2021.

Pimpinan dan segecap Anggota Komisi VI yang terhormat.

Berdasarkan surat Bersama di halaman 3 langsung kalau ada *slide* nya. Berdasarkan surat bersama **..(suara terputus)** Kepala Bapenas Nomor S376/MK 02 tahun 2020 dan B310/NPTN/2020, tanggal 8 Mei tahun 2020 tentang Pagu-pagu Indikatif Kementerian Lembaga Tahun 2021. Maka, RKAKL Kementerian Perindustrian dapat kami laporkan kepada Komisi VI bahwa pagu indikatif untuk Kementerian Perindustrian sebesar Rp2.596.384.901.000,- ini pagu indikatif yang berasal dari Rupiah murni sebesar Rp2,359 triliun berasal dari PMBP sebesar Rp141.744 miliar dan berasal dari BLU Rp 95 miliar 193 juta. Adapun pagu indikatif Kementerian Perindustrian ini ditujukan untuk 3 kegiatan, yaitu yang pertama untuk belanja pegawai sebesar Rp797 miliar 380 juta. Disini ada perinciannya seperti gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja dan sebagainya. Kemudian yang kedua, untuk belanja oprasional sebesar Rp341 miliar 702 juta. Kemudian, ada belanja non oprasional, dimana belanja non oprasional ini sebesar Rp1 triliun 457 miliar dan kami bagi dua untuk kegiatan-kegiatan prioritas sebesar Rp919 miliar 321 juta dan kegiatan non prioritas atau kegiatan regular sebesar Rp538 miliar 130 juta.

Selanjutnya halaman berikutnya, kalau kita bisa lihat Pimpinan dan segecap Anggota Komisi VI terhormat bahwa disandingkan atau dibandingkan dengan antara APBN Kementerian Perindustrian tahun 2020 dan pagu indikatif tahun 2021. Ada ada penurunan sebesar 12%, dimana APBN Kementerian periode 2020 sebesar Rp2,952 triliun dan sekarang pagu indikatifnya sebesar 2,596 triliun. Ini halaman berikutnya, ya halaman berikutnya.

Sekarang, kita ikut ke halaman 5 dari *slide*. Selanjutnya, kami juga mendapat instruksi, Pak Pimpinan dan segecap Anggota Komisi VI. Instruksi yang dituangkan dalam surat bersama Menteri Keuangan dan juga Menteri Bapenas. Pada tanggal 8 Mei 2020, dimana kami di perintahkan untuk melakukan restrukturisasi program Kementerian KemenPerind. Yang program *existingnya*, awalnya ada 9 program, kami diminta untuk melakukan *adjustment* restrukturisasi menjadi 4 program, yaitu dukungan, yang pertama program dukungan management. Yang kedua, program nilai tambah dan daya saing industri. Yang ketiga, program riset dan inovasi, ilmu pengetahuan dan teknologi dan yang keempat program pendidikan dan pelatihan vokasi.

Selanjutnya, halaman berikutnya. Berdasarkan arahan atau instruksi dari Menteri PPN tersebut, maka pagu indikatif tahun 2021 berdasarkan 4 program tersebut adalah, untuk program dukungan management itu sebesar Rp261 miliar 413 juta, untuk program nilai tambah dan daya saing industri sebesar Rp816 miliar 693 juta, untuk program riset dan inovasi, ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar Rp698 miliar 296 juta dan juga untuk program pendidikan dan pelatihan vokasi sebesar Rp849 miliar 941 juta.

Adapun, kami apa akan memberikan beberapa contoh, Pak Bapak Pimpinan dan segenap Anggota Komisi VI, halaman berikutnya. Ini kegiatan prioritas Kementerian Perindustrian tahun 2021 terhadap program pendidikan dan vokasi dan pelatihan vokasi yang akan dianggarkan untuk kegiatan pengembangan sumber daya manusia industri. Ini ada sekitar 6 kegiatan, ya contohnya adalah pendidikan vokasi industri berbasis industri menuju 2 sistem, kemudian juga pembangunan infrastruktur kompetensi, dan sebagainya dan lain sebagainya.

Selanjutnya, program riset halaman 9. Ini program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang nanti akan anggarannya ada pada badan pengembangan dan, badan penelitian dan pengembangan industri atau BPI. Ada sekitar 8 kegiatan prioritas nasional.

Bapak, Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi VI terhormat.

Contohnya dalah pengembangan stabdarisasi industri melalui penyusunan 13 RSNI 4.0, juga penanganan masalah limbah B3 sektor industri pengembangan standar dan pengembangan industri hijau, ada pengembangan 3 hasil Litbang biasa teknologi PLN.

Dan selanjutnya, halaman 10. Ini program nilai tambah dan daya saing industri. Ini dimasing-masing Direktorat Jendral kami anggarakan. Sebagai contoh, di di untuk Direktorat Industri Argo, ini ada 11 kegiatan prioritas nasional, contohnya adalah restrukturisasi mesin industri kencur dan juga pengembangan industri antara, pada sektor industri hortikultura. Kemudian, ada program pendampingan penerapan industri 4.0 di sektor industri makanan dan minuman, juga ada peningkatan kapasitas ekspor bagi dunia usaha sektor industri argo untuk 30 perusahaan.

Selanjutnya, untuk Direktorat Jendral Kimia dan Farmasi dan Tekstil. Ini ada 11 kegiatan prioritas tahun 2021, contohnya restrukturisasi industri tekstil kulit dan alas kaki. Untuk 10 perusahaan industri PTPT, ini halaman 12 ya. Kemudian juga, ada penerapan penerapan industri 4.0, di sektor industri kimia hilir dan farmasi. Ada fasilitas pengembangan industri petrokimia di Teluk Bintuni, kemudian juga ada yang penting juga rekomendasi kebijakan penumbuhan dan pengembangan industri bahan baku obat. Juga ada, penyusunan strategi penumbuhan dan pengembangan daya saing sektor IKFT dengan tarif 2-3 proyek investasi yang terrealisasi.

Selanjutnya, untuk Direktorat Jendral IMAP, Industri Logam Mesin Alat Komunikasi dan Elektronika. Ini ada 9 kegiatan-kegiatan prioritas, sebagai contoh adalah implementasi *making* Indonesia 4.0 untuk sektor otomotif, juga ada penguatan struktur industri elektronika dan telematika. Kemudian, juga ada penerapan industri *four point o* pada sektor industri permesinan. Kemudian juga ada ekspor *coaching* dan fasilitas promosi bagi dunia usaha sektor IMAP.

Dan selanjutnya, kegiatan untuk Direktorat Jendral IKMA, industri menengah dan aneka. Ini ada 11 kegiatan prioritas, sebagai contoh adalah fasilitas peningkatan kemampuan 33 sentra IKM, kemudian juga ada fasilitas penerapan sertifikasi produk dan penguatan mesin dan lain sebagainya. Ada 11 untuk IKMA.

Selanjutnya, halaman 17 untuk Direktorat Jendral Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional, ada 18 kegiatan, ini cukup banyak. Sebagai contoh, penyusunan penyusunan rekomendasi, penyelesaian hambatan ekspor impor, juga partisipasi Indonesia sebagai *partner country Hannover Messe 2021* dengan 10 target kesepakatan kerja sama tentu nanti akan kami bekerja sama dengan BKPM.

Selanjutnya, juga penyusunan posisi *funding* dalam runding, diskusi perundingan dalam perjanjian internasional. Juga ada fasilitas peningkatan prestasi dan oprasional, oprasional 5 kawasan industri prioritas di luar Jawa.

Selanjutnya, ada juga, ini juga dimohon dukungan dari Komisi VI. Yang nomor 18, ada apa namanya kebutuhan kami untuk membentuk *indents intelligent*. Dimana kami juga sudah melaporkan kepada Bapak Presiden dan Beliau setuju, memang memang menurut Menteri Luar negeri, belum bisa di eksekusi, belum bisa di implementasi, sehingga kami harus sabar. Ini berkaitan dengan pembentukan atase industri yang kami hanya minta di dua wilayah saja, yaitu di Beijing dan juga di Seoul, ya. Kami tidak inginkan di Amerika, belum minta di Amerika, belum minta di Abu Dhabi, belum minta di Dubai ya, belum, kami hanya minta dua dan sudah disetujui Bapak Presiden. Walaupun memang, jawaban dari Menteri Luar Negeri belum bisa dieksekusi tahun ini, mudah-mudahan tahun depan bisa kita eksekusi.

Selanjutnya, program untuk program dukungan management.

KETUA RAPAT:

Tahun depan itu, tahun 2021 rencananya?

MENTERI PERINDUSTRIAN RI (AGUS GUMIWANG KARTASASMITA):

Iya.

KETUA RAPAT:

Tapi, harus dianggarkan tuh Pak, mulai sekarang.

MENTERI PERINDUSTRIAN RI (AGUS GUMIWANG KARTASASMITA):

Siap. Memang, suatu kebutuhan kami, Pak untuk ada *industrial intelligent* itu, supaya kita bisa betul-betul siap untuk siap.

Kemudian, untuk program dukungan management untuk Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal. Ini ada 7 program, contohnya adalah evaluasi, regulasi bidang industri, kemudian pengembangan *platform* data dan industri 4.0, juga ada peningkatan TKDN dengan target nilai rata-rata TKDN sebesar 49,9 skala 40%, maka kami akan tingkatkan ke 49,9. Juga, ada pengawasan agenda prioritas nasional dan implementasi industri 4.0.

Bapak Pimpinan, segenap Anggota Komisi VI yang kami hormati.

Komposisi anggaran yang tercermin pada pagu anggaran, pagu indikatif 2021. Untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah industri, bisa kita lihat masih sangat sangat terbatas, sangat kecil sedangkan kita sekarang sedang berupaya agar industri bisa pulih lebih cepat karena kita semua paham, sadar bahwa industri memang suatu sektor yang sangat penting, karena memberikan kontributor, kontribusi terbesar, bukan nomor 2 bukan nomor 3, tapi terbesar bagi PBB. Dan juga belum lagi kalau kita bicara mengenai kesiapan dari kompetitor kita, industri-industri pengelolaan, industri-industri manufaktur, dari Kawasan Asean, dari India, dari Bangladesh dan sebagainya. Sehingga memang, bisa ini kalau menurut istilahnya Pak Bahlil, kami bukan cengeng, Pak Pimpinan dan segenap Anggota Komisi VI yang terhormat, tapi memang memang diperlukan, dibutuhkan suatu dukungan anggaran tambahan agar upaya kita untuk mendorong industri bisa pulih lebih cepat, itu bisa tercapai.

Kita bisa lihat, pada halaman 21 misalnya, ini utilisasi industri sebelum sebelum Covid-19 hadir di Indonesia. Rata-rata utilisasi itu 75% ya, setelah Covid hadir di Indonesia, rata-rata utilisasi industri itu 40-45%. Jadi, kita bisa lihat betapa apa namanya tertekannya industri manufaktur. Walaupun memang, sektor industri manufaktur bukan satu-satunya industri yang tertekan, bukan satu-satunya sektor yang tertekan. Nah, tapi industri manufaktur faktanya memang pemberi kontributor terbesar bagi PBB.

Ini ada beberapa *issue central*, *issue* strategis yang harus kita takel, yang harus segera kita *address*, yaitu *lesson learn*. Pak Pimpinan dan segenap Anggota Komisi VI. *Lesson learn* ini adalah bahan baku kita, kita masih sangat tergantung kepada bahan baku dan bahan penolong sektor industri. Sehingga, memperlunya diturunkan, kita perlu untuk apa namanya mengembangkan atau memperdalam struktur industri kita.

Nilai import, nilai import bahan baku dan penolong tahun 2019 saja sebesar USD126 miliar . Jadi, mencukupi cukup besar Bapak Pimpinan dan segenap Anggota Komisi VI.

Kemudian juga, kurangnya efektif efektifitas kebijakan dalam keterbatasan ruang fisik, ini bisa kita pahami. Karena, fiskal kita juga memang terbatas dan dana-dana pengurangan tenaga kerja sektor industri. Berkaitan dengan PSBB, dimana mobilitas dari karyawan, dari pekerja, dari buruh itu dibatasi dan juga adanya PKH serta karyawan-karyawan yang dirumahkan.

Kami mempunyai target Bapak Pimpinan dan segenap Anggota Komisi VI yang terhormat, halaman berikutnya. Ini 3 3 target yang menengah kami ya. Yang tentu, satu sama lain ini saling berkaitan dan saling bergantung. Yang pertama adalah substitusi impor. Ini kami targetkan bisa ada penambahan substitusi impor, artinya impor baik itu bahan baku, bahan baku antara, maupun bahan jadi sebesar 35% *by the end of 2020*. Memang ini suatu angka yang habisi, ambisius bagi banyak orang. Tapi, kami sangat yakin, sangat yakin sama catatan. Sekali lagi, apabila obat dan vaksin untuk Virus Corona ini bisa ditemukan segera. Karena, kalau tidak kalau tidak, industri di lapangan itu tetap mau tidak mau, suka tidak suka harus menerapkan apa yang disebut dengan protokol Kesehatan. Sehingga ada jarak, sehingga ada keterbatasan dari utilisasi, dari kata kapasitas yang seharusnya bisa secara maksimal dicapai oleh industri itu sendiri. Jadi, selama PSBB, selama ada penerapan jaga jarak, tentunya kita tidak akan bisa atau tidak akan mudah

untuk mengembalikan, misalnya PMI, PMI kita kembali itu di bulan Februari 51,9% ya, tapi kalau obat dan vaksinnnya sudah segera kita temukan segera, itu kita bisa terbang tinggi, Pimpinan dan segenap Anggota Komisi VI. Sehingga, kami berani menargetkan 35% penurunan impor bahan baku dan penolong industri pada Tahun 2022.

Kemudian juga, apa target infrastruktur data. Ini yang merupakan penguatan infrastruktur data dalam rangka perlindungan industri dalam negeri dan juga peningkatan *sell* PDB, dan utilisasi manufaktur ini dalam target kita dalam melindungi industri dalam negeri itu sendiri.

Selanjutnya, kami ingin menyampaikan usulan dari kementerian Perindustrian, usulan program Kementerian Perindustrian yang memerlukan tambahan anggaran. Yaitu, yang pertama untuk program perlindungan dan penanaman, pengamanan industri dalam negeri. Ini tentu di dalam rangka kita menjaga utilisasi industri agar tetap tinggi dan dan kualitas barang dari hasil-hasil produksi dalam negeri kita bisa bersaing dengan produk impor.

Kemudian, program penumbuhan industri substitusi impor. Ini tentu dalam upaya untuk penurunan impor, yang tadi kami sampaikan secara 35% pada tahun 2022, melalui substitusi impor dengan **..(suara terputus-putus)** salah satu instrument perubahan industri dalam negeri. Kita punya banyak instrument yang bisa kita lakukan ya untuk apa namanya merealisasikan target kita, 35% substitusi impor.

Kemudian juga, program penyiapan sumber daya manusia industri dalam sebuah forum bahwa kami ingin melaporkan kepada Komisi VI bahwa diprediksi pada tahun 2024 akan ada kekurangan sekitar 2,5 juta sumber daya manusia industri yang merupakan kebutuhan industri. Ya, ini kami bicara di luar program-program yang sudah ada di Kementerian Perindustrian ya. Nanti, akan ada GAP, akan ada GAP sebesar sekitar 2,5 sekian juga, yaitu kebutuhan sumber daya manusia industri yang perlu atau yang dibutuhkan bagi industri pada tahun 2024. Sehingga, program penyiapan sumber daya manusia industri ini menjadi sangat penting.

Kemudian, usulan yang terakhir, program pengembangan infrastruktur digital sektor industri. Tentu, program ini dalam upaya pengiatan sarana pra sarana untuk infrastruktur digital sektor industri dalam mendukung *making* Indonesia 4.0 dan juga pembangunan sistem digital yang terintegrasi.

Selanjutnya, usulan yang tadi kami sampaikan 4 usulan ini sudah kami apa namanya sudah kami hitung Bapak Pimpinan dan segenap Anggota Komisi VI. Untuk program perlindungan dan pengamanan industri dalam negeri, kami membutuhkan tambahan sebesar 1,5 triliun. Sedangkan, untuk program penumbuhan industri substitusi impor, kami membutuhkan tambahan sebesar 500 miliar, untuk program penyiapan SDM industri, kami membutuhkan tambahan sebesar 1 triliun 17 miliar dan untuk program pengembangan infrastruktur digital sektor industri, kami memerlukan tambahan, membutuhkan tambahan sebesar 410 miliar. Saya kira detailnya tidak perlu saya sampaikan, walaupun sudah saya siapkan Bapak Pimpinan dan segenap Anggota Komisi VI yang terhormat.

Selanjutnya, kami mohon arahan, bantuannya kami mohon dukungan dari Komisi VI **..(suara terputus-putus)** kita bisa berhasil.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Menteri.

Usulan Bapak ini lebih rendah dari dana talangan Krakatau Steel, Pak. Krakatau Steel dana talangannya 3,5 triliun, Pak untuk membantu satu perusahaan, Pak. Saya yakin yang bapak bantu lebih dari satu perusahaan. Jadi, dari usulan ini saya lihat masih kurang 3,4. Kalau Krakatau Steel, minta 3,5 Pak dan disetujui 3,5. Kemudian, dana talangan lagi. Dana talangan ini sedang kami apa sedang kami obrolkan kolaborasi disini, banyak teman-teman yang masih meragukan aturan main dari pada dana talangan tersebut. Apakah bisa, karena dia sudah *go public* dan sudah menjadi perusahaan public juga.

Selanjutnya, Pak Bahlil. Silakan.

KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Syallom,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.

**Yang saya hormati, Pimpinan Komisi VI, beserta
 Seluruh Bapak Ibu Komisi VI yang saya muliakan.
 Bapak Menteri Perindustrian dan seluruh pasukannya yang sempat hadir, yang
 saya hormati, dengan
 Pasukan saya dari BKPM juga yang saya hormati.**

Ini penting, Pimpinan. Kalau kita tidak hormati pasukan nanti Pimpinan nggak bisa kerja soalnya. Menteri sama Kepala BKPM cuma tau *taken* aja, kalau mereka salah kasih materi, selesai lah kita.

KETUA RAPAT:

Ya, biasanya ditikam dari belakang.

KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA):

Nah, gitu. Jadi, sebenarnya kalau Menteri sama Kepala BKPM gagal itu bukan karena tidak cerdas, karena tidak memiliki suasana kebatinan yang di belakang ini, Pak. Menyangkut anggaran diputus-putus keliatannya begitu.

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena, atas rahmat dan hidayah-Nya lah sehingga sampai pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang sangat dimuliakan ini dalam rangka pembahasan terkait dengan RKA KL BKPM tahun 2021 dan rencana kerja pemerintah tahun 2021.

Izin, Pimpinan.

Tadi, kalau dari Menteri Perindustrian banyak sekali menyampaikan pemaparannya, ini terkait dengan minimal anggaran yang sudah direncanakan. Kalau BKPM, mungkin tidak sampai 10 menit karena anggarannya kecil, jadi juga waktunya akan semakin sempit begitu. Kita biasanya lamanya waktu persentase itu tergantung beban kerjanya. Cuman, BKPM ini beban kerjanya tinggi tapi anggarannya kecil, tapi nggak apa-apa.

Pimpinan sekalian,

Saya masuk kepada pokok materi. Saya ingin *highlight* untuk memberikan satu pemikiran terkait dengan bagaimana caranya untuk kita bisa keluar dari kondisi pandemic Covid terkait dengan. Karena, ini ada keterkaitannya dengan tugas-tugas Bapak, Ibu Anggota DPR yang terhormat terkait dengan arah kebijakan Bapak Presiden dan program pemerintah ke depan.

Yang pertama, arah kebijakan pemerintah itu fokus kepada pertumbuhan ekonomi. Mereka *free* terhadap permasalahan ekonomi. Oleh karena itu, saya pikir ini harus menjadi tolak ukur untuk kita menyusun beberapa kebijakan terkait dengan Kementerian Lembaga di bawah pimpinan, di bawah koordinasi Komisi VI. Kami secara kebetulan ditugaskan dalam bidang investasi investasi. Investasi arahan Bapak Presiden adalah salah satu point terpenting untuk harus bagaimana kita bisa memberikan. Oleh karena kita bisa memberikan, maka harus kita menyusun langkah-langkah komprehensif, strategis dan praktis dalam mendorong. Sudah tentu bekerja sama dengan Kementerian-Kementerian teknis. Oleh karena itu, izinkan saya pimpinan untuk menyampaikan yang pertama. Saya tidak perlu membacakan isi surat, apa nomor surat yang tadi dibacakan oleh Menteri Perindustrian karena sumbernya sama, nomornya sama, lampiran yang berbeda dan angkanya yang berbeda. Untuk lebih menyingkat waktu, maka saya menyampaikan, mengingatkannya saja.

Ini kan Pimpinan dewan ini kan selalu efektif dan efisien, Pak. Jadi, kita harus. Yang penting hasilnya, yang penting kan itu.

KETUA RAPAT:

Tadi, kami sangat mengerti tadi yang dimaksud dengan pesan itu tersirat bahwa apa mengerti suasana kebatinan. Jadi, sebenarnya itu sindiran untuk kita. Beliau Beliau mengerti suasana kebatinan kita.

KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA):

Izin, Pimpinan. Berdasarkan nomor surat dan surat keputusan bersama yang nomor dan tanggalnya sudah disampaikan terdahulu oleh Menteri Perindustrian. Namun, kami melengkapinya bahwa pagu anggaran yang ada pada BKPM pada tahun 2021 sebesar Rp439.500.127.000,-. Itu saja. 439 ribu 500 eh 439 miliar, eh salah ketik. Perusahaan kan angkanya gede-gede sedikit, triliun. Kalau masuk BKPM, cuma ratusan miliar. Jadi memang, agak sedikit. Kalau saya di perusahaan agak susah bacanya, ratusan miliar biasanya triliun, Pak. Jadi, memang angkanya agak sedikit ini. Rp439.500.127.000,-, Rp500.127.000,-.

KETUA RAPAT:

Wah, ini lebih lebih kecil dari ini apa PMN kita terhadap ITDC, untuk balap balap motor di Mandalika.

KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA):

Ini saya mau kasih tau lagi, Pimpinan. Ada lagi nih, kalau dibandingkan dengan anggaran kita sebelumnya, Pimpinan itu sebesar Rp585.471.934.000,- betul, Bu Sista. Ini Sistem saya baru jadi, kalau saya salah tanggungjawab dia membenarkan, sekaligus saya perkenalkan Sistem. Sudah betul ini tugas ibu, sudah betul ibu Sistem ini. Terjadi penurunan kurang lebih sekitar 24%, Pimpinan. Di saat bersamaan, kita juga diminta untuk harus menaikkan realisasi investasi yang dari 2019, 809 triliun. Tapi, di 2020 itu menjadi 817 triliun. Jadi, anggaran 2019 itu 580 miliar lebih, target realisasi 794 triliun. Realisasinya 809 triliun, surplus 12 eh 17 triliun 100%. Di tahun 2020, anggaran kita diturunkan karena Covid. Oke lah, kita mengerti Covid ini tanggung jawab masalah semua. Target realisasinya bukannya turun, dinaikkan 817 triliun yang tadinya 888 triliun diturunkan menjadi 817 triliun. Anggarannya pun dipotong 390 sekian triliun. Kurang lebih sekitar 190 triliun ya, Pak Stefani, eh miliar ya Pak Demmer. 195 miliar, *sorry*.

KETUA RAPAT:

Nggak apa-apa, Pak. Gantungkan lah cita-citamu setinggi langit. Jatuhnya masih tetap diantara bintang.

KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA):

Ini resiko abdi negara. Kalau di perusahaan masih bisa kita *maintenance*.

Jadi, Pimpinan dengan 439 miliar 500 juta tersebut. Ini habis hanya untuk gaji operasional **..(suara tidak jelas)** selesai dengan dibagi, saya tambah itu

Rp257.909.393.000,- Deputi bidang pengembangan iklim, penanaman modal 9 miliar, ini habis untuk operasional rapat-rapat saja. Bayangkan, Pak Pimpinan di BKPM itu dikasih tanggung jawab oleh Inpres untuk meningkatkan *yieldlibility* dan 73 itu mau di, Pak Presiden perintah kita harus di urutan 40. Jadi, dikasih tugas, dikasih target, bensinnya tidak dikasih. Ah, kalau bapak Anggota DPR, besok pagi kenapa nggak naik, pasti saya kembalikan Pak, anggarannya belum dapat Pak, kira-kira begitu.

Kemudian, Deputi promosi penanaman modal, ini 84 miliar 995.000 eh 995 juta. Ini sudah membiayai 9 negara. Tadi, kalau Menteri Perindustrian baru buka 2 atase, kita sudah 9 negara. Ini pun anggarannya hanya untuk bayar kantor dan biaya makan mereka. Jadi, kalau belum ada relokasi pabrik yang datang, jika kita tanyakan dan jawab ini bersama-sama, karena kalau dalam perusahaan biasanya kalau kita mencari partner harus ada strategi negosiasi. Dalam strategi negosiasi itu ada instrumen yang dipakai dan instrumen itu biaya lebih yang dikeluarkan. Jadi, ini negara mau menghasilkan tapi anggarannya belum dikasih, saya juga bingung hasil apa yang harus dicapai. Ini sekedar untuk kita ketahui bersama saja.

Kemudian, Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal 7 miliar. Jadi, pantasan kita ini kalau negosiasi dengan negara-negara lain, ini juga dibawah Pimpinan Komisi beberapa, staf kita ini jadinya malas. Karena apa? Kan mereka harus *marketing intelligent*. Kita mau negosiasi dengan negara lain kan, mereka harus jalan, cek dulu. Apa keinginan disana, apa kelemahan disana, kemudian negara kita membawa apa, bagaimana negara kita Indonesia mau bawa ke luar negeri kalau biaya perjalanan sampai di *airport* sudah habis. Apa yang mau di negosiasikan disana, mereka bilang. Sementara, kita berharap negara-negara dilengkapi dengan senjata. Ibarat perang, Pak. Mereka sudah F16 di negara lain, kita masih bambu runcing terus, masih 17 '45 kita, yang ada semangat saja. Ini Pak Menteri Perindustrian **..(suara tidak jelas)** cuma nggak berani saja. Tahu ini barang ini lah enakya, Pak kalau kita bebas, kalau kita bebas partainya begini, Pak. Menyampaikan apa adanya, Pak.

Kemudian, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal 19 miliar, Bapak-Bapak bayangkan, Inpres nomor 7 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang PTSP, seluruh pelayanan perizinan usaha 22 kementerian lembaga yang sekarang sudah dikasih ke BKPM dan harus terintegrasi ke kabupaten/kota, anggarannya 19 miliar. Ini hanya dipakai bayar apa itu namanya apa namanya, *office* saja nggak cukup. Belum dapat komplain dari konstituen Bapak-Bapak terhadap OSS yang macet. Ini bagaimana kita memulai OSS, kalau aplikasinya nggak dibayar-bayar iurannya. Ini *fair* juga nih, dampaknya ke Kementerian Perindustrian. Ke Kementerian Perindustrian, kenapa masalahnya nggak *clear-clear*, belum bayar, Pak. Tapi kan nggak enak juga disampaikan belum dibayar kan.

Kemudian, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Ah, ini Pak terkait dengan kerja-kerja dari BKPM untuk mengeksekusi investasi mangkrak. Dan Bapak bayangkan, dana masuk BKPM, total investasi mangkrak itu 708 triliun dan ini kalau tereksekusi semua, berapa *multiple effect* untuk menciptakan lapangan pekerjaan pendapatan negara. Kalau pajak itu kan hilirnya, hulunya itu kan bagaimana perusahaan jalan. 86% dari total pendapatan negara dari sektor pajak, itu pajak yang paling besar itu adalah pajak badan, pajak perusahaan. Tapi, oleh negara memberikan stimulus untuk mengurus investasi mangkrak hanya 43 miliar. Jadi, ini kalau saya seorang pengusaha,

ini saya bingung. Tidak tahu bagaimana kita harus pakai, tapi ini sebuah fakta. Tapi, saya yakin Pimpinan pasti punya hati untuk mendengarkan ini.

Kemudian, Pimpinan. Di dalam Deputi Pengendalian ini pun sudah kita berikan dana *backup* kepada masing-masing provinsi, totalnya 10 miliar. Jadi, pegawai BKPM ini sebenarnya betul-betul harus dikasih penghargaan oleh negara bahwa mereka ini pahlawan tanpa pamrih.

Kemudian, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal, ini 16 miliar. Jadi, tidak mungkin untuk BKPM mengakomodir pikiran cercah dari Komisi VI untuk membuat *roadmap* inventarisasi potensi daerah dalam rangka memberikan skala prioritas untuk kita jadikan *market in* ke negara lain, karena kita nggak punya anggaran. Anggaran ini, Pak kalau kita itu hitung-hitung, ini perjalanan dinas nggak ada lagi. Jadi, ini cuman di kantor aja, buru-buru, terima apa adanya yang penting listrik tidak mati, internet jalan, jangan macet-mcaet juga, apalagi kalau rapatnya Zoom-Zoom terus kan. Saya sampaikan untuk apa namanya tim saya, saya katakan bahwa tidak boleh kita cengeng. Saya kebetulan nggak pernah hidup untuk pasrah dengan keadaan. Selalu cari solusi dari keadaan ada. Tapi, kalau solusinya kita keluar tapi hasilnya juga yang dikasih target besar, kelihatannya juga agak agak harus kita pikirkan lagi.

Kemudian, Pimpinan saya perlu melaporkan pada *slide* terakhir adalah prioritas nasional BKPM dalam RKP 2021. Saya bagi menjadi dua, Pimpinan. *Slide* nomor 8, coba aa ini agak sedikit akademis sedikit nih. Supaya dibilang bahwa Kepala BKPM tahu angka ekonominya dikit juga. Jangan dipikir lapangan aja, gitu.

Yang pertama, protes pertama adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Yang kedua adalah mengembangkan wilayah, nilai kesenjangan dan menjamin pemerataan. Investasi ke depan kita akan mengarahkan kepada investasi yang berkualitas dan berkeadilan. Artinya apa antara PMA dan PMDM kita dorong agar tidak terlalu terjadi perbedaan yang signifikan dan harus berkolaborasi dan investasi ke depan kita akan mendorong kepada sektor-sektor yang bisa memberikan nilai tambah, serta mampu menghasilkan produk-produk sebagai substitusi impor dan juga berorientasi ekspor.

Ini terkait dengan arah kebijakan Bapak Presiden tentang transformasi ekonomi, ujung-ujungnya adalah industri. Tetapi, Pak Menteri Perindustrian tadi sungkan menyampaikan, karena mungkin anggarannya dia kecil, gitu. Bagaimana Menteri Perindustrian mau bikin industri di kawasan Sulawesi, Kalimantan, Papua, Sumatera untuk memberikan pemerataan pertumbuhan kalau anggaran untuk bagaimana memberikan penelitian aja enggak ada, kira-kira begitu ya. Habis itu anggaran 10% BKPM, Pak. Bagi tugas ini kelihatannya.

Yang kedua adalah menyeimbangkan nilai untuk mengurangi kesenjangan.

Pimpinan dan Bapak, Ibu Anggota Dewan yang terhormat.

Pembangunan infrastruktur, itu instrumen awal untuk melahirkan tumbuhnya kawasan pertumbuhan ekonomi baru. Harapannya adalah tidak boleh pertumbuhan ekonomi itu hanya fokus pada daerah Jawa. Kalau 60%, kalau total pertumbuhan ekonomi nasional kita 60% itu setelah dari konsumsi, maka konsumsi itu 70% ada pada daerah Jakarta, Jawa Barat, Banten, JB JB. Maka, dengan demikian dapat dipastikan

bahwa postur pertumbuhan pada wilayah-wilayah di luar Jawa itu terjadi ketimpangan. Maka, arah terjadi kebijakan ke depan BKPM adalah bagaimana mendorong investasi antara Jawa dan luar Jawa itu berimbang dan ini sudah mampu kita wujudkan di kuartal pertama, realisasi investasi di luar pulau Jawa 48,5% dan di Jawa 51,5%. Ini pertama kali terjadi sejak 6 tahun terakhir. Ya, ini sebagai bentuk wujud komitmen kita sebagai anak daerah, kira-kira begitu. Tetapi, pimpinan di Bali ke depan akan lebih baik kok, Pimpinan.

Itu kira-kira yang menjadi solusi untuk bisa kita mencapai target dari Bapak Presiden, halaman 9, Bappenas telah menyusun beberapa langkah-langkah kebijakan strategi untuk meningkatkan realisasi investasi dan sekaligus terkait dengan bagaimana pertumbuhan ekonomi di angka 4,5 atau sama dengan 5,3 di 2021. Maka, yang pertama Pimpinan, kami mengusulkan ada 6 program utama sebagai instrumen untuk pencapaian tujuan agar realisasi investasi tercapai 850 triliun dan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.

Yang pertama adalah kita harus melakukan eksekusi investasi yang mantap dan investasi skala besar di industri. Ini harus kita lakukan, kita harus datang kenapa masalah mereka. Jangan menunggu mereka yang datang ke kita. Kita suka terlalu umbar juga kasihan pengusaha, ini kalau ketemu Menteri, ketemu Kepala BKPM itu protokolnya Panjang juga, ini pengalaman saya dulu maksudnya dulu itu. Jadi, kita ubah caranya, kita datangi mereka. Apa masalah kalian, karena ini negara membutuhkan lapangan pekerjaan. Kalau nggak lapangan pekerjaan kita siapkan, maka kita masuk pada krisis kedua yang namanya krisis social dan untuk menciptakan lapangan pekerjaan hanya satu caranya, investasi. Ketika investasi tidak mampu kita lakukan secara baik, maka kita lahir pada persoalan kedua.

Yang kedua adalah tekad potensi investasi daerah. Saya setuju dengan Pimpinan dan Anggota Komisi VI dalam beberapa rapat dengan BKPM khususnya dari Pak Aria Bima, menyampaikan bahwa sampai dengan sekarang belum ada data tetap potensi investasi unggulan di masing-masing wilayah, itu benar Pak. Saya tidak tahu kalau di Kementerian Perindustrian, tapu jujur Pak, tidak ada Pak. Saya ini datang ke BKPM, ini mengarang bebas, Pak. Kita ini punya matriks yang panjang pak dari saya belum lahir sampai sampai sekarang sama aja. Indonesia punya 17.000 pulau, punya 2,7 juta kilometer daratan, 3 juta kilometer lautan, pesisir pantai panjangnya 81.000. Katanya kita kaya, tapi nggak jelas Pak, kita ini darimana? Karena, ga ada data tetap potensi itu tidak ada. Jadi, tidak ada sampai dengan sekarang perencanaan. Katakana lah, kita giring di Kalimantan sektornya apa, di Sulawesi apa, di Sumatera apa, itu belum ada Pak. Nah, kita minta dan ini kita sudah menyurati Bappenas dan Bappenas sudah setuju, saya kita membuat peta potensi investasi investasi daerah. Yang kita sinergikan dengan Kementerian-Kementerian yang ada, sehingga itu menjadi satu data. Itu lah yang menjadi senjata bagi dubes-dubes, bagi perwakilan BKPM untuk kita menarik investor, untuk kita menarik promosi.

Yang ketiga, Pak. Nah, ini perintah Bapak Presiden. Fasilitas relokasi investasi asing. Beliau tidak pingin kejadian 2017-2018 ketika terjadi perang dagang antara China dan Amerika, tidak ada satupun relokasi pabrik dari China yang ke Indonesia, semuanya melewati Vietnam. Ini beliau wanti-wanti betul ini, Pak.

Nah, ini bisa kita jalan kita ini berkompetisi dengan negara lain. Negara lain mendatangi, merayu mereka, kalau mereka ada dimana, di lubang batu pun mereka

datangi, merayu. Tapi kan, semua harus ada fasilitas. Nah, kita cuma keinginan saja, tapi belum kita siapkan hal ini. Tapi, BKPM sudah melakukan. *In Syaa Allah* kejadian 2017-2018 tidak akan terjadi untuk sekarang ini, tapi biar lah data itu disampaikan Bapak Presiden. Kita *In Syaa Allah* ada kabar gembira, Pak.

Yang keempat, Pak. Kita membuat *debottle necking dan aftercare* investasi melalui pendampingan investor. Kita di BKPM sudah membuat tim, Pak Satgas. Jadi, tugasnya ada 3. Dia melakukan *marketing intelligent* kepada seluruh pengusaha-pengusaha atau industri yang menggunakan dari China. Yang kedua ada dia betul-betul melihat negara-negara pesaing kita, apa yang mereka lakukan untuk mereka itu, insentif apa yang dikasih. BKPM atau Indonesia harus membuat 1 simulasi baru yang menarik untuk kemudian investor bisa masuk ke Indonesia. Yang ketiga adalah perluasan pos, berikutnya perluasan *positive list* investasi, terkecuali UMKM. Kalau UMKM, arahan Bapak Presiden bahwa harus diberikan tempat dan ruang yang lebih khusus dalam negara kita. Kalau selebihnya besar-besaran, kita harus memperlambat *positive list* nya.

Dan yang berikut deregulasi dan integrasi perizinan. Ini, Pak jujur saja selama ini kita *problem* itu kenapa daerah-daerah belum izin masih masalah di kabupaten/kota. Karena, kita belum terkoneksi dengan pusat OSS kita. Kenapa nggak terkoneksi, karena dulu cuma kita perintahnya aja kepada daerah. “Oy, buat kau buat kau”, aplikasinya nggak kita siapin, Pak. Jadi, ada aplikasi sicanik, sijelek, siapa, sinorak, banyak sekali itu aplikasi, nggak seragam. Kenapa, karena masing-masing daerah disuruh berkreasi. Nah, kita ingin kedepan negara dalam hal ini pemerintah pusat menyeragamkan semua. Dikasih dikasih *hardware*nya, dikasih *software*nya, dilatih. Setelah itu baru terkoneksi, kalau mereka tidak lakukan ya sudah aparat hukum memainkan lah peranannya, ap aitu mereka tidak melakukan. Ini sebagai bentuk dari pada transparansi.

Saya pikir hanya itu, Pimpinan. Sebenarnya saya bicara cuma 3 menit, tapi kadang Pak Menteri Perindustrian menyampaikan, terus lagi kompor terus. Usulan tambahan saya serahkan saja kepada Pimpinan. Saya hanya menyampaikan program yang tadi anggarannya saya persiapkan. Namun dengan tidak mengurangi rasa hormat kami terhadap Pimpinan, kami telah membuat surat kepada Bappenas dan Menteri Keuangan. Usulan tambahan kami itu tidak banyak, Pimpinan. Untuk mengcover 6 program tadi itu, kami minta tambah 509 miliar. Kecil aja dan itu *real* Pimpinan. Karena, BKPM ini orangnya lurus-lurus saja nggak pernah, nggak pernah *mark up-mark up*, nggak pernah.

KETUA RAPAT :

Interupsi, mungkin Bapak Kepala BKPM membacakan saja sebagai bagian dari apa presentasi ini bahwa sudah menyampaikan permohonan kepada Bappenas penambahan anggaran.

KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA):

Siap.

Baik. Seiizin, Pimpinan yang hormat dan atas perintah juga Pimpinan, maka izinkan saya lewat forum yang terhormat ini untuk membacakan isi surat resmi tanpa dikurangi 1 kata dan titik apapun.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. Nomor 147/A1/2020. Hah? Tadi saya izin dulu, katanya diizinkan. Kalau bapak bilang isinya, saya tarik lagi kata-kata saya, saya isinya saja kalau begitu ya.

Tadi, saya kan sudah usulan Bu, 591. Perincian. Kegiatan pemberian penghargaan dan atau pengenaan sanksi kepada kementerian lembaga dan pemerintah daerah bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp 25,-. Jadi, gini Pak. Ada Perpres 42 yang memerintahkan kepada BKPM untuk memberikan penilaian kepada kementerian lembaga serta Bupati Walikota Gubernur dalam hal perizinan usaha. Di dalam Perpres tersebut pada Pasal 19 mengatakan bahwa BKPM dengan ini bisa memberikan penilaian dengan memberikan sanksi kalau yang tidak bagus. Karena itu, anggarannya belum ada.

KETUA RAPAT:

Jadi, BKPM ini badan koordinator para Menteri, Pak.

KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA):

Wah, ini bisa kacau lagi ini.

Ini Perpres, Pak. Saya bacakan Perpres ini, Pak. Hati-hati Bapak-Bapak ini. Ini atau jangan gara-gara ini anggaran kita turun kali. Nah, ini Perpres, Pak.

Yang kedua, Bu. Pembuatan dan distribusi aplikasi OSS yang berbasis pada Undang-Undang Cipta Kerja untuk Pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota termasuk penyediaan sarana dan pendampingan dan kebutuhan anggaran sebesar 1 daerah kita anggarkan 200 juta dengan kecil-kecil aja, kita nggak boleh nggak boleh *mark up-mark up* kita harus sesuai hukum. Totalnya 150 miliar, per daerah 200 juta, Pak.

Tiga, penyusunan peta potensi investasi pada 17 provinsi prioritas dalam bentuk Pra FS dengan kebutuhan anggaran sebesar 1 daerah kita anggarkan 6 miliar kali 17 kurang lebih sekitar 112 miliar.

Keempat, peningkatan *Ease of Doing Business* kita, dengan kebutuhan anggaran sebesar 40 miliar. Ini untuk kemudian kita lakukan sosialisasi sampai di tingkat pelaku di daerah. Kemudian, eksekusi dan realisasi kemitraan perusahaan dengan UMKM, dengan kebutuhan anggaran sebesar 27 miliar.

Berikut adalah eksekusi realisasi investasi proyek-proyek besar pada wilayah barat dan wilayah timur, kurang lebih sekitar 40 miliar, masing-masing wilayah 20. Kemudian, melintasi rencana relokasi 40 perusahaan yang akan keluar dari China ke Indonesia dengan kebutuhan anggaran perusahaan 3 miliar, di kedepannya 120 miliar. Jadi, 3 miliar ini yang kita *hunting* nanti bukan 40 perusahaan, tapi mungkin lebih dari itu, bisa sampai 300 perusahaan. Tapi, biasanya di *hunting* itu akan dilakukan komunikasi dan biasanya maksimal itu di sekitar 40.

Itu Pimpinan yang perlu kami laporkan dan Menteri Bappenas kemudian sudah juga menyurati ke Menteri Keuangan. Kami juga sudah menyampaikan tembusan kepada

Menteri Keuangan dan lebih khusus setelah ini kami akan menjelaskan secara resmi Kepada Komisi VI DPR RI.

Demikian, Pimpinan.
Kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih.

***Wabilahi Taufik Wal Hidayah,
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam.

Pak Menteri beserta Kepala BKPM.

Tentu, apa yang disampaikan tadi menjadi catatan-catatan kami tersendiri di sini dan nanti kami akan mencoba untuk menyimpulkan, kita sepakati bersama kesimpulannya. Dimana kalau kami melihat daripada anggaran yang ada, yang dimintakan. Perindustrian memang dengan BKPM ini memang sangat memegang peranan penting, apalagi sebenarnya kalau kita melihat apa yang disampaikan Bu Sri Mulyani tentang defisit bahwa Beliau akan ragu bayar hutang untuk 10 tahun kedepan, justru kalau Beliau ragu, dia harus membangun industri yaitu subsidi impor dan ekspor dan industri pariwisata. Itu menurut diskusi saya sama yang mengerti tentang ekonomi makro secara internasional.

Jadi, kalau itu yang menjadi khawatir, semestinya di sini diperbesar, apalagi kalau kita melihat anggaran dari yang dimintakan itu, tadi saya sampaikan, Perindustrian meminta tidak lebih daripada anggaran untuk dana talangan Krakatau Steel. Kita jangan bandingin dengan apa dengan Garuda. Tapi, perbandingan dengan Krakatau Steel gitu loh. Nah, Krakatau Steel satu perusahaan, kalau ini kan pasti banyak perusahaan yang akan coba dibangun oleh rekan-rekan, rekan-rekan kita terutama untuk kalau kita melihat tadi paparannya, tentu untuk kepentingan untuk kepentingan merah putih. Karena, kita berbicara tentang tadi pemerataan ya dan pasti pelaku baru akan banyak timbul seperti yang Bapak Kepala biasa waktu jadi Ketum dia menyampaikan, "pertumbuhan yang tinggi harus yang berkualitas dengan pemerataan dan timbul pelaku baru maka, berikanlah kesempatan HIPMI untuk berperang." Ini waktu dulu, saya. Itu itu bahasanya dulu. Rupanya, sekarang diterjemahkan tadi itu menjadi prioritas di BKPM ini sangat menarik sehingga, apalagi tambahannya kalau saya lihat itu 500 anggarannya sendiri.

Kami sekarang ini sedang memberikan PMN kepada ITDC untuk balap motor, 500 miliar hari ini, tahun ini. Terus kemudian, tahun depan mereka usulkan lagi 1T. Jadi, Kepala BKPM ini masih kalah nih dengan ITDC, dalam apa dalam minta tambahannya.

Itu Barangkali teman-teman saya tidak ingin memperpanjang acara rapat ini. Karena, kita ketahui bahwa dari awal Pak Ketua BKPM sudah menyampaikan, Beliau sangat mengerti tentang apa suasana kebatinan kita sebagai anggota. Jadi, untuk sama-sama nanti kita bekerja.

Saya ada 13, waduh 13 penanya ini. Sudah, termasuk termasuk 11 tambah 1, Pak Deddy. Kalau ini sebelah kanan Tambah Satu tambah Pak Deddy. Kalau ini kita mengacu kepada aturan MKD kita, kalau ini 3 menit 3 menit saja, 3 menit kali 13. Kalau mau tertib teman-teman Peraturan kita bahwa 3 menit. MKD 256 Pasal 256 tentang 3 menit kita masing-masing, maka selesai kita ya maksimum setengah 12 kita bisa selesaikan.

Jadi, dan saya rasa ini anggarannya kecil-kecil aja, jadi tidak tidak banyak yang bisa kita komentari, karena anggarannya kecil-kecil aja. Karena, kebetulan pada hari ini kita berbicara tentang RKA KL untuk Pagu indikatif. Nanti, setelah ini masuk kepada pidato Presiden, setelah itu kita akan menuju kepada rapat-rapat untuk pagu definitif, yang nanti akan diketok tanggal sebelum tanggal 30 Oktober.

Untuk itu, apa yang menjadi perhatian dari teman-teman terutama teman-teman anggaran, yang akan memperjuangkan nanti di Panitia anggaran. Saya minta untuk banyak, kalau mau komentar lebih lebih bagus lagi dan saya minta dukungannya tentang perjuangan daripada Kementerian Perindustrian dan BKPM, termasuk perjuangan kita juga karena kalau ini kita berhasil, BKPM dan Perindustrian. Tentu adalah keberhasilan bagi kita di Komisi VI dalam kerjasama kita.

Saya persilahkan, yang pertama Pak Mukhtarudin.

F-PG (Drs. MUKHTARUDIN):

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan dan Anggota Komisi VI yang saya hormati, yang hadir baik secara fisik maupun virtual.

Bapak Menteri Perindustrian,

Bapak Kepala BKPM beserta seluruh jajaran yang saya hormati.

Terima kasih atas kesempatannya.

Pertama, tentu kaitan dengan perindustrian dan juga BKPM. Saya kira ini menjadi pengetahuan kita bersama bahwa dampak-dampak Covid-19 ini kan memang meluluh lantakkan perekonomian dunia bahkan Indonesia juga tidak luput terkoreksi sangat dalam. Kontraksi yang sangat kuat terhadap ekonomi kita terutama dunia usaha baik manufaktur industri maupun BUMN pun semuanya terdampak. Bahkan, Menteri BUMN mengatakan bahwa 90% BUMN kita itu semuanya terdampak signifikan hanya 10% yang tidak terlalu terdampak, yaitu industri pangan dan BUMN Farmasi.

Saya kira potret itu juga hampir sama gambarannya dengan yang terjadi di pendustrian atau industri yang korporasi. Bahwa ya kurang lebih 90% juga yang terdampak sangat signifikan terhadap industri. Nah, ini yang membuka mata kita bahwa ternyata Covid-19 ini betul-betul membuat kita syok ya, dunia syok, Indonesia syok, disini kita pun panik dan kaget sehingga, kita menyikapinya dengan kepanikan. Awal-awal sangat panik dan sekarang sudah tidak begitu panik dan sudah memasuki era *new normal*.

Dan tentu kita pahami bahwa virus ini, hari ini virulensinya sudah sudah mulai turun, tapi tentu dia akan bermutasi jadi virus-virus baru dan dahsyat lagi. Artinya, kita ini akan

menghadapi lagi situasi-situasi seperti ini yang ke depan entah kapan. Nah, oleh karena itu, maka kementerian dan lembaga harus mempunyai daya porkes terhadap itu dan daya antisipasi terhadap itu.

Covid-19 membuka mata kita bahwa industri farmasi kita sangat lemah. Ketergantungan industri farmasi kita sangat rentan terhadap impor. Oleh karena itu, kedepan tentu industri farmasi di harus menjadi program prioritas kita menghadapi kondisi jika terjadi seperti ini. Karena, tidak tahu seperti apa lagi ke depan virus ini.

Yang kedua, Covid-19 juga memaksa kita untuk mempercepat implementasi industri *four point zero*, ini fakta. Jadi, Pak Menteri Perindustrian kampanye 4.0 ini, hari ini dunia terbuka matanya bahwa ternyata industri 4.0 merupakan sebuah keniscayaan yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari.

Yang ketiga adalah PEN 2020 itu memang fokus kita kepada pemberdayaan UMKM. Untuk pemulihan ekonomi nasional 2021, Menko Perekonomian kemarin dalam-dalam kita rakor dengan raker dengan badan anggaran, bahwa 2021 maka pemulihan ekonomi nasional itu orientasinya kepada korporasi. Artinya, era kaya 2021 ini tentu harus didukung oleh anggaran yang maksimal di kementerian-kementerian yang bergerak untuk sektor korporasi atau swasta.

Oleh karena itu, maka relevan sekali penambahan penambahan anggaran yang diajukan oleh Kementerian Perindustrian maupun BKPM harus kita Komisi VI mendukung dan kita akan perjuangkan sama-sama. Artinya, tingkat pemerintah juga melakukan lobi di tingkat pemerintah, kami pun di tingkat di legislatif juga melakukan koordinasi dengan badan anggaran dalam forum-forum rapat dengan Menteri Keuangan, ini menjadi bahan kita untuk *sounding* dengan Menteri Keuangan terkait dengan kepentingan mitra Komisi VI, sekaligus juga kepentingan-kepentingan Anggota di Komisi VI dalam rangka peningkatan implementasi pemberdayaan kita kepada masyarakat yang kita perjuangkan di daerah pemilihan masing-masing.

Kemudian, terkait anggaran-anggaran 2021. Pemerintah dalam kebijakan fiskal 2021 adalah menerapkan konsep metode *Zero Based Budgeting*. Artinya, anggaran tidak bersisa. Konsep ini saya kira harus disikapi dengan betul-betul oleh kementerian dan lembaga bahwa dengan dan *Zero Based Budgeting* ini tentu membuat perencanaan menjadi prioritas-prioritas yang akan dilaksanakan pada anggaran 21 menjadi sebuah keyakinan yang harus dipersiapkan. Karena, menganut dengan sistem konsep ataupun dan metode *Zero Based Budgeting* yang sekarang, yang dipaparkan oleh Menteri Keuangan kita di badan anggaran dengan konsep metode *Zero Based Budgeting* ini. Tentu, mitra pemerintah akan menyesuaikan dengan itu.

Nah, APBN kita di 2021 memang dituntut untuk mampu menjadi stimulus pada sisi produksi dan sekaligus juga dari segi permintaan. Jadi, memang berat anggaran kita tahun anggaran 2021 ini. Jadi, di satu stimulus kita untuk menjadi, stimulus dalam sisi produksi tapi sekaligus juga menjadi, sekaligus juga untuk memenuhi permintaan. Nah, oleh karena itu maka, reformasi penganggaran dengan *Zero Based Budgeting* jadi sebuah, sesuatu yang harus disikapi.

Terkait dengan usulan Menteri Perindustrian. Saya kira ini akan kita perjuangkan sama-sama baik kata Bapak Kepala BKPM tadi, ngobrol-ngobrol sebelum rapat, ya kayak kayak kita berdoa saja, Pak. Doa-doa terus sudah itu turunnya kapan ya urusan anu lah itu, ya. Jadi, *ud'unni astajib lakum* gitu Pak. Minta lah kesehatan beri, minta terus Pak

Bahlil, *In Sya Allah* akan diberi. Kira-kira Pak Nusron Wahid, kira-kira betul lah ayat tadi ya kalau kalau ngambil kreasi, Pak Kyai. Kita ada tambahan Pak Kyai kita disini, Pak Nusron Wahid, dari Komisi VI, dari Fraksi Golkar.

KETUA RAPAT:

Cukup?

F-PG (Drs. MUKHTARUDIN):

Nah, untuk BKPM sedikit. BKPM sedikit saja dua dua menit paling lama. Bahwa BKPM ini Pak Ketua bilang, Badan Koordinasi Para Menteri. Ini Perpres yang membuat Pak Bahlil seperti itu, ya saya kira seperti itu. Tapi, jangan pula nanti Badan Koordinasi Penilaian Para Menteri, Penilaian Menteri. Kan repot juga nanti. Jadi, Perpres ini kira-kira perlu dirundingkan lagi loh Pak Bahlil, kira-kira seperti apa sehingga, tidak terkesan di publik, BKPM seolah-olah menilai para menteri aja kerjanya kan gitu ya.

Jadi, terus kaitan terakhir Pak ini kaitan kita terminta bebas tadi Pak Bahlil cerita tentang mengarang bebas. Begini Indonesia-China ini akan mengalami proses perang dagang yang sampai hari ini juga belum jelas seperti apa penyelesaiannya. Kemudian, Hongkong yang dulu 2 eh 1 dengan 2 konsep sekarang otonominya kan ke China, lambat laun sudah kembali ke komunis China. Artinya, ini Hongkong bukan lagi sebagai negara punya *previlege* tersendiri untuk mengirim barang ke negara lain. Katakan lah, Amerika aja barangkali Amerika sudah akan mencabut *previllegnya* dan akan melakukan barang di Hongkong adalah dia masukin barang yang sama. Hari ini kan semua transit Hongkong, barang masuk Hongkong keluar ke negeri lain tentu akan murah.

Ini peluang bagi Indonesia, investasi bagi manusia bagaimana menjadikan *New Hongkong* di Indonesia. Ini peluang Pak Menteri Perindustrian maupun BKPM, ini peluang bagaimana menjadikan *new Hongkong* di Indonesia, pasti terjadi Amerika akan cabut *previlege* kepada Hongkong, sehingga barang dari Hongkong melakukan hal yang sama untuk masuk ke Negara Amerika atau ke negara lain sehingga, ini peluang bagi kita bagaimana menjadikan Indonesia sebagai *new Hongkong*. Misalnya, Batam kembali dijadikan sebagai daerah *previlege zone*, yang 212 dicabut, ya Pak Bahlil kita kembalikan lagi setelah itu dengan dengan melihat posisi peluang dagang internasional kita.

Saya kira itu saja.
Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA):

Pimpinan, intrupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya.

KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA):

Pimpinan, mohon maaf sebelumnya, Pimpinan. Agar tidak terjadi bias candaan Pimpinan tadi itu, jangan dijadikan sebagai referensi. Jadi, saya jadi gemetar juga nih, bahaya juga. Jadi, ini candaan Pimpinan bahwa tadi saya menjelaskan bahwa kami mengajukan anggaran 20 miliar itu adalah konteks untuk membiayai terhadap peringkat Perpres untuk membentuk tim. Jadi, timnya itu ketuanya adalah dari institusi BKPM, Kementerian Keuangan, kemudian Mendagri, Menko. Tujuannya adalah meningkatkan daya saing ekonomi kita khususnya untuk investasi, maka tim ini menilai kinerja perizinan usaha. Jadi, tidak termasuk dinilai apa yang tadi Pimpinan sampaikan itu. Ini bahaya nih. Jadi, itu hanya untuk katakanlah di kabupaten kota, gimana proses perizinan mereka, di provinsi.

Kemarin, di kementerian lembaga kan sekarang sudah sentralisasi di BKPM. Nah, proses teknisnya itu masih di Kementerian teknis. Nah, ini Pak ya di maksudkan. Jadi, jangan sampai Bapak-Bapak berlomba-lomba dengan segala hormat diperlintir lagi nih, Pak. Ini Media banyak nih soalnya ini. Kita ngeri ngeri sedap nih di ruangan ini, bahaya nih jadinya. Jadi, mohon Pimpinan dicabut dulu kata-kata itu Pimpinan, sebelum kita lanjutkan. Jelas itu Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya, Badan Badan Koordinasi Penanaman Modal. Jadi, agak baper juga.

Iya, tadi Pak Mukhtar mengambil 5 menit, tapi saya sengaja tidak apa ini, karena beliau adalah banggar. Jadi, pada saat ini rapat kita seputar anggaran. Namun, kemana-mana saya lihat banyak persoalan apa saran dan sebagainya. Kalau bisa nanti saran dan lain-lain ada tersendiri karena kita bicara tentang RKAKL.

Selanjutnya, dikiri saya ada Bu Siti Mukaromah, Banggar juga nih. Tanggapannya tentang usulan-usulan kenaikan. Pak Mukhtar tadi setuju ya untuk memperjuangkan kenaikan-kenaikan itu ya. Kenaikan yang ini kan.

F-PKB (SITI MUKAROMAH, S.Ag, M. AP.):

Ya, terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.
Selamat siang salam sejahtera untuk kita semua.

**Yang kami hormati Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VI,
Yang kami hormati Bapak Menteri Perindustrian,
Bapak Kepala BKPM, dan
Seluruh jajaran dari Perindustrian dan BKPM.**

Terima kasih, sudah di beri paparan yang sangat apa sih apa namanya lengkap dari perindustrian maupun dari BKPM, dan tentu ini menjadi bagian dari komitmen saya sebagai bagian dari banggar, ada dari Komisi VI untuk ikut terus membantu memperjuangkan dari kemiskinan untuk ikut terus membantu memperjuangkan anggaran-anggaran tersebut tentunya kerangkanya adalah untuk kemanfaatan dan kesejahteraan buat masyarakat. Jadi, sepanjang itu adalah kembalinya adalah untuk masyarakat, tentu kami saya sebagai dari Fraksi PKB yang di Komisi VI, tentu ikut akan terus membantu memperjuangkan hal itu.

Dan beberapa hal catatan, Pak Menteri dan Kepala BKPM. Kami dari PKB ingin menyampaikan beberapa hal termasuk. Pertama, yang mungkin saya menyoroti di halaman kalau nggak salah di halaman 4 menteri dan kepala BKPM kami dari PKB sampaikan beberapa hal termasuk pertama yang mungkin saya ingin soroti tadi di halaman, kalau nggak salah di halaman 15 dan 16 dari Pak Menteri Perindustrian itu disampaikan tentang bagaimana bapak memprioritaskan anggaran untuk **..(suara terputus-putus)** ataupun IKM. Nah, saya pikir anggaran ini memang sangat dibutuhkan hari ini Bapak. Karena apa, termasuk salah satunya program-program pengembangan IKM yang juga di beberapa tahun kalau nggak salah periode kemarin dan hari ini dilakukan adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh para pelaku industri kecil yang ada di masyarakat sampai tingkat desa dan ya, tentunya kami juga terima kasih ya untuk sudah dilakukan dan melibatkan juga dengan teman-teman di Komisi VI ini.

Akan tetapi, ketika melihat angka itu menjadi prioritas tapi angkanya kecil. Nah, saya pikir ini harus menjadi bagian dari catatan yang harus bagaimana agar kita itu tidak setengah-setengah untuk membangkitkan IKM atau UMKM yang ada di masyarakat terlebih-lebih dengan kondisi masyarakat hari ini yang mereka semuanya adalah bagian dari yang ter dampak dari adanya Covid-19 ini.

Saya sering kadang-kadang bertanya kepada Bu Dirjen, ini bagaimana dengan IKM yang sudah kita gabungi dan kita kembangkan. Tapi, sampai hari ini hampir semua, saya nggak tahu kalau seluruh yang ada di Dapil saya mereka teriak karena memang ketika Kementerian apapun, Kementerian Lembaga menyampaikan bahwa hari ini, dalam Covid ini melakukan prioritas kepada mereka. Tapi faktanya, mereka belum menerima itu.

Nah, artinya sisi ini saya pikir dari Kementerian Perindustrian kita ingin bagaimana itu bisa sampai kepada mereka dan konkrit mereka merasakan kehadiran negara untuk menumbuh kembangkan Kembali, menghidupkan Kembali, agar mereka juga satu punya daya beli, kedua juga mereka bisa melakukan ikhtiar-ikhtiar dalam pengembangan usahanya ini. Nah, ini bagian dari catatan yang kita harap bahwa dari Kementerian Perindustrian tentunya, istilahnya kongkrit lah ya. Jadi, agar anggaran-anggaran tersebut kita kita perjuangkan juga sampai kepada masyarakat.

Yang selanjutnya juga, bagaimana untuk apa namanya bagaimana kita maju bahwa 4 fokus pembangunan telah mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan reformasi industri. Nah, bagaimana ini juga termasuk pariwisata dan investasi. Mungkin, ini juga langsung bisa berkaitan dengan apa yang disampaikan dari kepala BKPM tadi. Bagaimana agar hampir seluruh tentunya seluruh pariwisata itu mangkrak. Tentunya, ini catatan adalah mangkrak bukan hanya karena Covid saja, tapi memang klimaksnya ada di Covid ini. Lah, bagaimana potensi kita yang sangat luar biasa ini baik dari sisi industri, dari sisi apa namanya investasi dan lain sebagainya, ini bisa menjadi lumbung buat negara kita. Bagaimana ini juga bisa menghidupkan seluruh elemen masyarakat yang

bisa membuat masyarakat kita itu betul-betul menikmati, karena Indonesia memiliki kelebihan yang luar biasa. Nah, ini harus betul-betul di terus digali baik perindustrian, baik industri pariwisata maupun dari BKPM.

Mungkin, dari sisi jalan, hulu, mungkin dari bagaimana membuat investor itu betul-betul tertarik kepada apa namanya Indonesia. Itu harus kita, itu betul saya pikir negara punya kewajiban untuk hadir seperti itu. Kita sangat berharap itu, mudah-mudahan Perindustrian, BKPM itu juga bisa hadir secara maksimal.

Demikian juga, perindustrian dalam sisi ketika PSBB apa dilenggarakan. Pak Menteri mungkin bagaimana untuk mengatasi termasuk kelompok industri besar yang sudah melonggarkan, kemudian tetap berproduksi, tetap berjalan, tetapi mereka juga sisi kesehatan juga terjaga. Ini juga bagian dari sisi yang ada, sisi penjagaan, sistem membuka PSBB ini dalam sisi perindustrian besar. Satu sisi, kita tetap membutuhkan untuk tetap bekerja, produksi tetap harus jalan, industri harus jualan. Tapi, di sisi kesehatan juga harus di di prioritaskan bersama sama.

Kemudian juga, hal-hal lain yang saya pikir termasuk BKPM ini ada juga tentang tadi disampaikan bagaimana menghidupkan pariwisata, kemudian juga infrastruktur. Saya pikir juga termasuk salah satunya kalau memilik BUMN itu ada pabrik-pabrik gula. Pabrik-pabrik gula itu di mana-mana itu mangkrak. Hampir semuanya karena persoalannya adalah memang salah satunya adalah area penanaman tebu dan sebagainya. Tapi, ini kan ketika kemangkrakan ini kita tidak bisa mencari solusi secara menanam kembali atau lahan dan sebagainya. Saya pikir, kan kita bisa memanfaatkan misalnya menjadi area wisata edukatif dan lain sebagainya. Nah, saya pikir ini juga bisa menjadi bagian solusi yang harus dilakukan oleh pemerintah secara luas, sehingga kita bisa betul-betul apa namanya keluar dari hal-hal yang akan sangat membelit dan saya pikir kalau industri BKPM berjalan secara baik, meskipun tadi disampaikan Bapak Kepala BKN BKPM bahwa anggarannya kecil, ini akan bisa mendolang angka yang besar. Nah, angka yang besar ini kan yang saya pikir bisa dimanfaatkan bersama-sama termasuk untuk rakyat Indonesia.

Saya pikir itu *highlight* nya dari kami dan tentu sekali lagi Fraksi PKB dalam memperjuangkan anggaran untuk perindustrian dan BKPM, kami siap semaksimal kami. Tentunya dengan catatan semuanya adalah untuk kemanfaatan dan kesejahteraan buat masyarakat.

Terima kasih, Pimpinan. Akhirulalam.

***Wallahul Muwafiq Illa Aqwamith Thariq,
Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.***

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selanjutnya, Ketum HIPMI Jatim. Mufti Anam, berani ngomong gak sama ketuanya. Ketuanya dulu.

KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA):

Kalau nggak berani, berarti gagal.

F-PDIP (dr. H. MUFTI A. N. ANAM):

Terima kasih, Pimpinan atas bantuan yang telah diberikan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Pak Menteri Perindustrian,
Pak Kepala BKPM, serta
Seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan siang hari ini.**

Tentu kami mengapresiasi kerja keras dan kerja cerdas Pak Menteri Perindustrian dan Pak Kepala BKPM. Kemarin juga kami sampaikan bahwa Jasin Trudu Perdana Menteri, ini penting untuk diikuti bahwa Perdana Menteri Kanada menyampaikan bahwa pandemi di tengah Covid-19 ini menuju *leadership* seluruh pemimpin yang ada di dunia dan kami lihat panjenengan berduanya lolos dari semua itu, Pak. Karena apa, karena benar kami kemarin menyaksikan bahkan Pak Bahlil melihat di grup-grup Hipni, di grup-grup yang kita ada di dalamnya. Saya selalu kontra di dalam, “Ah masa sih di tengah pandemi investasi bisa masuk.” saya gitu kan terus. “Masa sih di tengah pandemi ada kemudahan perizinan dan sebagainya.” Tapi nyatanya, Pak hari ini sungguh di tengah orang, di tengah Kementerian lain sedang memPHK orang, Pak Bahlil mampu menciptakan lapangan kerja begitu. Itu yang kami lihat.

Yang kedua, perizinan juga demikian. Perizinan banyak kawan-kawan kami itu ngeluh. Ini kami butuh izin, kita perlu izin mengurus izin A izin B. Sudah urus dulu nanti tak sampaikan Pak Menteri. Padahal saya nggak pernah WA beliau, tapi ternyata bener. Satu hari dua hari, paling lama seminggu selesai, itu betul yang, artinya apa, tidak perlu dekat dengan beliau, karena sistem sudah terjaga sehingga perizinan memang cepat di OSS hari ini di Kementerian BKPM begitu.

Begitu juga dengan Kementerian Perindustrian di tengah pandemi begini, Pak Menteri memberikan terobosan-terobosan bagaimana kita tidak boleh takut menghadapi *new normal* begini, sehingga, beliau menciptakan beberapa regulasi. Sehingga, hari ini Perindustrian bisa begitu bangkit yang kemudian dampaknya terhadap masyarakat yang bisa mulai bekerja dengan mendapatkan pendapatan defisit itu.

Tapi kemudian, tentu sebagai fungsi kami untuk melakukan pengawasan, ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan Pak Menteri. Yang pertama soal rekor relokasi ke Jawa Tengah. Ini kan ramai di mana-mana, relokasi di Jawa Tengah. Padahal di dalamnya kami lihat masih belum ada sinkronisasi antara Kementerian. Pak Bahlil, Pak Menteri dengan Pak Kepala apa dengan Pak Menteri BUMN merelokasi dari Jawa Tengah yaitu, dari Brebes ke Batang kalau kami dengar kemarin. Nah, tapi kemarin kami saat rapat banggar, kebetulan kami juga di banggar. Rapat dengan Pak Menko apa Menko Maritim dan investasi. Beliau menyatakan bahwa ini belum pasti, bahkan masih akan kemungkinan akan kita relokasi keluar Jawa begitu. Nah, ini saja di internal belum jelas, belum pasti. Padahal, di luar ini orang sudah berancang-ancang untuk merelokasi. Kalau kita nggak siap, ini akan dimakan oleh orang lain, Pak.

Kemarin, Pak Menteri BUMN menarik informasi dari beliau, bahwa setelah beliau berdiskusi dengan apa Dubes China dan juga Jepang. Itu kita ini ditaruh di ranking keenam kalau enggak salah dari apa akan mereka yang akan mereka pilih. Yang pertama prioritasnya adalah Vietnam, kemudian ada bahkan apa yang saya kaget kita kalah dengan Bangladesh begitu. Nah, saya ingin tahun, apa sih tips-tips dari Pak Menteri ini untuk kita bisa keluar dari apa situasi yang sulit ini begitu. Nah, ini kenapa penting itu sinkronisasi untuk segera sinkronkan. Karena, agar kita bisa bersiap untuk melakukan, karena membangun kawasan khusus nggak begitu cepat begitu. Kemarin, KIP juga menyampaikan mereka sudah ada 27 lokasi ke Jawa Tengah. Tapi, kok katanya menteri Pak Menko Maritim, Pak LBP kok katanya beliau belum, ini belum diputuskan begitu. Jadi, mana yang benar begitu.

Nah kemudian, kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Kepala BKPM terkait satgas satgas lokasi. Nah, ini kami kami sepakat, kami setuju. Itu penting agar bagaimana kita jemput bola, tapi kan penting, betul kata Pak Menteri tadi. Kalau jemput bola nggak ada senjatanya itu bagaimana gitu. Nah, kami sepakat, kami akan dukung apabila ini direlokasi apa apa apabila ini diadakan anggarannya untuk itu, Pak. Tapi tentu, tadi kami juga melihat kata Pak Bahlil anggaran kita kecil. Pak Bahlil tahu kan anggaran Kementerian BUMN berapa. Anggaran Kementerian BUMN hanya 240 miliar, Pak dengan yang diurusi sekian banyak, sekian luar biasa begitu. Sehingga sebenarnya, 200 400 sekian miliar sudah sangat banyak. Tapi, dengan tugas yang jenengan yang emban begitu besar, kami sangat setuju. Jangankan 500 miliar, kalau *roadmap*nya jelas, tujuannya jelas, mau berapa triliun juga kita dorong, akan kita dukung atas hal itu, begitu Pak. Agar kami juga tidak apa, tidak tidak *fair* ketika jenengan kita kasih anggaran kecil, tetapi kita menuntut banyak hal ke panjenengan. Tapi, tentu tadi jangan hanya suasana kebatinan staff panjenengan yang panjenengan urus. Nah, seperti kita sepakat tadi kata Pak Pimpinan kami bahwa suasana kebatinan kami ini juga penting untuk didengarkan begitu, Pak. Ya, terima kasih Pak.

Nah, kemudian selanjutnya adalah terkait stimulus, ya untuk Pak Menteri Perindustrian terkait stimulus dan Perindustrian, Pak. Ini agar bisa segera direalisasikan, Pak agar bisa segera *clear* peraturan-peraturannya termasuk di dalamnya biaya listrik yaitu penghapusan biaya minimum konsumsi listrik, Pak. Terus kemudian penundaan pembayaran listrik, penghapusan PPN untuk bahan baku lokal tujuan ekspor dan kemudian stimulus pajak-pajak lain sebagainya, penghapusan biaya minimum dan sebagainya. Karena ini Pak, ketika ini di realisasikan tentu akan akan nafas kita, nafas pengusaha ini akan semakin panjang ke depan. Karena, di tengah pandemi ini memang sangat susah untuk kita hadapi bersama begitu.

Kemudian, rendahnya penyerapan insentif yang diberikan oleh pemerintah. Nah, ini makanya kami perlu dari Kementerian Perindustrian untuk mensosialisasikan ke masyarakat, karena banyak masyarakat yang tidak tahu atas insentif yang diberikan pemerintah ini, Pak. Ini kemarin kalau menurut Kementerian Keuangan, kemarin Beliau menyampaikan hanya terserap 6,8% atau sekitar 8 triliun dari 120 triliun. Ini luar biasa sayang sekali, padahal kita lihat kalau saya lihat penyerapannya di rapat banggar itu kok banyak sekali apa para pengusaha kita yang mempunyai, memenuhi syarat untuk mendapatkan itu. Tapi, sampai hari ini ini belum, mereka banyak yang belum tahu atas hal ini. Maka, kami dorong, kami minta, kami mohon kepada Bapak Menteri Perindustrian

untuk bagaimana ini disosialisasikan agar banyak masyarakat yang bisa mengakses atas hal ini.

Kemudian juga, stimulus korporasi yang disiapkan, yang didalamnya termasuk inrestrukturisasi kredit UMKM. Ini juga belum optimal. Anggarannya luar biasa sekitar 53 triliun yang kami lihat kemarin. Nah, harapan kami itu bisa di sosialisasikan dan didorong agar kemudian ada kebutuhan akses atas itu.

Nah, kemudian saya sepakat dengan yang disampaikan Bu Mukaromah dari PKB PKB tadi bahwa ini kami kaget, PKN kita ini ini prioritas di sini. Tapi, hanya ada 1.650 IKM, Pak. Hari ini di tengah kondisi pandemi yang begini, masya Allah di bawah ini tertatih-tatih IKM kita, Pak. Mereka itu potensial luar biasa, kemarin sempat jatuh bangunnya susah. Kalau orang stroke, Pak harus diangkat dulu Pak. Nah, harapan kami orang yang stroke dari IKM ini, orang yang sakit ini Pak, ini ada jutaan orang Pak. Jangan janganlah 1.000 anu 1.600 pun kurang apa kita sekarang ini ada yang lebih penting. Semua penting, semua sektor penting, tapi kalau IKM ini tumbuh, berkembang *In Syaa Allah* apa namanya ekonomi di daerah bergerak, ini akan juga membantu perekonomian kita secara nasional. Ya, minimal 200.000 IKM lah Pak yang dibantu Pak.

Kalau perlu anggaran kita akan bantu, akan bantu dorong untuk bagaimana bisa lebih optimal. Bapak anggarannya seperti yang disampaikan Pimpinan. Kami sepakat anggaran Bapak itu 2,5 triliun, yang lain kemarin pada minta PMN ke kita, minta talangan bahkan dana talangan. Itu minta 5 triliun, 10 triliun, Bapak minta ini akan kita akan kita dorong, Pak akan kita perjuangkan, Pak. Karena, ini penting ketika IKM kita, ketika IKM kita tumbuh, berkembang, mereka yang jatuh ini bangun, *In Syaa Allah* ekonomi Indonesia akan bangkit, Pak.

Matur nuwun.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Gitu, Pak Menteri dan Pak Kepala. Itu lulusan Universitas Sydney, Pak. Ya, ada profesornya disini, Pak.

Silakan, itu tadi semua Banggar itu sudah bicara. Pak Mukhtarudin, Bu Mukaromah sama Pak Mufti sudah memberikan semangat untuk memperjuangkan di banggar. Tentu ini akan menjadi semangat kita juga di Komisi untuk dapat anggaran yang bisa kita pergunakan untuk kepentingan pembangunan di negeri ini.

Selanjutnya, Ibu Nevi.

F-PKS (Hj. NEVI ZUARIANA):

Terima kasih, Pimpinan atas waktunya, dan

**Anggota Dewan Komisi VI yang kami hormati,
Bapak Menteri bersama jajaran.**

Dengan waktu yang singkat, mungkin saya membagi antara dua yaitu, pertama untuk Bapak Menteri Pendustrian. Pak Menteri, di tengah wabah seperti ini tadi sudah disampaikan oleh teman-teman bahwa pelaku UMKM itu yang paling terpuak upaya untuk mendapatkan akibat dari pada Covid-19 ini. Bahkan tidak semua UMKM itu berhenti beroperasi, tapi masih ada yang memproduksi. Seperti, industri makanan minuman, masker dan alat kesehatan dan lain sebagainya. Dan kami ingin menanyakan, sejauh mana serapan produk dari UMKM kita oleh Kemenperin di masa pandemi Covid-19 ini dan apa saja bentuk dukungan Kemenperin dalam mempertahankan UMKM kita untuk tetap eksis di tengah pandemi Covid-19 ini.

Begitu yang telah disampaikan oleh teman-teman bahwa memang pelaku UMKM ini nih harus disorot, fokus kita untuk mereka pulih. Pak, kalau di Amerika itu Pak, pelaku UMKM kita sebut yah ini kan mereka bisa sampai 5 miliar ya omsetnya, Pak ya setahun ya di dalam Undang-Undang. Itu pun masih dibeli, masih diberi modal 6 bulan kedepan, y aitu contoh. Jadi, mereka itu tidak hanya butuh perhatian untuk, tadi sudah bapak sampaikan dalam program nilai tambah dan daya saing industri ya. Ada beberapa pengembangan IKM segala macam, tapi mereka harus punya alokasi, bantuan khusus ya Pak Untari kementerian-kementerian yang ada ini untuk hidup 6 bulan ke depan ya. Jadi, tidak hanya mereka mendapatkan relaksasi, segala macam, tapi khusus bantuan yang mungkin bantuan langsung untuk apa, yang mungkin hibah bagaimana. Nah, ini kami harapkan dari Kementerian nya ada perhatiannya untuk supaya mereka eksis di tengah pandemi ini. Tidak Amerika negara maju di bantu, Pak ya. Kita harapkan di negara kita mereka pun juga dibantu.

Kemudian yang kedua, Pak mengenai industri kita tahu bahwa banyak perusahaan atau pabrik asing yang lari ke negara tetangga, Pak. Seperti, Vietnam Malaysia, kita tahu masalahnya seperti apa, masalah tanah kah, masalah pegawai kah. Nah, bagaimana Kemenperin melihat kondisi ini dari sudut pandang kemenperin. Apakah masalah ini bisa diatasi ya dengan anggaran kita ini dan bagaimana keterlibatan nya biar kita mengatasi masalah ini ya. Karena, bagaimanapun dengan adanya perusahaan atau pabrik asing yang lari, berarti kan gelombang PHK semakin besar Pak dan tentu di masa pandemi Covid-19 ini, kita tahu banyak industri-industri yang tutup, pindah negara lain tambah banyak gelombang PHK.

Yang ketiga, Pak. Saya ingin menyinggung masalah kawasan industri, Pak. Jadi, kawasan industri ini sebetulnya bagus Pak untuk setiap daerah ini kita punya kawasan khususnya di Dapil saya Pak ada kawasan industri di Sumatera Barat, sampai sekarang mangkrak Pak, tidak dipakai ya. Ini nggak tahu masalahnya seperti apa, masalahnya tapi tidak ada solusi dari Kementerian Perindustrian. Sayang kan tanah berhektar-hektar dibuang saja tidak dipakai. Nah, kami harapkan dari kemenperin melibatkan ya pemerintah daerah untuk mengembangkan kawasan industri. Ini bagus sekali Pak, supaya kita apa industri kita jadi merata dari Sabang sampai Merauke ya. Bentuk kerja samanya seperti apa dengan Pemerintah Daerah dan khusus Dapil saya Sumatra Barat, tentu kami menginginkan kawasan industri ini akan lebih diperhatikan karena, sudah ada lokasinya. Itu yang ketiga, Pak.

Keempat, Pak bolak-balik lihat, Pak mungkin salah saya. Di *slide* 6 ini untuk pagu indikatif 2021 2,5, tapi di 20 2,4. Mungkin, apa saya salah paham saya, nanti tolong dilihat. Terus juga, di *slide* 22. Menceritakan tentang target pemulihan industri pasca Covid-19 yang dilakukan Kemenperin. Yaitu, adanya substitusi impor, bahan baku, bahan

kelolaan industri. Kami dari PKS, Pak mau minta terkait substitusi impor ini menggunakan, mengutamakan produk yang ada di dalam negeri dan juga peningkatan teknologi industri dalam negeri melibatkan pada riset dan inovasi nasional. Tapi, juga melibatkan ini, Pak universitas Pak, perguruan tinggi. Karena, salah satu tugas pada perguruan tinggi itu membantu ya untuk riset dan inovasi nasional. Sehingga, bisa memproduksi bahan baku sendiri agar impor bisa berkurang.

Yang keenam, Pak di *slide* 24 dan 28, singkat saja Pak. Ya, ini sedang di *slide* tadi saya lihat di *slide* penambahan itu Pak, di *slide* 24 dan 28 ya. Intinya adalah bagaimana anggaran tersebut hanya untuk UMKM lah ya Pak untuk industri kecil dan menengah terkena dampak Covid-19. Jadi, jangan program tersebut jadi proyek-proyek aja Pak ya seperti yang kita sudah lihat beberapa program sebelum ini, yaitu kami tidak menginginkan, tapi kami inginkan program tersebut untuk pelaku industri yang bisa bangkit, yang kembali bisa bangkit terkena dampak Covid-19 di halaman *slide* 24-28.

Lalu, Pak yang masih teman-teman Kemenperin terakhir, apakah harapan kita pada Kemenperin dalam mempertahankan dan melanjutkan industri Indonesia di tengah dampak wabah. Belum tahu sampai kapan akan berakhir. Jadi, kita harus punya kedepan, setahun dua tahun kedepan, Pak ya untuk ya untuk berfikir.

Untuk yang BKPM, Pak. BKPM yang pertama, bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh BKPM pusat terhadap pelaksanaan penanaman modal PMA dan PMDN untuk percepatan pencatatan target investasi. Sejauh mana aktivitas yang dilakukan, jangan sampai anda terjebak penanganan yang sama. Itu yang pertama, Pak.

Yang kedua, OSS Pak. Bagaimana evaluasi pengawasan OSS? Tadi saya setuju sekali bapak sudah menganggarkan setiap kabupaten kota itu ada 200 juta Pak ya, kalau tidak salah Pak ya. Ini tentu kami ingin supaya terealisasi dengan cepat karena, ini bentuk sinkronisasi dinas apa DPM DPM PTSP di daerah-daerah dengan Bapak ya. Jadi, pelaksanaan dengan cepat program realisasi.

Yang ketiga, bagaimana bentuk dukungan BKPM Pusat kepada daerah Pak mengenai penyusunan kajian peluang investasi *feasibility study* untuk meningkatkan peluang investasi di daerah. Jadi, bentuk kerja sama dengan daerah juga, Pak.

Lalu yang keempat, terkait regulasi kebijakan investasi. Seperti apa bentuk dukungan dalam hal sosialisasi kebijakan, penataan kebijakan terhadap pengawasan, terhadap penyusunan dan penataan di daerah agar sinkron antara pusat, provinsi dan kota dengan tidak saling tumpang tindih. Ini penting, Pak ya. Karena, Bapak kan pegawainya di pusat sedangkan sosialisasi adanya di daerah. Jadi, Bapak harus sinkronisasi. Mungkin, satu bentuknya adanya anggaran buat di daerah Pak untuk supaya ada sinkronisasi ini terjadi, begitu. Ya, karena kita tahu di daerah memiliki keterbatasan untuk adanya investasi, adanya investasi untuk di daerah.

Lalu Pak, terakhir. Strategi apa yang dirumuskan terkait pengelolaan investasi nasional agar investor tidak melarikan investasinya ke luar negeri ya. Ya, itu mungkin Pak yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih.

**Wabilahi Taufik Wal Hidayah,
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

KETUA RAPAT:

Ya, terima kasih Bu Nevi. Sedikit, tapi panjang juga akhirnya.

Pak Menteri dan Pak Kepala,

Ini saya perkenalkan Pak Muhammad Rapsel Ali, penggantinya Bu Percha dari Nasdem. Kami Persilakan Pak Rapsel Ali. Itu saya perkenalkan juga, belum saya perkenalkan bahwa ini pengganti dari Bapak Bambang Patijaya, Bapak Kyai Haji Gus Nusron Wahid. Silakan, Pak Rapsel Ali.

F-P.NASDEM (MUHAMMAD RAPSEL ALI):

Terima kasih, Pimpinan.

**Yang saya banggakan, Pimpinan serta rekan-rekan Komisi VI.
Yang saya hormati, Bapak Menteri,
Bapak Kepala BKPM beserta seluruh jajarannya masing-masing.**

Ini pertanyaan bersama dulu. Tadi, Pak Menteri Perindustrian menyebutkan, berkeinginan untuk membentuk atase industri di luar negeri sedangkan, Pak Kepala BKPM menjelaskan sudah memiliki beberapa perwakilan di luar negeri. Kenapa tidak disatukan aja, toh tujuannya sama. Saya kira dengan bersinergi eksekusinya pasti lebih mantap untuk menggaet investor.

Pertanyaan selanjutnya, untuk Pak Menteri Perindustrian. Dalam rangka akselerasi terhadap program-program yang tertunda dan atau bahkan tidak terlaksana sebagai akibat pandemi Covid-19, apa bentuk inovasi yang ditawarkan pada industri agro kimia, farmasi, tekstil, logam, mesin, alat transportasi, elektronika, industri kecil dan menengah, ketahanan wilayah industri, aneka industri internasional untuk mempercepat *recovery* industri nasional.

Pertanyaan untuk BKPM, apa usaha yang dilakukan oleh BKPM dalam menarik minat dan menjaga iklim investasi dalam negeri di tengah pandemi Covid-19. Bagaimana realisasi penyusunan big data investasi yang mengintegrasikan investasi di sektor pertambangan atau *black gold*, sektor pertanian, perkebunan *green gold*, sektor kelautan *blue gold*, maupun pariwisata.

Saya kira demikian, Pimpinan.
Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Rapsel Ali.
Bu Evita.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc):

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

**Bapak menteri perindustrian dan jajaran,
bapak kepala BKPM dan jajaran yang saya hormati.**

Pertama, saya ingin ke Pak Menteri Perindustrian. Mohon maaf, saya tadi terlambat. Namun demikian, materi sudah diberikan kepada kami, Anggota Komisi. Saya sudah sempat baca nih, saya sudah membuat beberapa membuat beberapa catatan. Namun, Pak Menteri memang anggaran kalau dilihat anggaran Perindustrian ini 2,9. Tadi, Bapak Pimpinan mengatakan Banggar Banggar yang diharapkan banyak bicara. Kalau saya melihatnya berbeda, Pak. Kenapa, kita anggaran ini kan harusnya berbasis program bukan program berbasis anggaran. Ini suka melesetnya ini di Kementerian. Itu program berbasiskan anggaran. Artinya, anggarannya gak cukup programnya cuma setengah dijalankan, akhirnya gak tuntas. Jadi, kalau membuat anggaran tentunya program-program yang akan diajukan itu harus matang dulu dan kita akan tau *end result*nya itu akan tercapai begitu. Jadi, saya masuk kepada program dalam hal ini kalau teman-teman Banggar masuk kepada anggaran, maka saya masuk kepada program.

Saya melihat memang anggaran yang diberikan kepada Departemen Perindustrian itu boleh dibilang sangat kecil, tidak sebanding dengan tanggung jawab yang diberikan kepada Departemen itu sendiri, apalagi pasca apa pandemik ini ke depan. Namun demikian, ya harus pinter-pinter ya Pak Menteri Ya gimana caranya melakukan kolaborasi dengan Kementerian lain maupun dengan pengusaha BUMN kita, maupun pengusaha swasta kita.

Namun, di anggaran Pak Menteri, Pak Menteri ada menganggarkan cukup banyak. 740 M, Pak itu untuk edukasi, untuk peningkatan SDM. Saya sepakat disini, namun karena saya rasa memang semua Kementerian maupun badan harusnya dalam membuat postur anggarannya 2021 itu harus dan wajib mengacu kepada lima program utama Bapak Jokowi-Ma'ruf Amin. Kenapa, karena jangan presiden punya visi misi 1, menteri melenceng ke mana-mana gitu. Jadi, lima program kerja Pak Jokowi-Ma'ruf Amin, prioritas utama beliau itu adalah membangun SDM kita. Itu ada dasarnya, tidak mungkin tidak ada dasarnya.

Tadi, Bapak menyinggung dua-duanya Pak Menteri *streaming* juga di media saya lihat, kepala BKPM tadi menyinggung akan merealokasi ya kan, yang namanya investasi karena pertikaian beberapa negara perang dagang dan lain-lain, merealokasikan ke Indonesia. Pertanyaan saya Pak sekarang ini, sama dengan saya ajukan kepada Menteri BUMN kemarin, kenapa sih mereka tetap nggak minat? Kenapa mereka tetap ke Vietnam? Itu kan yang menjadi pertanyaan kita. Katanya berinvestasi di Indonesia itu murah, upahnya murah. Kenapa kita nggak dikejar oleh investor itu kalau memang upahnya murah. Kalau Bapak baca jurnal internasional, produktivitas kita punya pekerja buruh itu kecil, kalau satu buruh di Malaysia, di Singapur itu bisa memproduksi 150, kita itu hanya 30. Jadi, investor asing itu tidak semata-mata melihat kepada murahnya harga buruh, ya kan. Padahal, produktivitas daripada Vietnam itu kalau Bapak baca itu dibawa kita. Kita 30 kan, dia 25-an dibawah kita, Pak. Kenapa mereka melakukan realokasi investasinya ke Vietnam, karena kebijakannya Pak. Kebijakan yang dibuat oleh Vietnam

itu terhadap investor. Mereka benar-benar menarik investor banyak, kemudahan-kemudahan yang diberikan. Nah, ini menjadi bahan evaluasi kita, Pak ya kan Indonesia ya kan. Apa nih, kalau negara lain itu mereka juga buruhnya murah ya kan, nggak murah tetapi tetap diminati apanya yang membuat dia minus. Ini meng evaluasi kita juga, Pak. Jadi, memang di sini Pak Jokowi itu melihat bahwa kita membutuhkan prioritas utama itu membangun SDM kita, Pak. Itu yang paling penting.

Jadi, anggarannya saya setuju Pak Menteri Perindustrian, itu menganggarkan hanya kita pingin tahu programnya ini dalam bentuk apa. Apa yang bisa disinergikan dengan Komisi VI, apa di dalam program-program yang ada kaitannya dengan pendidikan ini. Karena, kita punya *link* Pak di daerah, kita punya konstituen di daerah Pak yang sebenarnya mudah bagi Bapak untuk mendapatkan UKM atau IKM yang bisa untuk dilakukan latihan latihan pekerjaan ini.

Kemudian, saya juga minta kepada Menteri Pendustrian, hal-hal yang kita bicarakan sebelumnya Pak, itu adalah bagaimana memperbaiki *roadmap* kita, Pak. Kita tahu tadi disampaikan oleh teman sebelumnya, pasca pandemik ini kita melek bahwa ketahanan industri kita sangat lemah, kita melek, Pak. Jadi, kita bisa melihat apa kelebihan, kekuatan kita, apa kelemahan kita. Nah, kita harus melakukan perubahan Pak di dalam *roadmap* kita ke depan. Kita tahu kelemahan utama kita adalah kita tidak memiliki bahan baku. Itu kelemahan kita.

Maaf, Pak saya katakan sekarang ini kita begitu bangga. Kita sudah memproduksi rapid test, kita sudah memproduksi ventilator, ya kita hargai itu, kita apresiasi. Tapi, kalau saya katakan Pak, kita jangan cuman *mem built up* mobil itu, kita jangan rakit komputer saja, semua yang dirakit semua yang dipakai itu import semua Pak 90%. Kita hanya merakit di sini.

Nah, ini yang kita lihat ke depan bahwa industri bahan baku itu sangat dibutuhkan oleh Indonesia, Pak sehingga, ketika kita ditempa oleh atau pun apa pun, kita itu kita itu sudah siap, kita tidak tergantung dengan import, Pak. Bagaimana Pak Menteri ini apakah itu nanti swasta, saya rasa Ke BUMN ya Pak ya, bagaimana industri strategis BUMN ini bisa kita ajak, kita tarik untuk membangun yang namanya industri bahan baku ke depan, Pak.

Jadi, kemudian 5 programnya Pak Jokowi itu kan sudah jelas untuk 2 2 2 apa namanya, mitra di depan ya. Infrastruktur setelah itu infrastruktur kan sudah jalan kalau saya lihat itu, infrastruktur.

Ini satu lagi adanya penyederhanaan regulasi. Nah, apa yang sudah Bapak buat nih di Departemen Bapak maupun ini. Penyederhanaan regulasi seperti apa. Kemudian, penyederhanaan birokrasi seperti apa yang sudah dilakukan. Karena, ini harus tergambarkan di postur anggaran 2021 ke depan, Pak. Ini sekarang kalau saya lihat penyederhanaan regulasi, ada Undang-Undang Cipta Kerja. Apa nih yang Bapak-bapak sudah ikut di dalam sini.

Kalau saya lihat kemarin ini kita diundang oleh Baleg Poksi enam saya itu untuk Undang-Undang Cipta Kerja yang ada kaitannya dengan mitra Komisi VI. Saya melihat ini kok masih ada perbedaan UMKM dan IKM. Saya bertanya ke temen-temen Komisi XI. Kenapa sih dibedakan UMKM dan IKM, dampaknya apa. Perpu kita selalu *me-rever* kepada UMKM, tidak kepada IKM. Yang disampaikan teman kita Mufti tadi akhirnya, IKM kita nggak dapat bantuan relaksasi apapun karena dibedakan antara UMKM dan IKM. Kriteria UMKM dan kriteria IKM itu jauh berbeda. Apa yang namanya mikro di di IKM,

mikro di UMKM itu beda semua. Baik jumlah pegawainya, maupun jumlah investasinya. Saya rasa ini enggak benar, Pak Menteri. Ketika kita ada Undang-Undang Cipta Kerja ke depan, ini wajib kita satukan persepsi UMKM dan IKM. Saya tanya kepada teman-teman Baleg, kenapa sih ini kok dibedain UMKM dan IKM. Katanya, Menteriya nggak setuju untuk digabungkan, mungkin bukan Menteri yang sekarang ya, Menteri yang sebelumnya. Dari dulu, itu Menteri itu tidak pernah setuju kalau IKM itu disamakan dengan UMKM. Nah saya mungkin, ini bingung Pak ya, saya kalau baca Pak, kalau cari, saya suruh staf saya mencari huh beda banget yang namanya persepsi UMKM di Kementerian Koperasi dan UMKM dan di BUMN, beda sekali dengan yang namanya persepsi IKM di Kementerian Perindustrian. Nah, ini mungkin kita bisa melihat ke depan nantinya, Pak.

Kemudian, kita lihat bahwa ke depan ini industri, itu memang tadi peningkatan SDM ya Pak ya. Tapi, kalau tidak bisa meng*adapt* yang namanya teknologi, *forget it*. Jadi, kalau kita mau punya ketahanan, ketahanan industri ya teknologi 4.0. Jadi memang, Menteri Perindustrian harus fokus ya kan meningkatkan produktivitas dengan membangun SDM dan bagaimana meng*adapt* kita punya industri ini semuanya berbasis teknologi, Pak. Ini yang menjadi fokus saya harapan daripada Kementerian Perindustrian ke depan.

Kepada Pak BKPM, saya bingung ngomongnya juga nih, Pak. Bapak dari awal sampai akhir komplain mulu gitu, mengeluh terus gitu ya kan ini ini anggaran. Apa namanya memang saya lihat anggaran Bapak sangat kecil ya kan. Tapi, ngeluhnya enggak di sini, Pak ke Menteri Keuangan. Kalau Bapak bisa berargumentasi yang bagus kepada Kementerian Keuangan, seharusnya bisa. Masalahnya, staf-staf Bapak mungkin atau siapa kalau membuat anggaran itu selalu *business as usual*. Anggaran tahun lalu dinaikkan 10%, anggaran tahun lalu dinaikkan 10%. Programnya ini enggak ada yang inovasi baru begitu, Pak. Ya, kalau saya jadi Menteri Keuangan, saya mendengar ada inovasi baru tapi memang yang namanya teknologi mahal di depan, *maintenancenya* lebih kecil ya kan Pak ya. Saya mau Pak, bagaimana kita berargumentasi kepada Kementerian Keuangan di dalam memilih ini. Dan jadi kita datang ke Komisi VI tidak dengan permasalahan, tapi dengan solusi. Bapak datang nih, kita punya masalah ini. Saya punya solusi, nah begitu yang saya harapkan Pak Bahlil saya harapkan datang ke Komisi VI. Apa solusi Bapak atas permasalahan-permasalahan yang Bapak hadapi tadi. Saya selalu mengatakan Dubes-dubes kita waktu saya di Komisi I, komplain ke **..(suara tidak jelas)..** Pimpinan saya, komplain terus dengan anggaran yang ada. Kalau *you* melakukan *business as usual*, selalu menunggu bola tidak menyambut bola pasti akan kesulitan, saya bilang begitu. Itu anggaran itu banyak, mau bikin kegiatan **..(suara terputus-putus)** siapa pengusaha-pengusaha kita yang ekspor, diajak pengusaha swasta itu untuk membiayai kegiatan yang ada.

Daerah itu, Pak Tadi ada yang mengatakan itu teman bahwa daerah itu anggarannya kecil, saya kurang setuju mungkin di daerah itu kecil. Anggaran di daerah ini besar Pak sampai kadang-kadang daerah ini tidak tahu, anggarannya ini mau dikemanakan, ya kan. Apalagi ketika kita sebut dengan promosi investasi, pariwisata misalnya, Pak. Ini mereka jalan sendiri-sendiri Pak sekarang ini. Jadi, bingung dubes kita itu disana, Pak. Minggu ini yang datang Kabupaten misalnya Provinsi Jawa Timur, bulan depan yang datang Jawa Tengah, belum sampai ke bupati nya. Itu mereka musti mengumpulkan yang namanya masyarakat disana untuk menonton pertunjukan seni.

Jadi, tidak ada sinergisitas dan integrase. Jadi, kalau bapak bisa saya juga bingung udah berpuluh ini, BKPN ini kan masih belum mempunyai peta potensi investasi daerah. Ini apa-apaan gitu, ngapa-ngapain aja Kepala BKPM sebelumnya. Itu menjadi pertanyaan saya. Soalnya saya tahu, yang namanya peta investasi setiap kepala daerah itu punya. Kalau kita ngadain pameran, semua daerah itu selalu memamerkan potensi daerahnya masing-masing. Jadi, tidak mungkin yang namanya kepala daerah itu tidak punya peta. Jadi, bagaimana kita mensinergikan, mengintegrasikan informasi yang ada, itu yang penting, itu nggak perlu uang Pak, menurut saya ya Pak ya.

Jadi, saya harapan juga bapak berat sekali tugas Bapak di dalam pandemik pasca pandemik. Karena, ketika dikatakan saya baca program pemulihan ekonomi nasional banyak sekali, *forget it* Pak. Ketika, kita ketika kita gak bisa menarik investasi asing, Pak ke Indonesia yang tak mungkin bisa, yang utamanya adalah menarik investasi asing ke Indonesia. Tugas Bapak beratnya saya katakan dengan anggaran yang kecil. Tapi, saya berharap Bapak melakukan inovasi. Ajak nih swasta-swasta melakukan promosi ke luar negeri. Digandeng mereka, Pak tidak perlu BUMN-BUMN, duitnya banyak yang ada punya banyak, Pak Bapak gandeng. Jadi, kalau dikatakan bapak itu mengkoordinasikan, Bapak nggak punya anggaran tapi, Bapak mampu mengkoordinasikan BUMN yang punya, swasta yang punya anggaran. Yuk, bareng-bareng kita melakukan promosi ke luar negeri. Itu yang sebenarnya diharapkan oleh Bapak Presiden gitu ya kan, harus inovatif dan harus kreatif.

Saya rasa demikian, Bapak Pimpinan.
Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Iya, jadi jelas pesannya. Biar pesannya yang tersirat. Bapak menteri juga tahu itu kebatinannya. Karena, beliau 15 tahun dikita dan gayung bersambut apa gayung bersambut di kita tentang pesan-pesan Ibu itu. Ya, semua itu adalah penguatan bagi Pak Menteri dan Pak kepala BKPM. Karena, saya liat walaupun agak kritis, tapi konstruktif saya lihat, masih dalam pola-pola konstruktif.

Selanjutnya, kita ke kanan. Daeng.

F-PAN (DAENG MUHAMMAD, SE, M.Si):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua.

Makasih, Pimpinan atas waktunya. Terima kasih.

**Bapak Menteri Pendustrian,
Bapak Kepala BKPM, dan**

Seluruh jajaran yang hadir di sini.

Kita tahu dengan adanya pandemi Covid-19 ini merubah semua negara dari dan hampir semua negara mengalami hal ini dan bukan hanya di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia. Jadi, saya yakin dengan bersama-sama kita bergotong-royong kita bisa mengatasi Corona bersama-sama. Apalagi setelah tadi di jabarkan tentang anggarannya di Kementerian Perindustrian dan BKPM. Saya jujur, saya sedih ada pemotongan ini. Tapi, kita harus bisa optimis, Pak. Karena, dengan optimis saya yakin kita bisa mencari solusinya. Apalagi dengan tadi dengan Ibu Evita katakan. Bapak harus bisa kreatif, bisa mencari apa saja yang bisa dikembangkan di sini.

Ada beberapa *issue* yang ingin saya tanyakan sini kepada Kementerian Perindustrian dan Kepala BKPM. Saya harapkan nantinya dengan adanya anggaran yang baru ini, semua bisa mengakomodir. Artinya, semua UMKM dan IKM bisa terkena dampaknya. Jangan sampai, kita banyak Pak dihubungkan konstituen kita di dapil, oh ini kenapa kita nggak ada perhatian dari pemerintah? Apakah salah sasaran atau kenapa?. Jadi, saya harapkan Kementerian Perindustrian bisa memetakan mana mana saja. Saya yakin ini semua berdampak, terkena dampaknya. Tapi, pasti kita punya prioritas, mana yang harus kita dahulukan dan mana yang nanti kita laksanakan.

Dan di Kementerian BKPM, saya juga ada beberapa aduan, Pak dari teman saya terkait dari pengurusan perizinan. Dikatakan bahwa pengurusan perizinan pada suatu sesi dibutuhkan, harusnya itu terintegrasi antara OSS dan kantor pajak. Tapi. Kenyataannya tidak. Jadi, mereka harus ngurus sendiri di BKPM dan di pajak tidak keluar NPWP nya. Beda sama pengurusan di NPWP di PT, Pak yang langsung terkoneksi. Saya harapkan nantinya ini bisa diubah. Jadi, tidak susah dalam pengurusan CV.

Terus, terkait juga Pak Kepala BKPM katakan yang nantinya, akan ada perluasan positif *list* investasi. Saya ingin tanyakan ini apa positif *list* investasi. Apakah ini artinya nanti bakalan dibuka selebar-lebarnya bagi bagi asing untuk bisa investasi di Indonesia. Apakah ini malah menjadi suatu ancaman bagi Pemerintah dan bagi masyarakat. Artinya, bakalan berkurang ..(***suara terputus***) yang ada di Indonesia.

Itu saja dari saya.

Terima kasih Pimpinan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam.

Silakan, Bu Elly. Sebelum, Bu Elly saya perpanjang dulu setengah jam ya. Jadi, jam 12.

(RAPAT:SETUJU)

Kalau bisa ditepati 3 menit 3 menit, bisa cepat ini dan lebih lebih cepat dari jam 12 kita selesai. Terima kasih.

F-PPP (ELLY RACHMAT YASIN):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Yang saya hormati para Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VI, juga
Yang saya hormati Bapak Menteri Perindustrian beserta jajaran,
Menteri BKPM beserta jajaran.**

Mungkin yang pertama, saya akan sampaikan kepada Menteri Perindustrian. Tadi, dalam pemaparan di halaman 6, kalau tidak salah ya. Saya ingin memberikan apresiasi karena anggaran untuk penguatan sumber daya manusia industri lebih besar dibandingkan dengan yang lain.

Pertanyaannya apakah postur anggaran Kementerian Perindustrian untuk RKAKL 2021 ini sudah menggambarkan berbagai kebutuhan penyiapan sumber daya manusia industri era 4.0, yang diharapkan karena setelah saya baca dari rincian program halaman 7 sampai 19, hanya sebagian kecil nama program yang menyebutkan industri 4.0.

Lalu yang kedua, dalam masa pandemi Covid-19 ini, semua industri di berbagai bidang terkena dampaknya khususnya IKM. Saya mengapresiasi Kementerian Perindustrian dalam mengembalikan kepercayaan dari para IKM untuk memulai kembali usaha mereka melalui pelatihan marketing *online* dari *market place* yang ada di Indonesia. Untuk tahun 2021, bagaimana keberlangsungan program seperti itu. Apakah terus berlanjut atau hanya sampai saat ini saja.

Yang ketiga, saya sangat sepakat dengan teman-teman yang memberikan, teman-teman yang tadi disampaikan oleh Ibu Siti dan Ibu Pak Mufti dan sebagainya, untuk memberikan prioritas kepada IKM. Jadi, bagi sektor industri kecil menengah hendaknya ada program pengembangan wirausaha IKM terutama untuk korban PHK dengan melakukan fasilitasi pemenuhan bahan baku dan bahan penolong serta inkubator bisnis untuk pembentukan wirausaha baru IKM. Sejauhmana Kementerian Perindustrian ini dengan RKA RKP tahun 2001. Mungkin, itu untuk Perindustrian tidak banyak.

Selanjutnya, untuk BKPM bisa dilanjutkan Pak Menterinya nggak ada mungkin ya. Jadi, BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang triwulan pertama 2020 mencapai 210,7 triliun. **..(suara terputus-putus)** sepanjang periode sepanjang Januari-Maret 2019, PMA pada periode Januari-Maret 2020 turun 9,2% menjadi 98,3 triliun dari 107,9 triliun. Sementara, penanaman modal dalam negeri naik 29,3% dari sebelumnya 87,2 triliun menjadi 112,7 triliun. Dari angka tersebut dapat dilihat salah satu faktor pendorongnya, penurunan PMA efek pandemi Covid-19. Namun, ada kenaikan dari investor dalam negeri. Jadi, bagaimana upaya dan kiat BKPM dalam menjaga kepercayaan investor dalam negeri dan bagaimana presi di tahun 2021.

Yang kedua, salah satu amanat presiden kepada Kepala BKPM adalah meningkatkan ranking Indonesia ke urutan 50 dalam kemudahan melakukan usaha. Tent,u hal ini akan menghadapi banyak tantangannya. Hal yang dapat dilakukan pada

tahun 2021 seperti mengembalikan sepenuhnya kewenangan perizinan BKPM. Lalu, bagaimana perkembangan dari proses perizinan tersebut.

Saya mengapresiasi proses cepat hanya 3 jam untuk mendapatkan nomor induk berusaha atau NIB dan proses *Online Single Submission* atau OSS. Tapi, perlambatan proses dimulai ketika kepada perizinannya di kementerian lembaga atau daerah. Jadi, saya mohon tanggapannya seperti apa.

Yang ketiga, lesunya penanaman modal sebenarnya bukan kali ini saja. Di akhir tahun 2019 demi menggaet investor, pemerintah memberikan insentif pengurangan pajak penghasilan atau PPH, peraturan yang tertuang dalam PP Nomor 78 Tahun 2019 tentang asilitas PPH untuk penanaman modal di bidang usaha tentunya, tertentu dan di daerah tertentu tentu diharapkan menjadi daya tarik bagi investor. Di dalamnya mengatur tentang penambahan jumlah usaha yang berhak menerima fasilitas diskon pajak pemerintah. Pemerintah terkesan obral pajak, tapi diyakini efektif menggaet investor.

Sejak diluncurkan tahun 2017 hingga November 2019, keringanan pajak diberikan atas 158 kegiatan dan dinikmati oleh 140 perusahaan serta berhasil menggaet investasi sebesar 300 triliun. Yang menjadi pertanyaan, selain memberlakukan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau OSS, apakah pemerintah akan kembali obral pajak, memperbanyak intensif pajak pada investor.

Mungkin, hanya itu saja.

Terima kasih atas perhatiannya.

Billahi Taufik Wal Hidayah.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Iya, terima kasih Bu Elly.

Pak Bardi, silakan.

F-P.NASDEM (H. SUBARDI, S.H., M.H.):

Baik, terima kasih.

**Pimpinan yang saya hormati,
Pak Menteri Perindustrian, dengan
Kepala BKPM dengan jajarannya.**

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Pertama, kepada Pak Menteri Perindustrian. Tadi, paparannya cukup menarik dengan penambahan permintaan anggaran yang kurang lebih 1 triliun dari 3,4 berapa eh dari 2,4 berapa pagunya menjadi 3 koma.

KETUA RAPAT:

Pak Bardi agak dideketin, Pak *mic* nya, Pak.

F-P.NASDEM (H. SUBARDI, S.H., M.H.):

Pas ya. Baik. karena ada palang ini nggak kesana.

Baik, saya lanjutkan. Jadi, dari paparan Pak Menteri Perindustrian tentang permintaan penambahan anggaran. Ya tentunya, beberapa strategi di mana anggaran dari 2,4 berapa menjadi 3,4. Sebenarnya, hanya minta tambah satu triliun. Sebenarnya, nggak terlalu mahal bagi sebuah Kementerian yang memikul beban industri di nasional ini.

Yang tentunya, penambahan industri ini disampaikan untuk mem-*backup* 4 butir-butir yang telah atau 4 strategi yang tepat disampaikan tadi. Saya nggak sebut satu satu ya, empat terus yang disampaikan. Nah, tentunya ini semua adalah dalam rangka menormalkan kembali kegiatan-kegiatan, program-program yang karena Covid-19 ini, baik itu proses *new normal* sampai ke normal kembali, kira-kira begitu kira-kira. Nah, kemudian dari memulihkan kembali dengan tambahan anggaran ini. Apakah program-program yang dulunya sebelum belum Covid ini belum Covid itu terjadi itu akan kembali dan yang perlu kita apa lihat adalah pemulihan yg tidak bisa serta-merta dari tahun 2020 menjadi 2021 langsung pulih, tentu tidak. Tentunya, melalui suatu proses yang cukup panjang, 2 atau 3 tahun.

Pertanyaan saya untuk satu ini, Pak dengan penambahan anggaran ini, sejauhmana indicator untuk pemulihan kembali pada industri kita yang terpuruk, yang dirasakan khususnya di UMKM ya, di bawah IKM, di bawah itu sungguh luar biasa. Kalau dari pada kegiatan ataupun penambahan ini tanpa ada inovasi-inovasi baru, adanya kreativitas kreatif baru, saya kira agak susah untuk kita pulih kembali seperti semula. Apalagi untuk kita bisa bangkit itu agak susah.

Nah, dalam perkembangan yang kemarin kami lihat di, kebetulan kami di daerah itu cukup lama kemarin dengan adanya Covid ini. Masyarakat kita khususnya di IKM dan UMKM itu punya kreativitas yang tinggi sebenarnya. Dimana kreativitas itu tumbuh, muncul karena keterbatasan dan karena keterpaksaan. Dia butuh hidup, maka perlu inovasi, perlu tumbuh inovasi. Sehingga, untuk member mempertahankan hidup dia. Nah, oleh karena itu, apakah Kementerian Perindustrian itu dengan keterbatasan anggaran mampu tidak seperti yang dilakukan oleh masyarakat, yang dalam hal dalam mempertahankan hidupnya, kesederhanaannya dan sebagian yang mampu hidup dalam Covid-19 ini. Nah inilah, tentunya ke depan ketika dari Kementerian Keuangan atau dari pemerintah itu nanti keputusannya anggaran bukan 1 triliun atau berapa, apa yang akan anda lakukan dalam pada yaitu, pada masalah inovasi dan kreativitas dari pada Kementerian Perindustrian. Itu yang pertama.

Yang kedua, apakah dari postur anggaran ini sudah adanya program akselerasi program-program yang tertunda dari anggaran kemarin yang terpotong. Apakah itu udah masuk ke sini, apakah yang terpotong kemarin hilang. Nah, kami mau dijelaskan. Karena, dari kepotongan yang cukup besar kalau tidak salah di tahun 2019 eh 2020 kemarin, potongannya cukup cukup besar untuk Kementerian Perindustrian.

Nah, salah satu yang kami alami di daerah yang itu kemarin ada program, itu apa pelatihan yang masing-masing kelompok 20 orang, itu yang cukup cukup bisa menyentuh

masalah. Ada pelatihan, setiap kelompok 20 orang dalam meningkatkan kehidupannya, tapi tertunda tinggal menyelenggarakan karena kena Covid, adanya aturan Covid, maka berhenti. Padahal, 20 orang kan bisa diselenggarakan dengan protokol Kesehatan. Nah, apakah program-program tersebut dalam 2000 dalam tahun 2020 terputus, terpotong, apakah itu di anggarkan tahun berikutnya, apakah ditiadakan, apakah juga diadakan di dalam tahun 2020 setelah melakukan pelatihan tersebut dengan protokol kesehatan tentunya, 20 orang kan tidak terlalu sulit ya dalam satu ruangan agak luas, jaraknya dan sebagainya. Tertib dalam disiplin protocol Kesehatan, saya kira tidak menjadi masalah. Nah, mohon hal ini secara garis besar dan secara detail dijelaskan bagaimana program-program yang terpotong ini apakah sudah *tercover* di dalam postur anggaran, postur anggaran yang apa namanya di tahun 2021 besok.

Berikutnya, dengan kepala BKPM. Paparan cukup menarik ya, bahwa gambaran kita akan hidup investasi yang apa namanya daya tarik ataupun menarik pada investor, luar biasa. Tapi, perlu sampaikan Pak Kepala BKPM bahwa di daerah, di masing-masing kabupaten kota yang namanya proses investasi atau perijinan atau birokrasi 2 perijinan, di di di lapangan di bawah, di Kabupaten, di Kabupaten Kota itu, itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Masih melekatnya birokrasi yang sulit dan pelayanan yang tidak ramah, pelayanan yang tidak bagus atau pelayanan yang lama sehingga, membuat investor itu, satu mengeluarkan *cost* tinggi. Yang kedua, memakan waktu yang panjang, sehingga momentum yang mereka mestinnya didapat diraih itu hilang.

Nah, tadi menarik sekali ketika BKPM mendapat payung hukum untuk melakukan monitoring, untuk melakukan tindakan daripada Pemerintah Daerah yang mungkin ibaratnya menjadi polisi, polisi BKPM, polisi investor lah investasi. Nah, Mekanisme seperti apa yang bisa diterapkan sehingga, menjadi efektif untuk kepentingan masyarakat industri, untuk kepentingan masa masa investasi yang ada di daerah, sehingga penegakan daripada disiplin, penegakan hukum apa pelayanan yang yang cukup cepat, sehingga investasi bisa tumbuh dengan cepat, pemulihan ekonomi bisa segera terselenggara. Ini seperti apa mekanismenya. Mohon, nanti dapat dijelaskan.

Dan saya kira tadi, cuma anggota memberikan respon, yang penting kerjanya ketika investasi ada di bawah itu tumbuh untuk masalah dana otomatis juga akan tumbuh sebagaimana mestinya.

Itu aja, terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Injeh ngarso luar. Kalau di Jogja ini ada *ngarso dalem*, Pak bardi ini *ngarso luar*.

Silakan, Pak Amin.

F-P.NASDEM (Drs. H. NYAT KADIR):

Ketua, Ketua. Daftar Ketua.

KETUA RAPAT:

Oh, ya.

F-P.NASDEM (Drs. H. NYAT KADIR):

Daftar, Ketua.

KETUA RAPAT:

Sudah sudah sudah, sudah di daftar Pak Nyat Kadir. Sudah di daftar.

F-PKS (AMIN AK, M.M.):

Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Sebagian tadi sudah ditanyakan oleh teman-teman. Oh ya, karena oh ya Pak Menteri sudah masuk lagi. Pak Kepala BKPM, orang muda yang cerdas, sukses duluan dan selalu ceria selalu menghibur kalau bicara. Gini, Pak. Sebetulnya, enggak beda-beda jauh ya, tapi saya akan menyoroti secara khusus masalah perizinan untuk UMKM ini loh, Pak. Bapak mengepalai badan yang tadi di plesetin bolak balik oleh Pak Ketua ini. Tapi, enggak saya ulangi, enggak saya ulangi. Bagaimana ada perlakuan khusus gitu loh, baik dari sisi biaya tuh baik dari sisi prosedur itu. Karena, jumlahnya yang segitu banyak kan kalau enggak salah sampai 64 juta, bahkan menyedot angkatan kerja sampai 97% sehingga, perlu kemudahan-kemudahan yang khusus. Kenapa perlu kemudahan-kemudahan, perlu melakukan perlakuan khusus. Ya, rata-rata mereka map dari sisi kapasitas keilmuan, wawasan, kemudian dari mentalitas, berhubungan dengan birokrasi itu mereka juga ada ada penelitian psikologis gitu loh, Pak. Itu keluhan-keluhan yang sering muncul gitu.

Jadi, mau urus ke sana tuh juga mikirnya banyak, terus ada rasa takut, ada rasa belum belum jalan itu udah merasa sulit duluan ya. Sehingga, sampai ini perlu perlakuan khusus, Pak. Tadi terkait dengan jumlahnya yang begitu besar dan juga angkatan kerja yang juga begitu besar. Sebagaimana, kebetulan kami juga di Baleg ini menyarankan untuk apa sertifikasi halal untuk produk-produk UMKM itu jangan seperti seperti selama ini, Pak terlalu mahal gitu. Orang jual empek-empek apa, beda bentuk itu butuh sertifikasi tersendiri, Pak. Yang lonjong, yang bulat, yang kapal selam, itu sendiri-sendiri, Pak. Banyak padahal semuanya, cuma bentuknya beda itu. Itu luar biasa semua ini. Ya, kita nuntut cukup ini lah apa *soft declare* saja, yang mengakui ini begini, banyak ini dan disaksikan oleh ormas atau agama gitu, sehingga mudah. Ini memudahkan untuk menumbuhkan UMKM yang memang menjadi pondasi ekonomi kita harus diakui itu. Itu aja mungkin untuk Pak BKPM. Sebelum ini saya sudah tanya sangat banyak dan terima kasih atas jawaban-jawabannya atas raker-raker yang lalu.

Kemudian, untuk Pak Menteri Perindustrian. Ini kembali terkait dengan penambahan anggaran, Pak halaman 24 sebesar 3,428 T. Saya enggak bicara soal besar atau kecil, tapi saya sepakat sekali dengan apa yang dikatakan Bu Evita. Ini kan semoga

ini berbasis program dan Bapak tadi bilang nggak akan memaparkan, saya yakin Bapak juga sudah siap dan juga kami nggak perlu, nggak perlu pemaparan itu. Tapi, kami minta komitmen Pak bahwa anggaran sebesar itu, tentu porsi terbesarnya itu untuk penanganan apa namanya pelaku-pelaku usaha yang lagi-lagi khususnya UMKM lah IKM lah, saya nggak mempermasalahkannya itu. Ya, porsi terbesarnya untuk itu ya. Bahwa pengusaha besar juga banyak yang kepayahan, banyak yang harus menanggung rugi, itu iya gitu. Tapi kan, mereka masih punya *saving* ya, masih hidup bisa tidur enak ya, jumlah mereka juga nggak banyak gitu loh. Tapi, ini pengusaha-pengusaha kecil, ini mereka ini berhadapan dengan kebutuhan pokok gitu loh Pak dan terbukti juga selama ini menjadi menjadi penyokong pertumbuhan ekonomi nasional. Itu Pak, jadi minta komitmen untuk itu.

Yang kedua, pandemi Covid-19 ini. Ini kan membuka juga kondisi ketahanan dunia usaha kita Pak ya. Tadi, sudah dipaparkan oleh beberapa teman, tapi pada saat ini saya menyampaikan, menyoroti khusus Pak. Ini tentang kebutuhan atau pemenuhan kebutuhan masker dan alat pelindung diri. Ternyata kan juga masih banyak ya konsumen atau rumah sakit ya. Rumah sakit, dokter, puskesmas, klinik ya yang mau tidak mau terpaksa menggunakan masker impor dan mayoritas yang saya baca di media ini dari Cina yang harganya juga relatif mahal. Padahal, ya padahal produsen masker dalam negeri asosiasi-asosiasi pengusaha kecil dalam negeri itu sudah mampu memproduksi masker dalam jumlah yang cukup besar dan kualitas yang tidak kalah dengan masker impor bahkan dengan harga yang lebih murah.

Mungkin, Bapak membaca di artikel di media *online*, hari Sabtu tanggal 20 Juni yang lalu. Judulnya, ironi APD itu yang ditulis oleh ketua tim pakar gugus tugas percepatan penanganan Covid-19. Ya, bagaimana dia merasakan prihatin karena ya memang diawali dari minimnya stok masker itu, stock apa APD ya. Kemudian dengan segala cara dia mengkonsolidasikan, menghimpun para pakar termasuk melibatkan pakar dari Kemenperin melakukan seminar dan sebagainya, akhirnya singkat kata mampu memproduksi ya masker yang berkualitas itu, melibatkan asosiasi pengusaha tekstil dan sebagainya. Bahkan sampai harus diharuskan sertifikasi ISO yang di *claim* oleh WHO ISO 16604 diikuti dan akhirnya lolos dan mampu memproduksi 17 juta masker apa IT riset dalam satu bulan, tapi ternyata terakhir terkendala pemasaran. Sehingga, produsen-produsen mesin-mesin yang sudah disiapkan produsen-produsen yang siap, siap untuk melakukan usaha itu, semuanya lemas Pak lemas dan foto salah saya semua. Nah, ini minta komitmen ya atau tanyakan bagaimana peran Kemenperin untuk membina ya usaha-usaha seperti ini. Bahkan secara teknis, secara skill mereka memang sudah mampu sebetulnya ya membina dan fasilitasi, Pak sehingga, pengusaha-pengusaha ini tumbuh dan berkembang. Karena, kita tidak hanya berpikir. Pertama, kita tidak tahu kapan Covid ini akan berakhir. Yang kedua, tentu mereka kita bina bukan hanya karena adanya Covid ini, tapi untuk ke depan tetapkan masyarakat kita membutuhkan masker dan wabail khusus membutuhkan APD juga.

Saya kira pertanyaan saya dua itu saja, Pak Pimpinan.
Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kita udah hampir jam 12 ini. Kalau bisa teman-teman dipersingkat sedikit. Silahkan, di kanan Pak Lamhot Sinaga. Masih sisa, satu dua tiga.

F-PG (LAMHOT SINAGA):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Bapak Ibu Pimpinan dan Anggota,
Menteri Perindustrian dan Kepala BKPM dan seluruh jajaran yang saya hormati.**

Pertama, untuk BKPM saya lihat tadi apresiasi untuk pemaparannya. Namun, ada satu hal, Pak Bahlil yang selama ini saya bikin agak sedikit galau juga ini ya. Semangat yang saya tangkap itu Kepala BKPM memang cukup bagus, tapi korelasi antara serapan tenaga kerja dengan pertumbuhan investasi kita. Ini yang memang tantangan yang sangat berat kita hadapi, apalagi dengan situasi saat pandemi Covid-19 saat ini ya. Data 2010 setiap investasi masuk 1 triliun serapannya adalah 5.000, tahun 2015 sarapannya per 1 triliun adalah 3.000, terakhir tahun 2018 data terakhir itu adalah serapannya setiap 1 triliun itu adalah 2.200. Artinya, serapan tenaga kerja dalam investasi itu semakin ke belakang semakin kesini itu adalah semakin menurun, begitu ya Pak Kepala BKPM. Nah, saya membayangkan kalau misalnya komitmen realisasi, komitmen investasi yang ada sekarang seperti yang dikatakan tadi 700 triliun, kalau memang mengacu data bahwa setiap 1 triliun itu bisa menyerap hanya 2.200, maka yang bisa diserap itu adalah hanya 1.400.000 ya 1.400.000, kalo itu pun kita asumsi kalau misalnya komitmen realisasi investasi itu bisa berjalan mulus dan lancar semua 700 triliun tersebut. Maka, sarapannya adalah hanya maksimum diangka 1.400.000.

Fakta juga hari ini, sebelum Covid terjadi pengangguran 7 juta. Setelah Covid terjadi, PHK kurang lebih menurut data Kadin kurang lebih 5 juta, berarti ada 12 juta. Nah, kalau kita sambung-sambungkan data ini semua, tadi saya katakan kita asumsikan sampai 2021 komitmen realisasi investasi itu ini tidak bisa menutupi, Pak. Nah, ini yang saya sedikit bikin galau nih. Ini yang selalu saya pikirkan. Nah, artinya adalah saya, saya kira Kepala BKPM yang kita kenal selama ini, Pak Bahlil yang kita kenal selama ini sangat sangat lihai, sangat cerdas dalam menyarikan suatu masalah dan solusi. Saya kira angka 12 juta yang sekarang ini angka pengangguran plus PHK itu, bagaimana caranya mempunyai korelasi positif terhadap investasi yang akan Bapak realisasikan. Itu point saya. Nah, kalau itu bisa dilakukan tidak hanya sebatas di angka 1.400.000 itu, berdasarkan data. Tapi, bagaimana caranya yang 12 juta itu minimal kita bisa mengatasinya. Kalau ini enggak bisa kita atasi, nanti kerusuhan sosial bisa, potensi sosial akan terjadi di masyarakat kita. Itu yang menjadi catatan saya.

Kebetulan, saya juga di Baleg dan juga ikut membahas *Omnibus Law*. Mudah-mudahan dengan Undang-Undang Cipta Kerja kita yang dapat sesegera mungkin bisa

selesai kita kerjakan. Mungkin, ini bisa juga nanti akan menyerap lapangan tenaga kerja kita yang 12 juta yang sudah kita pikirkan sekarang ini.

Sekali lagi, saya hanya mohon titik bahwa di BKPM untuk memikirkan bagaimana trend kekurangan serapan tenaga kerja dibandingkan investasi itu yang semakin hari semakin berkurang. Ini yang gimana caranya untuk bisa semakin bertambah.

Yang kedua, soal soal anggaran, Pak. Ini kepada baik BKPM, Menteri Perindustrian. Memang, ini lahan anomali kita. Anomali kita, saya juga bingung, Pak. Apakah konteks PEN, pemulihan ekonomi nasional itu, kok saya melihatnya hanya semua di monopoli oleh di BUMN. Kenapa tidak masuk dalam skema BKPM dan skema Menteri Perindustrian ya, pemulihan ekonomi nasional itu. Karena, memang namanya pemulihan ekonomi nasional, saya kira tidak hanya terbatas di pada dana PMN dan juga dana yang lain-lain.

Nah, kalau kemudian saya nggak tahu kalau Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN, saya kira cukup berhasil juga merayu Bu Menteri Keuangan ya, Bu Sri Mulyani. Saya pikir ini juga apa karena Pak Erick lebih ganteng dari Menteri Perindustrian dan BKPM, saya nggak tahu. Tapi, saya kira nggak kalah juga kalau dibandingkan Erick Thohir dengan BKPM, mungkin agak beda ya. Tapi, dibandingkan Pak Menteri Perindustrian, memang masih.

Iya, jadi yang saya maksud begini. Kok bisa gitu 19 triliun dana talangan itu, sementara basis hukumnya juga masih belum jelas, tapi kok udah bisa dikatakan itu. Sementara di sisi lain, BKPM dan Menteri Perindustrian yang harusnya juga masuk dalam skema pemulihan ekonomi ini juga harus menjadi bagian dari itu ya. Jadi, kalau saya sederhana aja, Pak Bahlil. Kalau Pak Menteri Perindustrian nggak kalah ganteng lah dengan Erick Thohir lah ya. Kepala BKPM, saya nggak menuduh. Mudah-mudahan sadar diri ya.

KETUA RAPAT:

Ada ngarso dalem, ada ngarso luar.

F-PG (LAMHOT SINAGA):

Jadi artinya adalah ya dalam konteks anggaran itu semua sepakat Komisi VI akan memperjuangkan apa yang dibutuhkan Perindustrian dan dan BKPM. Cuman, kalau bisa saya seran juga kepada teman-teman di Banggar, ini juga skema PEN ini juga harus kita kita korelasikan terhadap Menteri Perindustrian, Kementerian Perindustrian dan juga BKPM dalam skema itu. Apalagi kalau di satu sisi, kemarin saya itu yang saya bilang anomalnya adalah. Masa dana talangan 19 triliun itu yang basis hukumnya masih kita cari-cari, sementara program di Perindustrian ini menjadi premis-premis sama BKPM ini cukup banyak untuk menyelamatkan rakyat banyak, tidak perlu kita cari basis hukumnya, sudah jelas. Masa nggak bisa kita anggarkan. Nah, ini anomali yang saya maksudkan itu. Tapi kemudian, akan kita kita bicarakan lebih lanjut lah soal ini.

Satu hal, Pak Menteri Perindustrian saya titip. Tadi, teman-teman sudah terdahulu sudah mengatakan bahwa soal sektor IKM. Ini sangat berdampak. Kalau usulan saya, Pak, kalau bisa. Kalau pun ada usulan penambahan anggaran. Modernisasi peralatan terhadap sektor IKM, modernisasi. Nah, mereka sekarang masih banyak menggunakan

peralatan-peralatan yang sangat manual. Mungkin, di tahun 2021 perlu kita anggarkan, Pak Menteri. Bagaimana caranya supaya mereka di *support* atau dibantu oleh modernisasi peralatan-peralatan terhadap pelaku-pelaku IKM kita, industri kecil menengah itu.

Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Lamhot.
Pak Nasril.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Terima kasih, Pimpinan.

**Pimpinan, Anggota Komisi VI yang kami hormati dan kami banggakan.
Saudara Menteri, Menteri Perindustrian, dan
Kepala BKPM yang kami hormati.**

Singkat saja, Pak Pimpinan. Pertama, fokus kepada anggaran saja untuk Menteri Perindustrian. Kami tidak melihat basis poin pertumbuhan antara anggaran berdasarkan KMK, Menteri Keuangan ya. Basis pertumbuhannya untuk pasca Covid dan jikapun nanti kesepakatan Banggar untuk ditambah sekitar 2,4 triliun. Tentunya, basis *plan* pertumbuhan dimana. Tentunya, kita berharap bahwa setiap anggaran yang digelontorkan dari APBN, tentunya mempunyai *outfull* terhadap anggaran yang dialokasikan ke Kementerian dan Lembaga, ini sangat penting.

Yang kedua, kami tidak melihat pertumbuhan IKM maupun UMKM pada pasca Covid ya. Nah, disini tentunya *focusing* terhadap anggaran dari semua Kementerian Lembaga di Komisi VI fokus kepada pertumbuhan usaha kecil dan menengah sesuai dengan PP 23 yang diharapkan oleh Presiden, yaitu tentang pemulihan ekonomi nasional. Itu penting bagi kita sebagai Komisi VI yang fokus kepada ekonomi nasional.

Dan yang ketiga, terhadap pertumbuhan manufaktur ya. Yang di sampai hari ini tetap mengkondisikan TKDN nya 49,9%. Nah, apakah ini menjadi syarat utama dalam hal-hal, apakah perizinan dan sebagainya. Karena, tidak memungkinkan pada posisi hari ini mendekati *zero* ya, manufaktur kita. Tentunya ini harus menjadi persoalan yang mendasar ya. Kan pada sisi lain kan yang penting hidup dulu ini industri, tetap butuh tenaga kerja, mengurangi pengangguran. Inikan paling penting bagi kita, ini dulu.

Dan selanjutnya untuk BKPM. Saya tidak ada mempunyai respon. Tapi, saya ingin bertanya kepada kepada Kepala BKPM ya. Saya pikir Perpres terhadap yang diberikan oleh presiden untuk memberikan *reward* dan *punishment* kepada Kepala Daerah maupun Kelembagaan, Kementerian dan Lembaga. Saya pikir apakah ini Bapak beli, dibisikin atau diberi, Pak. Karena, ini senjata ampuh ya. Ketika pada penyusunan Undang-Undang Investasi terdahulu, kita menginginkan kepala itu adalah Menteri.

Nah, hari ini Kepala BKPM merupakan Perpres. Perpres itu saya pikir ya, ada dan tidak adanya anggaran tambahan yang 20 miliar, ini harus jalan Pak. Kala ini salah satunya ya. Salah satunya apakah. Karena kan, pada posisi pada posisi koordinasi interdep antara Kementerian dan Lembaga, meskipun sudah PTSP hari ini dan OSS. Namun, tentu ego sektoral nggak bisa juga kita hilangkan.

Nah, ini saya pikir ada tidak ada ini, Perpres harus jalan dan Anda harus ada yang *reward* dan *punish* kepada seluruh Kementerian yang ada, yang menghambat maupun Kepala Daerah. Di *bargaining* posisi bahwa BKPM, Kepala BKPM memang setara dengan Menteri.

KETUA RAPAT:

Jadi, *punish* dan *reward*.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Hah?

KETUA RAPAT:

Punish dan *reward*.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Punish dan *reward*. Menteri mana yang tidak mau bekerjasama dengan Anda. Ini harus dilakukan.

KETUA RAPAT:

Mustinya, Menteri Perindustrian jangan dong.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Nah, ini saya pikir, makanya saya tanya *..(suara terputus)* jalan ini, Pak. Nah, ini saya pikir. Jadi, dengan adanya Perpres ini, setara lah Anda itu dengan Menteri. Sudah Nggak ada nggak ada pembatas lagi, kan gitu. Wajar kita bilang hari ini Kepala itu sudah kayak Menteri BKPM, Menteri Investasi. Ini saya kepada Anda itu jangan sampai sudah jalan, termasuk kepala daerah. Karena, ini menghambat.

Saya suatu ketika Pak Pak Demmer, Pak Wimus waktu itu ikut apa tidak sih tidak tahu, berjalan bersama Pak Erlangga. Ditanya Kadin Amerika pada saat itu. Kita ketika mau mensosialisasikan Undang-Undang Investasi. Nah, kita serahkan Undang-Undang investasi ini, kata Kadin Amerika pada saat itu, ini tidak perlu undang-undang. Kami yang penting *power*. Hari ini, *power* kami ada di Indonesia. Makanya, kami berfikir untuk berinvestasi. Maka, pikiran ini adalah ya ketika otoritasnya jaman orde baru dulu. Nah,

hari ini pada saat kita melakukan supremasi hukum perundang-undangan, maka tergelitik lah untuk membuat *Omnibus Law*. Nah, ini mungkin ini itu mengidentikan pada Masa Orde Baru dengan undang-undang itu. Nah, hari ini ketika Anda dapat Perpres, saya pikir itu harus Anda lakukan, Saudara Kepala BKPM. Saya pikir, saya memberikan *support* untuk itu dapat dijalankan.

Mengenai anggaran, saya pikir Anda nggak perlu anggaran. Hah, karena negara ini berhak anda untuk jual.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Kaget kaget, kita.

Selanjutnya, ke kanan. Pak Deddy. Kita perpanjang dulu, Pak Deddy ya. Karena, berapa kali sudah kita perpanjang ya. Sudah 2x, sekarang 3x kita perpanjang ya. Perpanjangan terakhir ya. Perpanjang setengah jam ya.

(RAPAT:SETUJU)

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Terima kasih, Pimpinan.

Ini kalau rapat sama Pak Bahlil begini. Jadi, semua jadi *eager* mau bicara. Jadi, begini. Terima kasih, Pimpinan, Pak Menteri dan Pak Kepala BKPM.

Kalau kita berkhayal bahwa situasi bisa kembali sebelum Covid, itu mimpi. Saya kira tantangan kita pada saat ini adalah bagaimana kita bisa terus maju dengan kondisi kekurangan. Ya, nggak mungkin kembali ke yang kemarin. Karena, semua Kementerian kan pasti punya argumentasi masing-masing dan kita sepakat, tapi kan keterbatasan negara agak sulit juga, Pak. Jadi, ada pepatah Cina bilang, "*better to light the candle than to curse the darkness.*" Ya kan, dari pada kita menutup kegelapan, lebih baik nyalahkan lah lilin.

Nah, ini saya kira ini tantangan buat Pak Bahlil. Saya berharap justru, ini lah saatnya Kementerian seperti BKPM yang menjadi simpul dari seluruh Kementerian untuk melakukan momuknya, Pak melakukan PRnya. Mari lah lihat kembali RKJMN kita. Sudah *demand* nggak dilaksanakan di seluruh Kementerian. Sudah singkron tidak, bahkan sampai ke daerah, sudah singkron dengan rencana tata ruang masing-masing wilayah provinsi, kabupaten, kota. Apakah BKPM punya rencananya sendiri, apa DPR punya rencananya sendiri. Apakah dia sudah singkron dengan seluruh *stakeholder* di bidang investasi ya.

Saya kira, apa Namanya pandemi ini selesai, siapa yang bisa keluar dengan inovasi-inovasi dan terobosan baru, Pak? Ya, apakah memang masih perlu kita memelihara seluruh kantor BKPM di seluruh dunia itu, Misalnya. Apakah tidak ini saatnya kita mengubah cara bertindak dan cara berpikir, memanfaatkan Kementerian Luar Negeri

misalnya, kan bisa seperti itu juga. Daerah-daerah ini banyak melakukan promosi ke luar negeri, Pak BUMN juga, tadi sudah disampaikan banyak.

Gubernur saya di Kalimantan Utara, Pak daerah pemilihan saya. Kalau tidak karena Covid, bisa dua kali sebulan Pak keluar negeri. Mungkin, tiga kali. Alasannya, promosi wisata. Dana humasnya itu 45 miliar untuk promosikan daerah setahun. Lebih besar dari anggaran untuk untuk pertanian, perikanan dan sebagainya. Nah, yang seperti ini saya kira banyak, Pak. Coba dikoordinasikan supaya memang efektif. Nanti, saya takutnya Pak Bahlil ke suatu negara, cuma beda-beda hotel nih sama Bupati dan Gubernur untuk hal yang sama. Iya, jangan-jangan Bupatiya di tempat lain lagi, kan sama. Bener kan, ini kan Bapak harus lihat juga sebagai sebuah potensi karena, celaka kita kalau seperti ini. Jadi, semuanya divergen gitu, Pak ya. Nggak pernah sampai satu titik ke titik lain, semua dengan jalannya sendiri. Ya, kan harusnya konvergen, Pak. Ini gimana caranya, kerja seperti ini nggak perlu dana, Pak. Anggaran BKPM tadi, lebih besar dari Kementerian BUMN kalau saya lihat, yang mengurus begitu banyak perusahaan. Sekarang, tinggal Bapak bagaimana menyikapi masalah ini. Karena, peluangnya banyak, Pak. Undang-Undang Omnibus Law yang sedang dibahas ini. Harusnya menjadi obat mujarab, Pak untuk semua masalah kita. Karena, masalah investasi ini, Pak dari hulu sampai hilir. Di hulu kebijakan yang carut marut tumpang tindih ya, itu bermasalah. Dalam pelaksanaan, nggak cukup orang hanya karena daftar perusahaan. Begitu daftar ke tempat lain, bisa dua tahun Pak, pelaksanaan di lapangan, sewa tanah, infrastruktur dan sebagainya. Nggak bisa BKPM sendiri yang kerja. Jadi, nggak ada gunanya datangkan orang banyak-banyak, tapi ketika dia dapat SIM dari Pak Pak Bahlil, susah dia ngurus trayek dan sebagainya, susah dia cari pangkalan. Ini kan omong kosong juga, Pak. Jadi *useless* gitu.

Pekerjaan rumah lain misalnya, bagaimana dengan kawasan-kawasan investasi kita. Batam itu dari dulu begitu begitu aja, Pak. Daripada kita berusaha mendatangkan pengusaha-pengusaha baru, ketika dia datang ke Indonesia dan cerita dengan pengusaha lain yang sudah ada di Indonesia dari negaranya bilang, “ah, berengsek disini, yuk cari tempat yang lain aja lah, pergi ke Vietnam sana.” Coba, Pak evaluasi semua dong, kan gitu. Batam kah atau yang lain, itu bagaimana supaya kita punya narasi baru, Pak Bahlil. Daripada mencari yang baru, kalau yang sudah ada di sini benar-benar kita bisa perbaiki, Pak. Mereka yang kampanye keluar cari teman, Pak. Itu otomatis hey datang kemari.

Saya tahun lalu, akhir tahun lalu ketemu banyak banyak ketemu sama manager di Singapur, Pak ketika kacau-kacaunya di Hongkong itu. Ada puluhan miliar dolar orang bingung mau taruh kemana. Di Singapur sudah pertemuannya satu, satu persen. Ditawarin ke Indonesia, no way Bapak, nggak ada yang mau. Mereka pilih Vietnam dan sebagainya. Kenapa, ..(*suara tidak jelas*) bisnis kita itu, tetap begitu-begitu saja dari 2018, 2019, 2020 nggak tahu lagi, Pak. Jadi, kita ini belum menutup permukaan, belum kebawah, Pak. itu menurut saya yang harus Bapak kerjakan selama masa pandemi ini.

Beresin kaitannya dengan RT,RW, perencana di daerah, promosi bersama. Gunakan apa yang ada, bukan apa yang ideal. Karena, ideal itu ga mungkin terjadi, nggak mungkin terjadi. Jadi, harus disama Pak menurut saya. Bapak kerjanya disana. Panggil lah Gubernur segala macam itu, Bupati. Eh, kalau kalian jalan sendiri-sendiri, nggak sinkron, kita susah gerak. Karena, pada akhirnya orang ngeliat Indonesia, nggak

lihat provinsi kabupaten. Presepsi yang di Bandung itu holistik, nggak bisa memang pintu satu. Nah, ini saya kira penting, Pak.

Tadi, Bapak bicara soal pertumbuhan berkeadilan dan segala macam. RPJMN kita harus diubah logikanya, Pak. Kalau buku dua tidak bicara tentang wilayah, nggak bakal kena tuh daerah pinggiran seperti Kalimantan Utara atau Papua. Harus wilayah dia kita tentukan, mana yang mau kita bangun. Ketika kita bicara *issue* dan program, pasti jauh Sumatera lagi. Ubah dulu itu logika berfikirnya. Disitu baru kelihatan pertumbuhan yang berkeadilan dan merata itu bicara wilayah karena bicara kalau tidak bicara di kedua RPJMN sekarang, pasti ngelihatnya infrastruktur, jumlah penduduk, ya gak bakal kebagian, Pak Kalimantan dan Papua. Ibaah dulu disitu.

Nah, lalu Omnibus ini, Pak. Saya berharap Bapak itu menjadi katakanlah sebagai ikut menjadi derijennya, Pak. Karena, entah Kementerian Perdagangan, Perindustrian, Pertanian dan sebagainya ini, itu punya kerjanya masing-masing. Kalau nggak diberesin, Pemda juga. Kalau nggak diberesin, omong kosong lagi kita dan belum tentu kita punya peluang seperti ini kedepan, Pak. tolong, itu benar-benar dilihat dari pada kita *art out working* coba *work looking* aja lah, Pak ya. Bagaimana ini semua kita bisa benahi sehingga, benar-benar setelah pandemi kita bisa *reborn* dengan baik, Pak bahkan lebih cepat.

Kalau kemarin, cerita Pak Menteri disini kan, kita malah sudah ada urutan kelima, urutan ketujuh sebagai pilar investasi, kan kacau balau kayak mana. Persoalannya bukan hanya soal upah buruh murah, itu mah jaman orde baru dulu upah buruh murah. Sekarang nggak bisa, Pak ya. Banyak persoalan sektor buruh dan lain-lain.

Nah, Perindustrian Pak. Ketika, Pak Jokowi menang tahun 2014. Kami dari tim transisi, waktu itu banyak bertemu dengan lembaga-lembaga asing dan sebagainya. Pertanyaan mereka cuman satu, kemana arahnya Indonesia. Apakah masih tetap komoditi atau di sektor riil? Hari ini, saya belum melihat ada perubahan yang mendasar, Pak. Kita masih dengan apa yang ada. Indusrti 4.0 itu gagal Pak di telinga. Tapi, belum nyambung dengan kita, Pak. Saya kira, kalau seandainya sedikit balai latihan kerja itu semua di dimanfaatkan lah, Pak. Karena, yang namanya industri 4.0, memang melahirkan sesuatu yang baru tanpa mematikan yang lama, Pak. Itu harus jadi tantangan juga buat kita, bagaimana supaya itu tidak tidak seperti itu.

Nah, untuk Kementerian Perindustrian. Pak, saya berharap benar-benar ini soal TKDN tadi sudah disinggung. Kita harus fokus disana, Pak ya menjadi perhatian penting dari kita dan saya tadinya berharap sebenarnya kartu pra-kerja itu, digelontorkan saja langsung ke orangnya, Pak di balai-balai latihan kerja itu sehingga, mereka bisa langsung bekerja dengan baik ya, bukan jadi seperti yang kemarin. Nah, sekarang tidak melihat ada hasilnya dengan uang puluhan belasan triliun, tapi hasilnya nggak terlalu ketahuan, Pak. Jadi, ini sesuatu yang perlu menjadi perhatian kita semua saya kira.

Dan saya harap, Pak. Tadi sudah disinggung juga soal bahan baku ya. Kita harus fokus disana. Pertamina saya dengar sudah dari apa namanya sudah sampai bicara tentang farma apa namanya ini farma dari petrochemical menjadi farma technical. Kan terbukti bahwa kita salah obat-obat itu gagal. Dorong dong, Pak apa namanya Kementerian Perindustrian, supaya *downstreamnya* itu memang jalan. Di CPO, Pak *downstream*. Kita jangan lagi untuk komoditi, Pak. Sangat fluktuatif, lawan kita banyak. Mari kita berangkat dari kekuatan kita yang ada, bikin dong pabrik apa pabrik ban. Karena, petani karet kita menderita harganya begitu terus. Coba ke sana Pak arahnya,

supaya benar-benar ada *champion*, ada *legend* yang dibangun Kementerian ini selama pemerintahan periode kedua, Pak Jokowi ini.

Terima kasih, Pimpinan.
Maaf terlalu lama.

KETUA RAPAT:

Iya, terima kasih.

Di sini yang langsung hadir masih ada dua pertanyaan. Tapi, kita selingi dulu dengan yang mau bertanya dari virtual. Dari Pak Nyat Kadir.

F-P.NASDEM (Drs. H. NYAT KADIR):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

**Yang terhormat Pimpinan Komisi VI,
Bapak Bapak Ibu Anggota DPR RI Komisi VI,
Bapak Menteri,
Bapak Kepala BKPM,
Hadirin hadiratnya yang di memuliakan.**

Terima kasih. Saya ini jauh sekali nih dari Batam. Tapi, jauh di mata dekat di hati lah.

Saya umum saja, sedikit saja. Pada umumnya, pada umumnya ya saya ingin membahas masalah anggaran, khusus anggaran saja bahwa saya ya pasti Partai Nasdem juga lah mendukung tambahan anggaran bagi Kementerian Perindustrian, BKPM.

Saya sejak dari dulu mengkritisi Pemerintah, ini masalah anggaran Kemkeu Kementerian Keuangan keuangan yang lebih berperan di anggaran. Ini bukan masalah pada saat ini, kita ngertilah pada saat ini. Sebelum sebelum ini, 5 tahun sebelum ini 6 tahun sebelum ini, anggaran-anggaran Kementerian yang diharapkan memacu pertumbuhan ekonomi yang ada di Komisi VI, ini menurun terus ya. Dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga ya menurun terus. Coba aja dilihat dokumennya. Saya melihat ya Kementerian Keuangan yang lebih luas ini tidak proporsional dalam membuat anggaran Kementerian-Kementerian ya dan lebih lebih kepada BUMN saja ya. Ini masalahnya bukan kita kita tidak bicara adil tidak adil lah, proporsional. Sedangkan, untuk ya pilar ekonomi yang lain ya itu UMKM dan ya seperti Pak Bahlil dan Kementerian Perindustrian lebih kepada swasta lah swasta, luar negeri, dalam negeri itu tidak berimbang ya. Saya bukan mengatakan tidak adil ya, terlalu ekstrem lah tidak berimbang dari dulu dan ini saya kira tidak akan banyak merubah pertumbuhan ekonomi kita ya selama Kementerian Keuangan kita terlalu berat kepada BUMN dan meninggalkan UMKM dan swasta.

Kita bicara dulu ya, kalau sekarang kita maklum. Jadi, kalau kita ingin ikan yang besar mendapat ikan yang besar dan banyak ya, umpannya mesti banyak dan bagus. Saya beri contoh saja seperti Pak Bahlil ya BKPM itu tidak bisa kita samakan dengan BUMN. Saya minta maaf, nih agak-agak marah saya dengan BUMN. Saya kira Pak Deddy juga akan marah, yang lain ya. Kalau BKPM ini dia termasuk di dalamnya anggaran eksekusi, kalau BUMN itu lebih rendah, Kementerian BUMN itu kan administratif. Sedangkan, bawahannya itu sekian ratus PT-PT di bawah BUMN itu punya anggaran sendiri-sendiri dan malah diberi talangan oleh pemerintah. Nggak ada masalah dia bertumbuh sendiri, didorong oleh Kementerian BUMN.

Kalau, Pak Bahlil ini ya dia ada eksekusi di dalamnya yang menyangkut memasukkan investasi dari global dan maupun PMDN. Jadi harus besar, jadi kita harus dukung ini ya penambahan anggaran ya Pak Bahlil ya. Saya tidak anggap Pak Bahlil ini cengeng bukan bela dia, tapi saya maklum seperti kata Pak Deddy Sitorus tadi ya anggaran tidak bisa banyak diharapkan dalam masa Covid ini. Tetapi, berikan perhatian kepada kalau kita sejalan dengan pemikiran Menteri Keuangan ya, ingin menginginkan jangan sampai pertumbuhan ekonomi kita ini minus. Sekarang, 2,9 bisa jadi nanti 1. Nah, ini harus didorong oleh konsumsi dan investasi. Nah, bagaimana kalau kita mau mendorong investasi, yang katanya targetnya masih 817 ya PMA maupun PMDN itu 817 di perbaiki lah dari 850 tak salah ya.

Kalau investasi masuk yang seperti yang diharapkan Pak Bahlil itu. Katakan lah, tidak akan tercapai itu saya yakin tidak akan tercapai. Paling tidak 600 triliun masuklah ya sampai akhir tahun. Pertumbuhan ekonomi kita mungkin tidak anjlok sampai 1, 1 di bawah 1%. Minimal bertahan 2,9 atau 3 gimana. Nah, ini mesti didorong oleh lembaga. Lembaga yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi seperti, BKPM dan Kementerian Perindustrian dan lain-lain.

Nah, saya kira itu saja dari saya. Jadi, Komisi VI harus memperjuangkan di Banggar ya, bukan hanya setuju kepada BUMN, dana talangan segala macam yang tidak dasar hukumnya aneh-aneh itu ya. Sebaiknya, kita tolak saja itu dana talangan itu. Nggak ada dasar hukumnya tuh, terlalu manja itu BUMN itu, terlalu banyak. Nah, lebih baik kita fokus kepada Kementerian yang akan menumbuhkan, yang memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi seperti BKPM, Kementerian Perindustrian dan lain-lain.

Saya kira itu, Pak Ketua.
Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Ternyata keras juga, Pak.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Izin, Pimpinan. Maaf, nggak sopan karena harus pergi. Karena, sudah janji. Saya mohon izin, Pak Menteri, Pak Bahlil, Pimpinan. Maaf, kawan-kawan semua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silahkan, Pak Deddy.

Kita masih punya dua nih, Pak Nusron. Siap-siap, Pak Andre.

F-PDIP (ARIA BIMA):

Pak Andre ditanya.

F-PG (NUSRON WAHID):

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya pertama mau tanya sama Pak Bahlil Kepala BKPM. Dari target realisasi BNPB tahun 2020. G2 sudah sampai berapa, Pak? 2020 itu 817,2 triliun. Tapi, dengan asumsi ada pandemi ini pasti ada kontraksi. Kalau kemudian kita simpulkan di Q2 sudah berapa dan G on G dengan tahun lalu itu minus berapa. Kemudian, dari angka itu yang FGA berapa yang dalam negeri berapa? Kemudian, yang ketiga itu kalau kita membuat sektor yang inporter. 75% itu di dominasi sektor apa aja yang terealisasi di tengah-tengah situasi seperti ini.

Kemudian, untuk anggarannya saya mengusulkan kepada Pimpinan dan teman-teman semua kalau setuju, kita buat saja target. Kalau realisasi investasinya Pak bahlil ini mencapai angka 1.000 triliun, kita buat basis 1.000 basis point. Maka, anggarannya kita minta setuju 1 triliun. Lainnya tahun 2020 ini target investasinya hanya 300 triliun, maka kita setuju anggarannya hanya 300 miliar dengan menggunakan ansumsi yang berbasis kinerja, anggaran berbasis kinerja. Kayak orang supir angkot, kalau penumpangnya banyak ya itunya banyak taxinya banyak. Kalau penumpangnya dikit ya anggarannya dikit, begitu aja sehingga, ada ada hal yang jelas begitu.

Kemudian yang ketiga, Pak Bahlil. Saya berubah haluan pemikiran saya dan sekitar 15 tahun yang lalu ketika saya menyusun Undang-Undang Penanaman Modal bersama Pak Bimo sama Pak Nasril Bahar. Dulu, yang Nasril Bahar masih ada disini. Berani nggak mendengungkan konsep seperti itu, di UK di Inggris. Kalau di Inggris ada referendum Brexit, British Exit. Berani nggak Pak Bahlil itu membuat konsep INA Exit, Indonesia Exit. Jadi, masyarakat ekonomi ASEAN. Karena begini, saya yakin salah satu kalahnya Indonesia dibandingkan dengan Vietnam, Filiphine, Thailand, salah satunya mungkin karena kita ini masuk dalam komunitas ekonomi ASEAN. Logikanya sederhana, Jepang, China, Korea dan semua investor itu harusnya ketika dia menanamkan investasi jauh lebih memilih Indonesia dibandingkan tempatnya. Kenapa? Indonesia dengan 270 juta, disitu ada pasar. Indonesia dengan segudang bahan baku, disitu tempat. Hanya mungkin Indonesia ini agak sedikit kurang adalah *circumstances* yang tidak mendukung, yang kemudian dirumuskan dalam *ease of doing business* itu. Ya, hari ini akan kita ubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi, kenapa itu semua terjadi? Karena orang lebih memilih Vietnam? Karena, Vietnam lebih produktif dan *circumstances* lebih bagus. Toh,

ujung-ujungnya menjual barang ke Indonesia *no barrier*, tidak ada biaya masuk sehingga, Indonesia hanya dilihat sebagai pasar.

Mungkin, kita perlu melakukan renegosiasi dengan masyarakat ekonomi ASEAN tentang konsep ini dan ini momentum karena, RKP kita tahun ini adalah momentum *recovery* dan percepatan daripada, *recovery* dan momentum untuk reformasi. Salah satunya juga dengan Jepang, IJEPA/*Indonesian Japan Economic Partnership Agreement* gitu. Kita hanya dikasih kompensasi dengan IJEPA mengirimkan tenaga kerja perawat yang setahun hanya dikasih 480 orang. Karena, saya ngirim selama 5 tahun. Tetapi, apa kompensasinya? Semua barang modal dari Jepang kesini, *no barrier*. Yang itu tidak sebanding antara remitensi yang dihasilkan oleh para perawat itu dengan kebebasan biaya masuk yang diberikan kepada industri Jepang ke Indonesia. Saya kira itu point saya kepada Pak Bahlil.

Point yang kedua, saya ingin memepererat boss saya, ketua saya Pak Menteri Perindustrian. Punya program yang sangat bagus sekali, yaitu program masalah pengembangan sumber daya manusia industri yaitu, program vokasi. Yang itu menjadi salah satu poin kelemahan investasi di Indonesia. Kenapa tidak mau masuk, itu karena salah satunya adalah daya saing dan produktifitas. Saya mendukung Pak Ketua program ini menjadi prioritas karena kalau kita lihat dari fokus prioritas program nasional yang *dilaunching* oleh Pemerintah, Bappenas. Itu Inves 7 point prioritas nasional yang *related* dengan perindustrian, 3 yaitu : ditetapkan ketahanan ekonomi, mengembangkan wilayah dan kesenjangan mengurangi kesenjangan sosial dan nomor tiga, meningkatkan SDM yang berdaya saing karena itu keputusan politik yang kami usulkan, program ini harus di *pull out*, di *cash out* dari program Perindustrian. Tapi, harus diambilkan dari dana fungsi pendidikan sepenuhnya sehingga, kita harusnya dana dari fungsi pendidikan, yang lainnya dimasukkan ke perindustrian tapi dikelola oleh Menteri Perindustrian. Jadi, setiap tahun kita sama-sama tahu, setiap tahun pasti ada aktualisasi. Dalam ya dalam 30-40 triliun, biasanya. Nggak tahu kalau tahun ini. Katakan lah 20 triliun, kalau kita simulasi. Tapi, mandatori itu 20% untuk dana pendidikan, 4 triliun. Biasanya dana pendidikan optimalisasi hanya diminta oleh 2 kementerian, yaitu kemendikbud dan Kemenag. Untuk kali ini, yak an, karena apa, programnya bagus. Harus diambil oleh Kementerian Perindustrian sebagai dana fungsi pendidikan untuk pelatihan vokasi. Kenapa, di Kementerian Kemendikbud, ada dirjen vokasi. Tapi, programnya kalah kalau saya baca dengan programnya Pak Menteri. Kenapa, pelatihan berbasis 3 in 1 : pelatihan, training, sertifikasi sama placement.

Saya pengalaman 5 tahun di pemerintahan. Tidak pernah saya mendapatkan *placement* dari Perindustrian, kenapa? Semua sudah laku. Karena kan, saya kan tukang memasarkan tenaga kerja. Saya datang ke Perindustrian, ada nggak yang bisa dirapihin, bisa saya pasarkan, sudah diambil Pak sama Astra, sama ini sama ini sama ini sama ini dan sebagainya. Tapi, kalau saya datang ke Menteri Mendikbud, selalu kelebihan. *Placement*nya kosong, karena dia disana nggak punya program *placement*. Jadi, ini lebih bagus dari pada yang dimiliki oleh Kementerian Perindustrian. Bahkan jauh lebih bagus dari yang dimiliki mohon maaf, ada teman-teman PKP nggak, nggak enak saya ngomong ini, Kemnaker karena di Kemnaker nggak punya program *placement*, hanya pelatihan sama sertifikasi. Ada Bu Mukaromah tadi nggak enak saya tadi. Karena, saya nggak enak karena itu, ini menjadi mandatori teman-teman di Komisi VI untuk program ini wajib diambilkan dari optimalisasi dana fungsi pendidikan supaya nggak mengganggu yang

lain aehingga nanti, dana yang sudah ada di Perindustrian di kembalikan untuk yang lain, misal untuk pengembangan industri yang lain. Tapi, ini murni didaya dari dana fungsi pendidikan supaya anggarannya meningkat.

Kemudian yang terakhir, Pak Menteri. Masuk Pak Bahlil, yang terakhir Pak Menteri. Situasi ini ini saya butuh supaya Pak Menteri boss saya ini punya *legacy* selama menjadi Menteri Perindustrian. Sejak Orde Baru rontok sampai hari ini, Indonesia hari ini tidak mempunyai *industry local capital goods*. Gimana kita membangun menjadi reindustrialisasi negara industri, kalau kita tidak mempunyai satupun perusahaan di Indonesia *industrial capital goods* baik BUMN maupun swasta.

Zaman Orde Baru ada Boma Bisma Indah sehat, ada Barata apa lagi dulu itu, ada Texmaco Engineering. Ini wafat semua itu, *industrial capital goods* kita. Sampai kita masalah alat pemotong bawang, *rice mill*, cangkul semua Taiwan, semua Jepang nggak ada, nggak dan saya yakin nggak mungkin akan ada industri tumbuh kalau tidak ada *industrial capital goods*. Karena itu mumpung ini momentum. Momentum penyelamatan ekonomi nasional, kita dukung sepenuhnya. Ada *legacy* dari Pak Menteri kita Agus Gumiwang Kartasasmita. Di bawah kepemimpinan 5 tahun ini, tumbuh *industrial capital goods* yang itu akan mendominasi industri nasional kita semua.

Sekian, terima kasih Pak Bimo.

Wabillahi Taufik Walhidayah,
Pak Bimo.

Wablilahi taufik walhidayah,
barang siapa dekat sama Pak Taufik, *In Syaa* Allah dapat hadiah.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

F-PDIP (ARIA BIMA):

..(suara tidak jelas)..

F-PG (Drs. MUKHTARUDIN DJUHARI):

Untung Pak Bimo sudah kenal lama sama Pak Nusron.

KETUA RAPAT:

Jadi, Pas jam jam jam jam ngantuk ini. Ada ketawanya sedikit juga.
Silakan, Pak Andre. 3 menit ya mas ya.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Nggak sampai *In Syaa* Allah 1 menit setengah karena, semua sudah lapar.

Pak Menteri yang saya hormati dan juga Kepala BKPM.

Singkat saja, pertama ke Pak Menteri kali ya. Pak Menteri, Desember 2019 kami rapat dengan almarhum Pak Dirjen Haryanto. Itu kita sempat menanyakan soal Peraturan Menperin ya soal impor baja, Pak waktu itu ya soal bagaimana kami di rapat itu menanyakan rencana pencabutan Permenperin waktu itu. Lalu oleh Pak Pak Dirjen, Beliau menyampaikan Beliau akan berkonsultasi dulu dengan Pak Menteri yaitu, soal Permenperin Nomor 32 dan Permenperin Nomor 35 Tahun 2011 ya tentang pertimbangan teknis impor besi dan baja panduan, serta tentang penerbitan pertama teknis dan untuk pengecualian menggunakan standar SNI, Pak.

Nah, saya menanyakan perkembangan seperti apa, Pak. Apa lagi kita tahu dalam krisis khusus wabah Covid-19 tentu konsumsi baja dan juga mungkin semen yang merupakan produk nasional kita baik dari Krakatau Steel dan SIM Indonesia, tentu konsumsi ini menurun karena wabah Covid ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi kita menurunnya. Nah, bagaimana perkembangan Permenperin itu, Pak Menteri. Apakah jadi dicabut atau direvisi, sehingga kita bisa melindungi industri baja nasional kita.

Lalu ke Pak BKPM saya saya cintai ini. Yang kemarin itu, saya sudah bicara secara lisan Pak BKPM yang ganteng ini sudah menyampaikan bahwa urusan semen beres bro, katanya ya. Bahwa akan ada kepastian tidak akan lagi investasi semen nasional, hanya khusus untuk investor ya. Apakah itu sudah direalisasikan dalam keputusan Kepala BKPM, kita ingin keterangannya saja. Ya, bukan karena kita anti investasi, jadi silahkan saja berinvestasi di Semen Indonesia, tapi untuk kepentingan ekspor.

Lalu, Pak Demmer dan seluruh teman-teman yang lain. Bapak Bahlil Lahadalia ini akan menjadi sakti mandraguna kalau kita baca Rancangan Omnibus Law yang dibahas terus terusan sekarang karena semuanya akan ditahan Pak Bahlil. Jadi, mana Pak Nasril Bahar tadi. Jadi, Pak Bahlil ini akan menjadi ya orang yang sangat sakti mandraguna di Republik Indonesia ini ya. Gubernur itu nggak ada artinya lagi, dia ngurus AKD AU aja, sama izin apa namanya itu, izin galian C. Semua izin akan ada di Pak Bahlil nanti setelah *Omnibus Law* ini.

Nah, harapan kami tentu dengan kekuasaan yang begitu besar yang Pak Bahlil memiliki nanti setelah *Omnibus Law* ini dibahas di DPR. Tentu harapan kita jangan sampai BKPM menjadi *bottle neck* baru ya. Benar-benar BKPM ini bisa mempermudah, memperlancar arus investasi dan seluruh SOP yang ada sehingga, keinginan Presiden Jokowi untuk meningkatkan Indonesia apa nama negara yang ramah terhadap investasi bisa berjalan. Saya percayalah sebagai Direktur TKN, Pak Bahlil bekerja keras melaksanakan keinginan presiden.

Nah, biar sambung dikit. Lalu terakhir nih yang paling penting Pak Bahlil. Saya mau menanyakan soal investasi yang ada di Batam, Pak Bahlil. Ini adalah titipan pertanyaan dari teman-teman ya, soal ya sebentar kita lihat dalam contekan ya, soal PT Batam Central Indo, Pak Bahlil. Nah, saya tahu Pak Bahlil pasti sudah tahu. PT Batam Central Indo ini, swasta Indonesia sudah memastikan ada lahan 75 hektar dari tahun 2013, mereka sudah siapkan lahan itu. Nah, tapi memang investornya sampai sekarang yaitu West Point Terminal itu belum membangun depo itu.

Nah, harapan saya Pak Bahlil bisa memastikan investasi tetap berjalan, tetapi tetap ada rasa keadilan kepada pengusaha nasional kita. Itu yang kita kasih *highlight* nya Pak Bahlil. Kami DPR akan awasi itu, jangan sampai pengusaha kita pengusaha nasional kita terzolimi ya oleh investasi-investasi asing itu, siapapun backingan-nya kita sikat itu.

Terima kasih, Pak Bahlil yang saya cintai, Ketua umum saya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Cepat kan, cepat kan.

KETUA RAPAT:

Hari ini, kali ini kali ini tertib.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Kemarin juga cepat.

KETUA RAPAT:

Ya, nanti Ketua Omnibus Law selesai, kekuasaannya Pak Bahlil itu ***..(suara terputus-putus)*** tetap aja masih namanya itu Koordinasi Penanaman Modal. Beliau tadi udah udah konfirmasi, Koordinasi Penanaman Modal.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Mungkin, Pak Bahlil bisa usulkan ke Pimpinan, jadi Menteri kali.

KETUA RAPAT:

Dari meja Pimpinan, silakan Mas Bimo.

F-PDIP (ARIA BIMA):

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Salam sejahtera buat kita semua,
Om Swastiastu.**

**Pimpinan dan kawan-kawan Anggota Komisi VI,
Pak Menteri Perindustrian, dan
Kepala BKPM beserta seluruh jajarannya yang saya hormati.**

Mengenai pengajuan RKAKL dan RKP untuk tahun 2021 ini, tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang sudah 15 tahun di sini, 17 tahun di sini saya, termasuk Pak Nusron, Pak Nasril. Tapi, ada satu hal yang mungkin perlu ada satu tekanan sampai akhir Desember atau 2021 kita kembali pada pemulihan ekonomi nasional, Pak ya. Pak Bahlil bisa lebih merajut berbagai hal yang terkait dengan ekonomi global. Tadi udah di singgung baik itu menyangkut situasi China-Amerika yang lebih masuk lagi dalam blok perang dingin dalam perang dagang ini dan akan ada struktur perubahan pasar dimana kalau betul itu Vietnam, Thailand, India itu akan menarik sebagian besar investasi dari China dan kita akan melihat beberapa hal yang akan tereduksi dengan hilangnya berbagai ekspor kita ke China karena DNA India dengan kita tidak jauh berbeda tentang produk-produk primer yang selama ini menjadi bahan baku di China, begitu juga batu bara dan gas nya. Ini ini dalam skala global dan ini masih *the future problem*, tapi *factual problem* ini struktur pasar nasional kita juga berupa. Ekspor impor kita berubah. Negara-negara kembali ke ke *national interest* masing-masing. Muncul ultra nasionalis, ultra nasionalis yang yang akhirnya globalisasi pasar bebas ini menjadi satu narasi yang yang diyakini Nusron dan tidak terbukti sekarang ini, kan gitu. Ini tipe orang pro pasar itu yang namanya Nusron Wahid, Pak. Ini orang yang fundamentalis pasar. Dia sering ngejek kelompok-kelompok yang terlalu ekstrim dengan hal-hal yang menyangkut kedaulatan-kedaulatan ini tidak begitu cocok Pak Nusron ini. Nah, sekarang terjawab kita tidak anti terhadap pasar, kita sekarang tapi sekarang harus realistis bahwa sulit kita kemudian berdagangan bebas atau sistem pasar ini ada hal yang *fair* di dalam kita membutuhkan bahan baku, membutuhkan berbagai produk-produk yang kita butuhkan. Ternyata pengamanan kepentingan nasional masing-masing negara sekarang ini begitu demikian besar.

Nah, saya kira ini yang perlu dirumuskan oleh Pak Bahlil. Dalam situasi pasca pandemi, dampaknya ini itu sebenarnya akan terjadi pada skenario 1, skenario 2, skenario 3 yang seperti apa. Sekarang ini seluruh asosiasi industri kecuali kesehatan dan makanan hampir bertahan maksimal 30% produknya itu laku. Apakah Astra industri manufaktur. Bapak ke industri-industri makanan pun hanya 30%. Industri-industri kosmetik itu hampir semua 30% ya dan dan butuh *recovery* sistem keuangan. Dia ditawarkan produk baru, nggak tertarik Pak. Ini persoalan pasar, persoalan daya beli gitu. Ini tukang bakso hanya 20% Pak.

Bapak kalau ke Bundaran HI yang bawa sepeda, bawa termos sama kopi itu bisa 20 termos, 25 termos dulu Pak, sekarang, 2 termos. Ini ini ini yang *check*, jangan yang saya sepakat kinerja ini betul-betul kita ukur dari pasca pandemi yang terkait dengan pemulihan ekonomi nasional. Saya melihat Pak Bahlil, saya setuju lebih ke *back office* dulu, Pak. Nanti akan ada titik dimana lompatan investasi itu akan terjadi perubahan, tapi kita udah siap. Kita sudah siap. Jadi, *Omnibus Law* itu kan awalnya. *Omnibus Law* itu awal izin yang sulit, tapi setelah itu yang mempersulit itu kita semua, Pak. Yang mempersulit itu ya BUMN ini. Yang mempersulit itu pemerintah ini, kan gitu. **..(suara tidak jelas)** mau gas BUMN, mau listrik BUMN, mau pelabuhan BUMN, mau bandara BUMN, mau jalan BUMN semua. Kalau ada persandingan antara Malaysia, Philipine, Vietnam bersandingan aja. Harga gas berapa, disana berapa, pajaknya berapa, jalan tolnya berapa, pelabuhannya berapa. Ini semua yang memperkuat mahalnya *cost production* itu BUMN, Pak.

Nah, sekarang Pak Bahlil kalau sekarang pengusaha jangan ditawari duit. Pak Bahlil tekan sementara ini gas di gratisan, Malaysia di gratisan itu, ada geliat. Toh, kalau tidak dibeli juga dibakar, buang kan. Iya, dibuang Pak. Nah, kalau gas sekarang minimal 6% nggak realistis, Pak. Tapi, untuk sampai Desember ini, sementara gas ini dikasih dulu lah. Toh tetap dikuasai negara ya kan. Kalau nggak, nggak berkeliet, Pak, nggak ngeliat ini, nggak gerak gitu loh. Mau buat *roadmap* kayak apa, karena kan butuh biaya murah ini, ini butuh produk murah rakyat ini. Sekarang ini, mungkin saya salah, tapi boleh dicek. Pak Bahlil kan ada di ada di Kadin, ada di. Kemarin, saya kumpul saya, Anam, Adhi siapa lagi. Eh, kamu pengusaha semua, apa yang kamu tuntut sekarang, tambahan modal. Tuntutannya hampir semua minta landasan hukum untuk PHK, sudah PHK berapa Pak? Sudah PHK semua. Pak Bahlil sekarang kumpul asosiasi, perkumpulan asosiasi, apa yang anda minta sekarang, PHK Pak, loh bagaimana supaya nggak PHK, ya *cost production* yang murah, Pak. Ini loh ini yang saya, mungkin saya keliru kumpul aja loh Pak. Apa yang anda minta? Tambahan modal? kasih aja modal, nggak mau Pak. Bisa bisa dianggap itu jebakan karena struktur pasarnya belum ada, Pak. Ini persoalannya ini, jangan jangan lari dari kenyataan. Ini yang saya takutkan, bukan berarti tidak penting itu *future problem* ini. Pemulihan ekonomi nasional ini, normalnya bukan pake masker kemudian keluar, Pak. Tapi, pasarnya seperti apa. Ada nggak duit ini yang datang ke Jakarta. UKM UKM sekarang ini berapa lakunya produknya. Ini yang saya minta lebih realistis supaya yang 2021 saya sepakat, mana yang mulai *expand*, mana yang kita supaya bertahan dan bagaimana situasi global, ini penting penting karena, ini semua masih dalam posisi bertahan.

Nah, mengenai Deputi Bidang Pengembangan Iklim, Deputi Bidang Promosi. Semua *back office* dikuati, Pak. Saya masih, Pak Bahlil kok pernah ngomong sama saya mau bikin *big data* investasi yang akan mengintegrasikan dan mensinergikan pusat dan di daerah dan dari seluruh potensi *black gold*, *blue gold*, *green gold*, pariwisata, seluruh jalan tol ini akan memperkuat *size* ekonomi yang semakin lebar untuk pertambangan, untuk pertanian perkebunan, untuk pariwisata, untuk kemaritiman. Itu penting Pak, kalau toh itu belum ada satu anggaran khusus, ya kesatuan dari anggaran deputi ini perkuat dulu Pak dan nanti akan *expand*. Ibarat kita tempat jauh itu, ancang-ancangannya mundur, Pak. Kalau lompat jauh ancang-ancangannya maju, lompatnya nggak semakin jauh, Pak. Jadi, mundur. Nah, mundurnya ini apa *back office* dari BKPM ini akan ada *booming* pada saat *recovery* dunia dan nasional ini semua sudah siap, Pak yang terintegrasi dan.

Nah, ini Bapak berat, menteri-menterinya ego sektoral maka, nyambung sama Menteri Perindustrian dengan berbagai *roadmap* yang ada. Karena, pembangunan infrastruktur 5 tahun ini menjadi tidak nendang, karena ego sektoral di kementerian masih kuat dan ego daerah, Pak. Daerah itu kalau diberi petunjuk, Pak tempat Bapak ini lebih *green gold*, perkebunan dan pertanian untuk industri hilirisasi. Bapak akan saya beri insentif ini. Bapak lebih *blue gold*, lebih kemaritiman, budidaya. Industrilisasi dan penangkapan. Bapak lebih *black gold*, Bapak lebih pariwisata, Bapak lebih IKM, jelaskan Pak Martin eh Pak Bahlil. Itu mereka mereka nggak ngerti. Ini ada tol, ini apa urusan dengan saya. Tak buka pintu tol, ini akan produktif di sektor pariwisata. Ada bandara, bandara ini baru ada satu penerbangan. Disini lebih ke pariwisata, ya ya yang semacam itu kita inginkan untuk kita bangkit maka revolusi industri. Disebut revolusi itu sesuatu yang mendasar dan berangkat sesuatu apa yang ada di dalam konteks kita

punya. Dan ada prasyarat-prasyarat yang belum berdaya saing, kita akui Pak sulit kita. Maka, tolong perbandingan-perbandingan dengan kompetitor kita di Negara-negara ASEAN ini apa. Pasar tadi, Pak Nusron sudah sampaikan. Buruh, iya yang lainnya, Pak.

Ini yang saya kira penting sekali dan saya sangat optimis dan saya yakin kita akan bisa bangkit. Tapi, yang satu tahun dua tahun ini, satu tahun ini kita juga sudah kehilangan nih Pak. Ini ya usul usul tadi benar betul sekali tadi, dekat dengan Bu Menteri Keuangan. Ini hak kita sudah dicabut, Pak. DPR ini udah nggak lagi punya hak untuk menentukan politik anggaran, Pak dengan Perpu Nomor 1 yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Ini semua oleh Menteri Keuangan dengan KKSK. Sekarang, kalau kita nolak aja nggak bisa, mengusulkan nggak bisa. Hanya ada mungkin konsultasi lah sifatnya ya. Maka, berbaik baik lah dengan Menteri Keuangan itu betul. Saya disini dengan KKSK-nya dengan Gubernur BI dan satunya siapa Pak Wi, OJK itu yang menentukan itu menurut Perpu Nomor 1 Tahun 2020. Kalau tidak salah sampai RAP Undang-Undang APBN sampai 2003, 2023 gitu, 2022 ya. Nah, 2020 untuk bicara ini.

Jadi, penting sekali dan saya sepakat kepada Kementerian Perindustrian, pas sekali terutama hal-hal prioritas dari Kementerian Perindustrian untuk mengatasi krisis ekonomi saat ini, Pak. Saat ini betul-betul jangan diabaikan. Kemarin memang yang muncul ada usulan-usulan, usulan-usulan proyek strategis. Itu tidak salah, proyek yang tidak strategis tapi yang sangat teknis pragmatis hari ini mereka butuh daya beli ini menjadi suatu yang yang yang penting dan bagaimana Kementerian Perindustrian betul-betul memotret para pengusaha ini yang negara harus hadir. Ini nggak bisa di *private*, dilepas. Lepas mati betul, Pak.

Saya kira harus ada tadi bagaimana soal gas, bagaimana soal listrik ya. Ini harus ada insentif-insentif yang lebih revolusioner, Pak. Ya, kalau saya tadi ekstrimnya, bagaimana satu tahun ini gratiskan dulu, biayai negara. Saat ini, negara butuh pengusaha-pengusaha gas itu untuk memberikan dulu, supaya menggeliat Pak. Kalau enggak ada yang kayak gitu, berat untuk para pengusaha. Kita hanya relaksasi soal keuangan saja enggak bangkitin, Pak. Mereka dikasih modal sekarang, takut ya. *Wong* yang kemarin aja belum.

Jadi, itu Pak Menteri Perindustrian. Saya untuk yang anggaran ini saya sepakat. Tapi, justru yang tambahan tadi tambahan anggaran usulan tambahannya itu bagus, karena terkait dengan Covid, region Covid. Ada beberapa usulan yang saya kira temen-temen di sini memperjuangkan, tapi sekali lagi program perlindungan dan pengamanan industri dalam negeri terkait dengan dampak Covid, Pak. Ini penting, karena di bawah betul-betul pasar tidak bergerak, UKM-UKM ini sekarang bisa dicek Bu Gati, yang kita bantu-bantu itu, yang saya bantu lewat Bu Gati atau apresiasi daerah saya ini, baik itu garmen yang makanan-makanan yang jualan itu, produksinya jadi kecil sekali, Bu karena memang yang daya beli masyarakat nya turun. Ini yang saya kira sepakat dengan penanganan penyajian ekonomi nasional itu dengan hal yang lebih realistis dan anggaran ini kita maksimalkan dan tentunya setelah 2020, mungkin Juni 2021 saya kira sudah mulai ada satu kekuatan daya beli masyarakat yang nanti kita akan kembali ke *roadmap* yang sistem situasi normal, Pak.

Dan *new normal* ini adalah situasi yang abnormal. Jangan, *new normal* itu seolah-olah kembali ke normal. *New normal* ini situasi pasar, suatu *demand* yang abnormal.

Maka, kebijakan kebijakan kementerian itu adalah situasi yang harus mengatasi situasi yang abnormal menuju ke normal.

Saya kira itu.
Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya, memang sekarang situasinya ini *new normal* ini.

F-PDIP (ARIA BIMA):

Nah, ini pengusaha. Buka dong maskernya.

KETUA RAPAT:

Jadi, *new normal* itu kalau kita sekarang. Kalau dulu pakai masker, ya kita dianggap orang abnormal. Justru kalau sekarang kita nggak pakai masker, kita yang apa abnormal gitu. Jadi, itulah kira-kira begitulah gambaran *new normal* ini. Jadi, nggak bisa kembali ke normal biasa, karena apa sudah berubah **..(suara tidak jelas)..** berubah. Jadi, itu yang.

F-PDIP (ARIA BIMA):

Pak Ketua, ini pengusaha ini sekarang berubah produk, Pak. Pengusaha Bu Evita ini sekarang berubah bisnisnya karena situasi pasar, Pak.

KETUA RAPAT:

Yang paling terdampak memang, Bu Evita. Bu Evita ini adalah EO. EO jadi Royalindo. Padahal, dia besar itu EO-nya. Dua dua yang besar EO di Indonesia ini: Pacto sama Royalindo ya, habis, habis terkena Corona. Barang yang nggak keliatan yang ngenain.

Iya, kondisi memang sangat berat dan saya tadi sudah banyak cerita juga dengan Pak Menteri dan Pak Kepala BKPM di ruang makan sambil menunggu teman kourum tadi. Memang, kondisi ini kondisi luar biasa kita ini di bawah ini. Mudah-mudahan ini saya harap, karena ini penambahannya cuma 3,4 triliun. Sementara, saya lihat 1 perusahaan saja, kita lihat dapat dana talangan, Krakatau Steel dapat dana talangan 3,5 triliun. Ini masih dicari. Kemarin, waktu kita dengan Pak Pak Menteri BUMN dan Pak Wamen, masih cari pola yang kemarin pola satu berubah lagi jadi pola yang kedua. Pola ketiga. Itu aja mau dibantu 3,5 triliun itu, yang membantu 1 perusahaan. Jadi, kalau ini aduh, kurang **..(suara terputus-putus)..**kalau tidak dibantu ini bingung juga saya ini. Itu juga.

Jadi, teman-teman Banggar itu menjadi catatan ya, teman-teman Banggar.

..... :

Kalau itu disalurkan ke IKM IKM itu, Bu Evita itu gimana dampaknya.

KETUA RAPAT:

Teman-teman Banggar, kalau ini nanti dipertanyakan, kenapa apa yang *landing* nya belum jelas kok sudah harus *landing*. Sementara ini yang meminta minta untuk ada *landing* tidak gitu. Jadi, ini mungkin teman-teman Banggar.

Selanjutnya, Pak Menteri karena, teman-teman sudah pada ini, Pak Menteri, karena waktu kita. Kita perpanjang sedikit aja, 15 menit aja ya.

(RAPAT:SETUJU)

Jadi, Pak Menteri *highlight* aja, Pak Menteri dan nanti yang lain-lain itu dijawab yang bukan ada saran dan sebagainya. Itu mungkin tertulis aja, Pak Menteri. Pak Menteri mungkin jawab yang yang menyangkut ketiganya itu, menyangkut anggaran Pak Menteri. Karena, rapat kita hari ini adalah rapat RKA KL. Jadi, yang lain-lain dijawab secara tertulis karena teman-teman saking cintanya sama Pak Menteri, dengan Pak Kepala BKPM sehingga banyak hal yang ditemukan di lapangan mejadi masukan yang tentu saya rasa sangat konstruktif ya dengan. Tapi kadang kala ini juga dianggap kritis, tapi saya melihat semuanya masih konstruktif konstruktif dalam kritis ini. Jadi, *highlight* aja Pak ya tentang anggaran-anggaran aja.

Silakan, Pak.

MENTERI PERINDUSTRIAN RI (AGUS GUMIWANG KARTASASMITA):

Terima kasih, Pimpinan.

Anggota Komisi VI yang terhormat.

Sesuai dengan arahan dari Pimpinan. Kami akan menjawab, hanya *highlightnya* saja. Tapi, sebelumnya kami tentu harus menyampaikan apresiasi, terima kasih kami kepada segenap Anggota Komisi VI yang telah berikan arahan dan dukungan kepada kami. Tentu, itu merupakan modal untuk kami bekerja kedepan. Yang bisa kami, bukan jawab sebenarnya, respon Pimpinan.

Yang pertama adalah kuesioner. Apa yang kita pelajari dari kejadian kita berkaitan dengan Covid-19 ini dalam konteks industri manufaktur atau industri pengolahan. Kita semua sekarang sadar bahwa struktur industri pengolahan kita belum dalam. Struktur industri manufaktur kita belum dalam. Dan oleh sebab itu, maka sebetulnya tadi juga sudah jadi bagian yang yang walaupun sepiantas dalam apa, dalam presentasi kami di *...(suara terputus)..* akan kami kedepan, itu yang kami sampaikan bawahan-bawahan. Target dalam tanda petik ambisius kami, target ambisius kami dimana *by the end of 2022*. Kita berharap bahwa substitusi impor. Jadi, substitusi impor itu pasti juga *output* dari upaya kita untuk melakukan pendalaman di sektor manufaktur. Substitusi impor kita ini kita harapkan pada akhir 2022, bisa 35%. Ya, itu dari berbagai macam sektor. Tentu, kalau ditanya sektor-sektor apa saja yang bisa menjadi sektor penunjang ya, mungkin kita bisa

mulai sesuai dengan apa yang kita tetapkan, 5 sektor dalam rangka kita melakukan digitalisasi dalam sektor manufaktur, *making industry 4.0* itu ada 5 sektor yaitu : otomotif, petrochemical, kemudian juga elektronika, makanan dan minuman, kemudian satu lagi tekstil kami tambah dua, kami tambah dua yaitu : alat kesehatan dan farmasi. Kenapa alat kesehatan dan farmasi? Ini juga sekaligus menjawab dari beberapa pertanyaan dari Yang terhormat Anggota Komisi VI karena, karena pertama kita tidak pernah tahu kapan vaksin dan obat ini bisa ditemukan Covid-19. Tapi juga, menurut pandangan pribadi saya, ini mohon bisa kalau ada yang teman-teman wartawan, sekali lagi ini mohon ini pandangan pribadi saya. Setelah Covid-19 ini kita temukan obatnya dan vaksinnnya. Saya menduga akan ada **..(suara terputus)** baru yang mungkin jauh lebih dasyat dampaknya kepada Kemen **..(suara terputus)**, kepada kesehatan kita. Jadi, oleh sebab itu Kementerian Perindustrian harus memulai upaya sesuai dengan arahan Bapak Presiden agar sektor kesehatan kita ini mandiri, ya dalam konteks ini tugas dari Kementerian Perindustrian adalah industri alat kesehatan dan farmasi.

Jadi, kelima sektor industri manufaktur plus dua yang baru kami tetapkan itu yang akan jadi penopang, baik itu untuk *makes level 4.0*, digitalisasi karena kami semua yakin karen tahu bahwa dengan **..(suara terputus)**.. penerapan digitalisasi atau *making Indonesia 4.0* industri-industri atau perusahaan industri itu bisa melakukan kegiatan industri itu lebih efisien. Nah, efisiensi itu sangat membantu dan bukan saja **..(suara terputus)** juga mendapatkan *code nya* jauh lebih cepat. Karena, iya.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc):

Pak, saya tanya sedikit. Kenapa industri pangan tidak termasuk di dalam.

MENTERI PERINDUSTRIAN RI (AGUS GUMIWANG KARTASASMITA):

Muffin, Bu.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc):

Ada?

MENTERI PERINDUSTRIAN RI (AGUS GUMIWANG KARTASASMITA):

Ada.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc):

Dari 5 tadi?

MENTERI PERINDUSTRIAN RI (AGUS GUMIWANG KARTASASMITA):

Makanan minuman. Jadi, 5 itu makanan minuman, farmasi, tekstil, otomotif dan elektronika.

Nah, saya kemarin jadi itu berkaitan dengan *making* 4.0. dan juga pasti keterkaitan secara langsung dan tidak langsung dengan upaya kita untuk melakukan pengurangan **..(suara terputus)..** atau dengan **..(suara terputus)..** atau bahasa kitanya substitusi impor 35 **..(suara terputus)..**

Kami kemarin berkunjung, Pimpinan ke satu pabrik industri Polytron. Baru kemarin, ini kami laporkan. Itu memang unik, Pak. Jadi, Polytron ini berbeda dengan kami berkunjung yang di Demak, Pak. Berbeda dengan yang di Demak kami berkunjung, Pak. Ini memang, mereka ada dua fasilitas, Pak. Produsen-produsen yang sama, jenis yang sama ya efektif sangat membanggakan. Karena, Polytron **..(suara terputus)..** apa **..(suara terputus)..** Kita bicara soal apa kelinci **..(suara terputus)..** pasti kami pilih, Pak karena apa? Karena daya beli produsen dalam negeri dan catatan kualitasnya sama. Saya kira kita juga bisa, anak-anak bangsa kita nanti untuk menciptakan kualitas yang baik. Keuntungannya adalah **..(suara terputus)..** tidak perlu banyak Dollar, Pak. Ketika, mereka beli bahan baku dari luar negeri ya, yaitu mereka waktu ke waktu **..(suara terputus)..** faktor luar negeri, faktor-faktor eksternal yang bisa mempengaruhi Dollar.

Jadi, ini sebagai contoh saja Pimpinan. Ya, bagaimana banyak sekali peluang-peluang kita, ya peluang-peluang kita untuk mengisi bahan-bahan baku, komponen-komponen yang menjadi bahan baku untuk industri elektronik yang bisa kita isi di Indonesia. Memang, mahal memang mahal. Tapi, kalau kita ciptakan *demand*-nya, ya saya kira kita ciptakan regulasinya ya. Saya kira saya kira itu bisa, saya kira itu bisa bisa menggairahkan, bisa menggairahkan. Jadi, jadi apa namanya yang paling penting itu memang yang sekarang *listen down* adalah struktur industri kita yang masih belum terlalu dalam, belum terlalu. Itu yang menjadi *reasoning* kita. Dan semakin saya **..(suara tidak jelas)..** mohon maaf Pak Nusron dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ario Bimo ya. Sebelum hadirnya Covid-19, sebetulnya saya juga sudah bicara dengan para pejabat Kementerian Perindustrian, sebelum hadir Covid-19, Pak ya. Saya mengatakan, dan sebetulnya saya juga sudah bicara dengan Bapak Presiden. Saya sampaikan begini, Pak, “ini sudah waktunya negara hadir, untuk membangun industri manufaktur.” Jadi, untuk membangun industri manufaktur, tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada *market* ya.

Saya beri satu contoh yang paling sederhana saja, misalnya ya. Kita bicara soal disparitas dari tadi dari pagi sampai sampai jam 13.15 ini kita bicara soal disparitas ekonomi termasuk disparitasi industri, kita bicara soal Kawasan-kawasan industri misalnya. Kalau kita lepas kepada *market*, ya kalau kita lepas kepada *market* karena, *market* itu kan, pengusaha-pengusaha itu kan tidak ada salahnya sama sekali. Kita tidak bisa menyalahkan perusahaan atau pelaku-pelaku industri itu karena, dia pasti ingin, dia punya dia punya dia punya perhitungan-perhitungan *return of invest* nya berapa lama, kedekatan dengan apa namanya *market*, ya semua itu kita bicara soal Jawa dan Sumatera.

Tapi, kalau ketika negara hadir ya membangun kawasan industri misalnya, ya kemudian ada tematiknya dan sebagainya, kita paksakan pasti itu juga, kawasan industri pasti itu ya kita paksakan dekat dengan sumber apa namanya komoditasnya. Tadi, disampaikan oleh salah satu pimpinan, kita dekatkan ya, kita dekatkan dengan kearifan local.

Tapi, negara hadir, negara harus hadir sebelum Covid-19, Pak Aria Bima, saya sudah sampaikan kepada pejabat-pejabat Kementerian Perindustrian, negara harus ada

dan saya juga sudah sampaikan juga kepada Bapak Presiden supaya disparitas ini ada. Jadi, tidak kumpul semua itu, Jawa 90, Sumatera 90, jangan memang ada gula ada semut kan Pak ya, nggak bisa dipaksakan. Nah, gulanya ini kita pindahkan aja, supaya semutnya kesana. Gulanya kita pindahkan supaya semutnya kesana.

Jadi, negara hadir ini semakin relevan, Pak. ketika kita menghadapi masalah atau krisis yang sangat besar. Teori ekonomi *one on one* saya kira, ketika ketika reses reses yang sangat besar itu, memang stimulus-stimulus yang harus disegerakan oleh Pemerintah itu nggak ada lagi, nggak ada lagi yang bisa di tawar-tawar. Jadi, oleh sebab itu memang Pemerintah sudah menyiapkan beberapa stimulus ya yang pada awalnya memang kita menyoal, yang kita sasar adalah industri kecil ya, Pak Bahlil ya, itu yang sejak awal betul-betul Pemerintah memastikan-memastikan sektor industri. Kalau kami sektor industri kecil, ada yang mengatakan dengan yang lain nanti saya, nanti juga, nanti secara tertulis akan kami jelaskan perbedaan prinsip antara IKM dan UMKM walaupun IKM itu menjadi bagian dari UMKM. IKM menjadi bagian dari UMKM, tapi ada perbedaan prinsip antara IKM dan UKM. Ya, itu tertulis saja supaya tidak terlalu panjang. Nah, jadi stimulus itu dalam teori yang ekonomi *one on one* itu menjadi sangat penting, ketika kita menghadapi krisis yang begitu dahsyatnya sekarang ini. Nggak ada pilihan lain, stimulus. Maka, dari awal IKM ini sudah sudah mendapat perhatian lebih dulu ya, sekarang sedang dibahas secara secara intensif di tingkat pemerintah.

Jadi, begini Pak Pimpinan dan segenap Anggota Komisi VI. Ini ada dua sebut aja program yang berbeda. Yang pertama adalah PEN ya, Pemulihan Ekonomi Nasional dan kedua program yang berkaitan yang kita bahas pada pagi ini, program pagu indikatif tahun 2021. Ini ini *totally different program*, Pak ya, ini *totally different program*. Apa yang jadi harapan, apa yang jadi arahan segenap Anggota Komisi VI terhadap capaian, *output* atau *outcome* dari pagu indikatif 2021, itu akan sangat akan sangat tergantung keberhasilan PEN itu sendiri. Keberhasilan-keberhasilan dari program pemulihan ekonomi nasional. Ketepatan sasaran dari program pemulihan ekonomi nasional.

Kita bisa lihat bahwa banyak sekali lembaga-lembaga internasional yang sudah memprediksi pertumbuhan ekonomi global itu minus, Pak bahkan dalam Pak, 5-8 Pak rata-ratanya ya. Kita kita akan melakukan upaya kita sedemikian mungkin, supaya kita tidak minus, ya Pak Bahlil ya Pemerintah melakukan upaya yang luar biasa supaya tidak minus. Nah, tapi ya yang ingin saya sampaikan juga taruhan kita, Pak ya itu di kuartal ke III dan kuartal ke IV tahun ini. Jadi, PEN Program Pemulihan Ekonomi Nasional itu merupakan suatu program yang sangat penting. Dia harus tepat sasaran ya, dia harus tepat sasaran, tepat jumlah juga. Kalau nggak tepat jumlah, itu sama kayak bongkaran di lautan, Pak. Sama saja bongkaran, kalau nggak pas gitu nilainya ya. Itu harus benar benar. Oleh sebab itu, sekarang pemerintah sedang intensif Pak untuk membahas stimulus-stimulus berikutnya untuk perusahaan-perusahaan. Sebut saja perusahaan menengah atas besar karena, ini juga penting ya. Jadi, jangan terus dikatakan bahwa perusahaan menengah atas besar ini tidak membutuhkan bantuan negara. Ini juga penting. Tenaga kerja yang diserap oleh mereka besar sekali. Yang kita lakukan ini adalah upaya untuk men-save, menyelamatkan tenaga kerja yang mereka serap, itu penting sekali. Ya, itu salah satunya. Stimulusnya salah satunya retro kredit sama modal kerja, retro sama modal kerja. Walaupun, ini juga saya laporkan, Pak Mufti juga tadi menyampaikan, mengangkat dalam satu sebuah ratas. Ratas yang khusus berkaitan dengan industri manufaktur. Saya sudah sampaikan pada sidang kabinet, pada ratas

tersebut bahwa Kementerian Perindustrian mengusulkan stimulus tambahan ya, khususnya yang paling penting karena mereka ini kan sedang menghadapi masalah *cash flow*. Yang paling penting itu adalah stimulus di bidang energi ya. Misalnya, listrik ya misalnya listrik. Kami mengusulkan agar supaya Pak Pimpinan mungkin bisa membantu supaya minimal jam nyala yang harus dibeli industri itu dihapuskan, Pak 40 jam minimal itu. Jadi, apa yang dipakai industri, apa yang dipakai industri dibayar. Jadi, nggak perlu pakai minimal minimal. Termasuk juga gas. Jadi, minimal angka minimal itu hapuskan saja ya. Apalagi kalau kata Pak Ketua Ario Bimo, dihapuskan saja harga gas di nol kan, *alhamdulillah* Pak. Tapi, nggak perlu terlalu ekstrim, Pak. Jadi, dihapuskan saja harga minimum minimum bukan, nilai minimum belinya dihapuskan aja ya.

Kemudian, ada juga yang saya usulkan 50%.

.....:

Pak Menteri, kita sudah sempat bikin kesimpulan waktu itu tentang harga gas yang 6 dolar dan 14.000.

MENTERI PERINDUSTRIAN RI (AGUS GUMIWANG KARTASASMITA):

Iya, Pak kalau yang 6 dollar.

.....:

RDP itu RDP kita dengan teman-teman di dirjen bapak.

MENTERI PERINDUSTRIAN RI (AGUS GUMIWANG KARTASASMITA):

Sudah, Pak.

.....:

Sudah ini itu.

MENTERI PERINDUSTRIAN RI (AGUS GUMIWANG KARTASASMITA):

Sudah jalan, Pak yang 6 dolar. Nah ini, ini 6 dolar memang membantu Pak. cuman begini, Pak. Ada industri yang utilitasnya rata-ratanya, Pak cuman 40% utilitasnya. Jadi artinya, penggunaan listriknya nggak sampai maksimal Pak. Tapi, dia harus membayar 40 40 jam, Pak maksimal, ada hitung-hitungannya Pak. itu juga cukup memberatkan.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc):

Izin, Ketua. Saya kaget waktu mengikuti Pak Menteri di *online* Rakyat Merdeka. Saya baru tahu bahwa ada minimum 40 apa namanya jam yang harus dibayar industri. Ini dia pakai misalnya cuman 10 jam, dia harus tetap pakai 40 jam. Itu membunuh namanya. Saya juga baru tahu nih, aturan ini ada, Pak Ketua.

Terima kasih.

MENTERI PERINDUSTRIAN RI (AGUS GUMIWANG KARTASASMITA):

Dan memang, seperti di seperti yang saya sampaikan, perlu dilaporkan apa yang Pak Bahlil juga hadirkan dalam ratas yang saya menyampaikan mengenai usulan-usulan tersebut.

Jadi, apa yang saya apa yang kami usulkan, apa yang Kementerian Perindustrian usulkan itu disetujui oleh Bapak Presiden.

Nah, sekarang sekarang bagaimana implementasinya itu memang. Jadi, saya kira saya kira itu Pak taruhan kita. Jadi, yang betul betul harus kita kita dukung, kita kawal sekarang Pimpinan itu Q3 dan Q4, Pak. Q3 dan Q4 akan mempengaruhi 2021, Pak.

KETUA RAPAT:

Setuju.

MENTERI PERINDUSTRIAN RI (AGUS GUMIWANG KARTASASMITA):

Saya kira itu Pak garis besar. Maaf agak banyak.
Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Comprehensive penjelasannya.

Kepala BKPM kayaknya agak anun nih. Gini, Kepala BKPM mungkin *highlight* aja, karena kita nih kalau agak kepanjangan lagi, maka melanggar Undang-Undang kesehatan. Silakan, Pak.

KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA):

Saya sebenarnya sudah nggak mau, sudah selesai. Tapi, karena ini perintah Pimpinan. Maka, mau tidak mau kita harus melakukan kalimat per kalimat terutama Pak Andre.

Izin, Pimpinan eh Pak Andre *sorry sorry*, kita kadang-kadang mulutnya masih terbiasa diluar soalnya. Sekarang, Bapak sudah yang mulia Anggota DPR gitu.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Pak Kepala BKPM, *In Syaa Allah* menjadi Menteri.

KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA):

Berarti yang terhormat, memang belum dimulihkan berarti Bapak Pimpinan gitu.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Kalau kalau yang mulia nanti setelah Pak Bahlil menjadi Anggota DPR RI di panggil oleh MKD, baru dipanggil yang mulia.

KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA):

Pimpinan, izin saya mencoba untuk meng*highlight* beberapa point dari pikiran-pikiran substantif dan sangat prinsip dari Bapak Ibu Anggota DPR.

Yang pertama saya masuk dari Pak Pimpinan, Pak Ketua Ario Bimo senior saya. Bahwa benar adanya globalisasi yang dirujuk, yang dijadikan monster besar untuk membangun peradaban, hari ini hancur lebur akibat Covid dan hampir semua negara, kebijakan mereka sudah melakukan protektif. Ini tidak bisa dinaikkan. Kalau seperti itu, apa yang harus dilakukan oleh Indonesia. Saya ingin menjelaskan, saya setuju dengan Pak Ario Bimo bahwa awalnya kita setuju untuk membangun *master plan* dengan melibatkan Gubernur, Bupati, kementerian lembaga dan datanya tersentra dengan melakukan pendekatan pada komoditas-komoditas unggulan.

Ini lah kemudian jadi materi atau senjata jualan kita. BKPM ini sebenarnya dia *sales* negara, marketing negara. Jadi, kalau dibilang bahwa sama dengan BUMN, BUMN bilanganya sumber daya alam negara. Tapi, yang yang mempromosikan, yang mengkampanyekan itu adalah BKPM, institusi negara. Jadi, beliau itu belum harus paham. *Problem* nya adalah ketika BKPM dengan tupoksinya yang mulia menjadi *sales* negara, tidak di *backup*, tidak dilengkapi dengan data-data yang idealnya sebagai institusi *sales* negara. Maka, yang terjadi adalah mengarang bebas.

Nah, untuk mewujudkan itu, di bawah kepemimpinan kami, pertama memang saya jujur aja, Pak nggak ngerti BKPM ini apa, jujur aja saya. Saya ini kan sektoril, pemegang tanah saya. Begitu saya masuk, saya bedah, ngeri kali. Jadi, antara tupoksi dia dengan senjata yang disiapkan, itu terjadi control produktif. Maka, kalau seperti ini saya dapat menyimpulkan, sampai kapanpun kita akan tetap kalah saing dengan negara-negara tetangga kita ketika kita berkompetensi untuk menarik investor, satu. Jadi, itulah masuk dalam usulan program saya di lampiran terakhir, Pak bahwa penting kita melakukan *master plan* itu, itu tujuannya sebenarnya. Itu tujuannya, disitu masih kita bicara tentang dimana perkebunan, dimana pertambangan, dimana pariwisata, infrastruktur itu dihubungkan dengan apa, itu sebenarnya disana. Itu lah kenapa dari awal saya ngotot itu harus ada, satu.

Yang kedua, saya juga ingin meng-*highlight* sedikit tentang pikiran dari Bang Nusron, Pak Nursron mohon maaf, ini senior saya. Mulut saya, lidah saya belum bisa membedakan antara Pak dan Abang. Jadi, mohon maaf Pak Nusron. Memang, sejak saya kenal sama Beliau ini memang penugasan besar dan kadang-kadang juga sangat agitasi. Tapi, untuk agitasi saya tidak terpengaruh karena saya sekarang sebagai Kepala BKPM dan Beliau sebagai Anggota DPR. Tetapi, dalam prespektif untuk menjawab

pikiran-pikiran intelektualitas yang *by data* maka, saya sering diajarkan oleh Beliau bahwa kalau sama Tuhan kita percaya, manusia butuh data, apalagi, aktivis yang bicara. Tidak ada dalam teori pun dibuat tersendiri. Maka, kalau ditanya kelompok kedua realisasi investasi, itu belum waktunya karena, kuartal kedua itu kita akan umumkan di pertengahan Bulan Juli. Mungkin, Pak Nusron enak kerja di DPR, tidak di Pemerintah jadi sudah lupa kuartal itu bulan bulan berapa aja. Jadi, biar kita luruskan gitu kan.

Tetapi, kalau ditanya kuartal pertama, kuartal pertama realisasi investasi kita sebesar 210,7 triliun. PMA-nya kurang lebih sekitar 40 48, ya Bu ya 48% PMDM-nya 52%. Pasti pertanyaannya adalah kenapa PMA-nya lebih sedikit dari pada PMDM-nya. Saya harus memberitahukan bahwa di era Covid dalam berbagai lembaga dunia menyatakan bahwa FDI hampir semua negara terjadi penurunan sekitar 30 sampai 40%. Tetapi, bukan berarti PMDM kita naik, kemudian negara tidak mendapat apresiasi dari publik. Jadi, menurut saya tidak ada juga sebuah teori yang menyatakan bahwa ketika PMDM-nya lebih besar dari PMA. Kemudian, itu perputaran ekonomi kita tidak positif, itu menurut saya ini cuma stigma aja atau PMDM tidak bisa dipalak, PMA ada potensi, mungkin begitu. Nah, kalau ada pemikir lain mungkin begitu kan dan dan Pak Nusron sangat maafin itu, itu kira-kira begitu.

Nah, dalam konteks investasi yang berkualitas, itu Jawa luar Jawa, Jawa itu 50 eh Jawa 51,5% luar Jawa 48,5%. Baru pertama kali terjadi sejarah 6 tahun terakhir pada realisasi kuartal kedua dan lebih menarik lagi bahwa di luar Jawa tersebut sudah masuk pada wilayah Sulawesi Tenggara, Maluku Utara. Papua belum, karena Freeport saya pikir kita harus kaji bersama-sama lagi untuk kita bicarakan dan rasanya saya akan gagal ketika Papua belum termasuk dalam suatu wilayah yang akan menjadi nominasi 5 besar. Nah, ini lah kira-kira yang akan kita lakukan.

Nah, yang terkait dengan *issue* Brexit. Tadi, saya pikir beda memang karena *issue* Brexit itu dilakukan dan diinisiasi oleh Perdana Menteri waktu itu di Inggris untuk melakukan. Makanya, ketika saya jadi Pimpinan Negara tertinggi baru *issue* ini saya angkat. Kira-kira seperti itu. Jika, Kepala BKPM ruang Undang-Undang **..(suara terputus)** dengan perjanjian kerja sama Jepang dan yang lain. Mohon maaf, ada dua Pak Menteri. Dia kejar saya terus tentang semen. Saya tahu orderan siapa ini semen. Motifnya pun saya sudah mengerti dan siapapun orangnya saya sudah tahu. Jadi, Pak Andre yang terhormat atas dasar pikiran cerdas dan sangat agresif Pak Andre sejak saya jadi Kepala BKPM dan setiap saya masuk ke ruangan ini. Pertanyaannya cuma satu, kenapa semen tidak dilakukan **..(suara tidak jelas)**.

KETUA RAPAT:

Itu orangnya dari HIPMI juga ya? Dari HIPMI juga?

KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA):

Kelihatannya, rasa-rasanya, anginnya mungkin kesana kesini seperti itu.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Ordernya NKRI.

KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA):

Pak Andre, saya disaksikan oleh Pak Menteri Perindustrian. Saya membawa ini kedalam Ratas dan Bapak Presiden memutuskan. Saya sampaikan bahwa untuk *output* produksi semen di Indonesia sudah terjadi *over supply*. Di Jawa *supply* kita kurang lebih sekitar 30 juta lebih, penyerapan hanya 20 juta lebih, *over supply* 9 juta. Kalimantan *over supply* kurang lebih sekitar 6 juta, Sulawesi 9 juta, Sumatra 6,7 juta. Yang belum terjadi *over supply* semen di Papua. *Output* nya produksi 1,8, penyerapan dalam Papua sendiri 1,5. Jadi, masih masih oke. Arahan Bapak Presiden waktu itu adalah segera melakukan moratorium dan setuju. Dan saya sudah melakukan moratorium atas juga perintah Pak Menteri Perindustrian, Saudara Suratna. Tadinya, saya kunci di OSS. Jadi, sekarang Pak Andre tidak perlu diragukan. Tinggal belum pernah diajak makan malam sama Pak Andre gara-gara ini dibahas. Jangan bagian penugasannya aja yang kita mainkan, Bapak juga nggak pernah ajak kita.

Nah, menyangkut dengan PT Batam Sentralindo. Saya tahu ini masalahnya, ini sampe di arbitrase kalau nggak salah ya, Bu dan ini tidak *backup an backup an*, Pak Andre. Saya tidak pernah di *backup* sama siapa-siapa untuk menjadi pejabat negara. Pimpinan saya cuma satu yaitu namanya Presiden, Ir. H. Joko Widodo dan diperintah oleh undang-undang. Jadi, Pak Andre tidak perlu meragukan indenpendensi dan idealisme saya. Jadi, saya hanya bisa berpijak pada sebuah kebenaran dan perintah Presiden. Selebihnya, sifatnya koordinasi. Jadi, Pak Andre saya pikir tidak perlu saya lanjutkan. Nanti, Pak Andre ngerti lagi maksud saya ini.

Banyak kali ini pertanyaan.

KETUA RAPAT:

Cukup tertulis nanti lah.

KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA):

Saya pikir hanya itu saja. Menyangkut dengan yang lain-lain, saya pikir Bu, mohon maaf Bu. Ibu Ibu yang baik hati, Bu Evita. Sekali lagi Bapak Ibu Anggota DPR yang terhormat karena temanya menyangkut anggaran. Saya kesini tidak untuk cengeng. Tidak ada sejarah Bahlil Dahlia cengeng dalam bentuk apapun nggak ada. Yang hari ini saya mau sampaikan adalah antara ekspektasi Pemerintah, antara ekspektasi rakyat dan DPR kepada intitusi yang kami pimpin, BKPM dengan alokasi anggaran yang diberikan, itu memang terjadi complang. Tapi, saya memang harus menyampaikan. Karena, kita membutuhkan hasil yang maksimal seperti harus ada apa namanya penyesuaian anggaran. Tapi memang kalau tidak ada, nggak apa-apa juga. Kita akan melakukan dengan sama-sama memahami sosial kebatinan masing-masing.

Saya pikir hanya itu. Mohon maaf, ini banyak sekali yang harus saya jelaskan. Tapi, karena waktu nanti kita lewat dan saya mengakhiri dengan mengucapkan mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah.

***Wabilahi Taufik Wal Hidayah,
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

KETUA RAPAT:

Wassalamualaikum Warahmatullah.

Kalau anggarannya ada, Pak. Menteri BUMN kemarin mengajukan anggaran untuk PMN-nya di 2021 itu 70 triliun lebih. 70 triliun lebih kalau dikurangi yang Bapak berdua ini, kurangi 4 masih 66 triliun. Kalau seandainya itu dipindahkan gitu aja. Jadi, temen-temen anggaran dari PMN ya. Itu kira-kira.

Kita lanjut ke kesimpulan Pak ya. Pertanyaan-pertanyaan ditayangkan sebentar, kemudian ke kesimpulan kita.

KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA):

Pimpinan, *sorry* saya lupa satu Pimpinan.

Tadi, ada pertanyaan yang menggelitik dalam hati saya tentang Perpres 42. Ini saya harus *clear* kan dalam forum yang terhormat ini. Karena, tadi Pak Bapak Anggota DPR Nasril, mengatakan bahwa Perpres 42 ini apakah diberikan atau diminta atau diapain itu. Saya jujur, Pimpinan dari lubuk hati yang paling dalam dan boleh saya bisa bersumpah bahwa saya juga kaget mendapat Perpres ini. Perpres ini, Perpres 42 ini tentang mana Bu, tentang apa Perpres 42 tentang penilaian kementerian lembaga, penilaian dan pemberian sanksi kepada kementerian lembaga dan kepala daerah, dan Pemerintah Daerah. Perpres 42, di Pasal 17 dan Pasal 19 disitu ada dua kewenangan, satu Kemendragi dan keuangan, satu kepada BKPM. BKPM itu berbicara tentang penilaian terhadap izin-izin usaha, hanya izin-izin usaha. Jadi, kalau kementerian lembaga sekarang kan sudah Inpres Nomor 7, sudah diserahkan kepada sudah pendelegasian kewenangan kepada BKPM. Tapi teknisnya, masih ada di Kementerian Teknis, karena kita nggak punya instrument untuk teknis. Nah, tugasnya ini adalah menilai mana kementerian atau lembaga yang menghalangi proses perizinan usaha, begitupun kepala daerah. Kalau kemudian ada terjadi penilaian yang kurang, maka akan diberikan semacam apa sanksi gitu, semacam sanksi begitu. Sanksinya itu ada setengah, ada paling jelek, sedang dan tinggi. Sampai dengan pada sanksi itu dengan Perpres itu tentang pengurangan anggaran atau anggarannya dipotong. Itu akan dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Jadi, sekali lagi saya katakan bahwa ini terjadi natural dan saya tidak pernah meminta-minta itu barang, karena ini kan tanggungjawab, Pak. Siapa juga yang mau menilai Abang saya, Pak Menteri Perindustrian, kwalat kita Pak. Oh, paten banget. Kita kan yang penting didepan kita paten, nanti dibelakang lagi kita oh masih kurang ini, Bang. Nah, didepan ini antara senior dan junior harus kompak gitu.

Saya pikir itu, Pimpinan. Biar *clear* saya klarifikasi bahwa dari dulu-dulu nggak pernah kita minta-minta, Ketua. Dari saya masuk Jakarta nggak ada, yang ada perjuangan terus.

Terima kasih, Ketua.

KETUA RAPAT:

Saya pikir tadi saya pertama-tama itu menyingkat BKPM itu bebanda, tapi ternyata kenyataan, kekuasaannya bener loh.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Apalagi nanti Pimpinan, Pimpinan Pimpinan. Apalagi nanti *Omnibus Law* selesai, ngeri kita.

KETUA RAPAT:

Kita lanjut ke pertanyaan itu ya. Tadi ada Pak Aria Bima yang menanyakan, kemudian ada satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan, pertanyaan dari Pak Aria Bima. Kemudian, Pak Mukhtarudin satu dua tiga empat lima enam pertanyaan, kemudian Bu Siti Mukaromah satu dua tiga empat lima, terus kemudian Pak Mufti Anam ada tujuh, Bu Nevi ada, Bu Nevi ada 11, 12, 13, 14, kemudian Pak Rapsel ada 4, Bu Evita ada 4, Pak Gilang ada 4, ini Gilang Pak Bu Evita senang 4 rupanya, PDIP. Bu Elly Rachmat Yasin ada 6, Pak Subardi ada 3, Pak Amin ada 3, Pak Lamhot ada 5, Pak Nasril Bahar ada 5, Pak Deddy ada 9, Pak Nyat Kadir ada 2, Pak Nusron 5 6, Pak Andre 2.

Kita lanjut ke kesimpulan. Komisi VI DPR, draft kesimpulan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perindustrian Republik Indonesia dan Kepala BKPM Republik Indonesia tentang pembahasan RKA K/L dan RKP K/L tahun 2021. Selasa, 23 Juni 2020.

1. Komisi VI DPR RI menerima pagu indikatif anggaran Kementerian Perindustrian RI tahun anggaran 2021 berdasarkan keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Nomor : S-376-MK02-2020 dan Nomor B.310-M-PPN-D dan PP 040201-05 2020, tanggal 8 Mei 2020 sebesar Rp 2.596.384.900.000,- yang terdiri atas 4 (empat) program yaitu :
 - 1) Program dukungan management sebesar Rp262.413.005.000,-;
 - 2) Program nilai tambah dan daya saing industri sebesar Rp816.693.744.000,-;
 - 3) Program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar Rp668.296.510.000,-;
 - 4) Program pendidikan dan pelatihan vokasi sebesar Rp849.981.642.000,-

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc):

Izin, Pimpinan.

Nomor 4 saya mau tanya kepada Pak Menteri. Sudah berlaku gak ya Pak Menteri peraturan Menteri Keuangan yang *tax deduction* yang untuk pendidikan itu. Sudah berlaku, Pak? Sudah ya. Banyak yang nggak tahu loh Pak Menteri. Wah, kalau mereka melakukan duit untuk pendidikan, 200% itu mereka *tax deduction*.

MENTERI PERINDUSTRIAN RI (AGUS GUMIWANG KARTASASMITA):

Kalau *super deduction tax* untuk pendidikan PMK nya sudah keluar. *Super deductible tax* untuk RND sebentar lagi keluar, tetapi sudah diputuskan sudah.

KETUA RAPAT:

Ini ini kalau yang ini dihitung, tema anggaran kalau yang ini dihitung termasuk pendidikan nggak? Kalau terhitung pendidikan, berarti ketika nanti ada penambahan pagu indikatif apa apa penambahan waktu optimalisasi, ini harus dapet gitu. Kalau memang ini masuk dalam vokasi pendidikan. Ini mungkin perlu di enggak ini kalau memang vokasi pendidikan, berartikan ini secara menyeluruh termasuk dalam dana pendidikan yang yang harus 20% itu. Jadi, kalau nanti ada apa dana optimalisasi, dia harus dapet juga gitu, sebesar berapa persen dari 20% tersebut. Nah, iya itu yang dimaksud Bapak Nusron tadi itu.

Oke, yang ini sudah pasti setuju dulu ya. Setuju ya, Pak Menteri setuju ini ya.

(RAPAT:SETUJU)

2. Komisi VI DPR RI menyetujui susulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian, ini menyetujui atau sama sama nih. Komisi VI DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian RI tahun 2021 sebesar Rp3.428.325.000.000,- yang terbagi atas 4 (empat) program tambahan yang diperlukan untuk pemulihan industri pasca Covid-19, yaitu :
 - 1) Program perlindungan dan pengamanan industri dalam negeri sebesar Rp1.500.000.000,000,-;
 - 2) Program penumbuhan industri substitusi impor sebesar Rp500.000.000.000,-;
 - 3) Program penyiapan SDM apa nih, SDM sebesar Rp1.017.675.000.000,- 600 ya? 625 juta rupiah; dan
 - 4) Program pengembangan infrastruktur digital sektor industri sebesar Rp 410.700.000.000,-.

MENTERI PERINDUSTRIAN RI (AGUS GUMIWANG KARTASASMITA):

Sudah sudah, Bu. Sudah.

KETUA RAPAT:

Jadi, ini

F-PG (NUSRON WAHID):

Pak, Pak Ketua. Yang tambahan ini sudah tanda tangan meeting, Pak ya.

MENTERI PERINDUSTRIAN RI (AGUS GUMIWANG KARTASASMITA):

Sudah, tapi belum diputuskan Pak Nusron. Sudah *on the way*, masih *on progress*. Tapi, surat kami ke Bappenas dan ke Menteri Keuangan sudah jalan.

KETUA RAPAT:

Jadi, ini menyetujui.

F-PG (NUSRON WAHID):

Setuju, setuju.

MENTERI PERINDUSTRIAN RI (AGUS GUMIWANG KARTASASMITA):

Kalau boleh mengusulkan Pak Pimpinan supaya kuat. Jadi, dua duanya ya jadi ya. Bersama-sama

F-PG (NUSRON WAHID):

Mendukung, mendukung Pak. Mendukung, Pak ya.

KETUA RAPAT:

Mendukung.

F-PG (NUSRON WAHID):

Mendukung dan memperjuangkan. Dan memperjuangkan.

KETUA RAPAT:

Mendukung dan memperjuangkan, cocok. Setuju ya.

(RAPAT:SETUJU)

F-PG (NUSRON WAHID):

Pak Ketua, sebelum masuk point ketiga. Saya ingin point ini ada tambahan kesimpulan. Yang kira-kira bunyinya begini, menjadi point ketiga. Khusus untuk program

penyiapan sumber daya manusia industri sebesar angka tersebut, harus secara mandatori diambilkan dari optimalisasi dana fungsi pendidikan.

F-PDIP (ARIA BIMA):

Bukan wilayah kita.

F-PG (NUSRON WAHID):

Kenapa? Loh, kenapa nggak wilayah kita?

F-PDIP (ARIA BIMA):

Optimalisasi dan

F-PG (NUSRON WAHID):

Gini, Pak. Kalau kita tidak mendesak dan tidak mengajukan, nanti dana fungsi, optimalisasi fungsi pendidikan itu hanya dibagi di dua instansi.

KETUA RAPAT:

Gini, Mas nanti kan ada dan fungsi optimalisasi nanti

F-PG (NUSRON WAHID):

Tidak dimandatori.

F-PDIP (ARIA BIMA):

Oh, gitu. Tadi itu wilayah rapat disini, nggak?

F-PG (NUSRON WAHID):

Iya, iya.

KETUA RAPAT:

Yang dua yang pendidikan itu loh. Yang itu vokasi pendidikan, khususnya vokasi pendidikan. Yang selama ini dibagi ke Komisi VI eh Komisi VIII dan Komisi X.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc):

Izin, Pak Ketua. Karena, dari Pak Jokowi Pak Nusron kan, mereka Beliau mengatakan harus ada *endowment fund*. Ini yang dimaksud. Jadi, dana ini ini investasi untuk sumber daya manusia ini. Setiap departemen harusnya ada, apakah dialokasi dari

pendidikan atau mengusulkan anggaran sendiri, itu yang maksud Pak Jokowi *endowment fund* itu.

F-PG (NUSRON WAHID):

Kalau *endowment fund* untuk pendidikan LPDP bu. Nah, sebetulnya yang kita inginkan adalah karena ini kan di dalam keterangannya Pak Menteri juga *dislide* nya inikan anggaran ini masuk dan dihitung menjadi komponen fungsi pendidikan yang 20% itu. Jadi, angka 800 sekian yang atas tadi itu, itu berkontribusi bagian dari 20% angka pendidikan.

KETUA RAPAT:

Nah, itu.

F-PG (NUSRON WAHID):

Itu. Salah satunya vokasi.

F-PDIP (ARIA BIMA):

Bentar, bentar Pak Nusron sama Pak Pimpinan. Pak Menteri, ndak imbuh aja.

Waktu, Menteri siapa. Saya dulu sama Pak Pipit dapat anggaran untuk membikin pusat *training* garmen di Jawa Tengah yang setiap tahunnya itu ada anggaran untuk jumlah tertentu gratis. Itu masih ada nggak? Ah, itu masuk anggarannya yang disitu yang diperbesar? Tujuannya ini? Oh ya udah, oke.

F-PG (NUSRON WAHID):

Kembali ke usulan tadi, Pak Ketua. Komisi VI khusus untuk khusus untuk program penyiapan manusia sumber daya industry sebesar 1 triliun sekian tadi itu, yang tambahan. Kalau yang 8 kan udah pagu indikatif, udah wilayah Pemerintah kita nggak bisa utak atik itu. Harus secara mandatori diambilkan dari dana optimalisasi dana khusus.

KETUA RAPAT:

Khusus DPR. Komisi VI DPR RI khusus untuk program penyiapan SDM. Point tiga dulu.

F-PG (NUSRON WAHID):

Ya, mengusulkan.

KETUA RAPAT:

Mengusulkan.

F-PG (NUSRON WAHID):

Khusus untuk program. Point tiga itu pokoknya.

KETUA RAPAT:

Yang nomor tiga itu.

F-PG (NUSRON WAHID):

Supaya *..(suara tidak jelas)..* tambahannya jauh lebih gampang.

KETUA RAPAT:

Copy dulu. *Copy* dulu yang nomor 3 itu. Point 3.

F-PG (NUSRON WAHID):

Khusus untuk program. Nah, nah itu aja.

KETUA RAPAT:

Dan nya hilang.

F-PG (NUSRON WAHID):

Oke udah, harus secara mandatori secara mandatori diambilkan.

KETUA RAPAT:

Pelan pelan.

F-PG (NUSRON WAHID):

Harus

KETUA RAPAT:

Dan nya hapus

F-PG (NUSRON WAHID):

Secara mandatori, mandatori diambilkan dari optimalisasi dana fungsi pendidikan.

MENTERI PERINDUSTRIAN (AGUS GUMIWANG KARTASASMITA):

Betul betul, Pak. Nggak ada alasan.

..... :

Nggak ada alasan lagi. Nggak ada alasan

KETUA RAPAT:

Optimalisasi dana pendidikan.

F-PG (NUSRON WAHID):

Fungsi pendidikan.

KETUA RAPAT:

Fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan. Nomor 3 nya naik itu, angka 3 nya naik. Di Komisi itu 3.

F-PDIP (ARIA BIMA):

Pak Ketua, Pak Pimpinan. Substansi saya setuju, cuma mengenai harus mandatori diambilkan dari optimalisasi dana fungsi pendidikan ini, mohon infokan usulan prosedur gimana? Di Komisi VI.

F-PG (NUSRON WAHID) :

Gini, Pak Ketua. Begini Pak Ketua. Begini Pak ya gambarannya. Dana pendidikan itu biasanya dibagi 2, kan 20% dari total APBN, anggaran pusat dan anggaran daerah. Anggaran pusat itu dibagi macam-macam, paling banyak Kemendikbud dan Dikti, kemudian Kemenag karena madrasah-madrasah dan pesantren, kemudian di kementerian teknis seperti : STAN, kemudian seperti UNHAN, kemudian seperti AKMIL, seperti : Sekolah Tinggi Manajemen Industri, seperti : Sekolah Tinggi Kelautan dan sebagainya.

Nah, klausul tentang vokasi itu nggak pernah dapet, selama ini dapet hanya pendidikan Dirjen Vokasi yang ada di Kemendikbud. Padahal, sama-sama fungsi vokasi. Kalau kita tidak salah, fungsi vokasi di Pemerintah ini ada 3 tempat loh. Pertama, Kemendikbud, kedua Perindustrian, ketiga Kemenaker.

F-PDIP (ARIA BIMA):

Kalau fungsi pendidikan aja. Jangan optimalisasi gitu.

F-PG (NUSRON WAHID) :

Gini, Pak. Itu kita yang kita incar kan dapet dana tambahan yang bisa ditambahkan kalau ada optimalisasi.

F-PDIP (ARIA BIMA):

Ini yang saya agak. *..(suara tidak jelas)..*

F-PG (NUSRON WAHID) :

Gimana? Kalau ada tambahan pasti ada optimalisasi pasti ada.

F-PDIP (ARIA BIMA):

Hati-hati loh. Pendidikan, pendidikan. Fungsi pendidikan.

KETUA RAPAT:

Fungsi pendidikan.

F-PDIP (ARIA BIMA):

Jangan optimalisasi, Pak.

KETUA RAPAT :

Oh, gitu.

F-PDIP (ARIA BIMA):

Iya, jangan optimalisasi Pak. Kalau nggak ada optimalisasi.

F-PG (NUSRON WAHID) :

Oh, baik. Optimalisasi maupun tidak optimalisasi. Lebih bagus dari fungsi pendidikan. Ya, lebih bagus lebih bagus, saya lebih setuju.

KETUA RAPAT:

Dari fungsi pendidikan dari dana. Dari dari dana fungsi pendidikan.

F-PG (NUSRON WAHID) :

Oke, lebih bagus.

KETUA RAPAT:

Oke, setuju Pak Menteri ya.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc):

Izin, Bapak Pimpinan. Saya rasa ini agak membingungkan. 3 diatas 3 disini. Kenapa ini nggak ini merupakan catatan dari point 2 aja. Ini kan point 2, ada point 1, 2, 3, 4. Kita ada catatan dibawahnya gitu.

MENTERI PERINDUSTRIAN (AGUS GUMIWANG KARTASASMITA):

Kalau saya boleh usul, ini yang nomor 3 ini point khusus dari Bu Evita kalau memang di dimunculkan, dibunyikan khusus akan jauh lebih baik dan untuk

KETUA RAPAT:

Lebih greget. Ok.

MENTERI PERINDUSTRIAN (AGUS GUMIWANG KARTASASMITA):

Dan mohon maaf, Pimpinan. Hanya tambahan satu kalimat, satu kata saja. Komisi VI DPR RI mengusulkan khusus untuk tambahan, diperkuat lagi diperkuat lagi.

F-PDIP (ARIA BIMA):

Tambahan sudah ada.

KETUA RAPAT:

Ok, tambahan program ..(*suara tidak jelas*).. Industri sebesar. Ok, setuju ya.

(RAPAT: SETUJU)

F-PDIP (ARIA BIMA):

Eh kok, nggak dapet jahit menjahit lagi di Jawa Tengah?

MENTERI PERINDUSTRIAN (AGUS GUMIWANG KARTASASMITA):

Nanti, Pak kita itukan. Kita jahit lagi.

KETUA RAPAT:

Pokoknya suasana kebatinan sudah dimengerti.

F-PDIP (ARIA BIMA):

Karena, yang terbesar Boyolali itu.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya, nomor 4 ya.

F-PDIP (ARIA BIMA):

Kita tawarkan nggak ada yang mau.

KETUA RAPAT:

Komisi VI DPR RI menerima pagu indikatif anggaran Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia tahun anggaran 2021 berdasarkan keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Nomor S-376MK.02-2020 dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sebentar sebentar, Bu. Kita kan sudah sudah ini. Ini kita keempat nih ya. Udah di empat ini.

F-PDIP (ARIA BIMA):

Empat, Komisi VI menerima

KETUA RAPAT:

4. Komisi VI DPR RI menerima pagu indikatif anggaran Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia tahun anggaran 2021 berdasarkan keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Nomor S376MK.02 2020 dan Nomor B.310-M.PPN-D-8PP.040201/05/2020 tanggal 8 Mei 2020 sebesar, Rp439.500.127.000,-. Belum, tar dulu satu ini yang. Untuk mendukung program prioritas nasional BKPM 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Program dukungan management sebesar Rp257.909.383.000,-;
2. Program penanaman modal sebesar Rp181.590.744.000,-.

Setuju ya?

(RAPAT:SETUJU)

5. Komisi VI DPR RI menyetujui usulan inisiatif baru Badan Koordinasi Penanaman Modal RI sebesar Rp509 miliar yang dialokasikan untuk 8 kegiatan. Nggak, 8

kegiatannya dicoret aja ya. 509 untuk apa saja lah itu. 8 kegiatannya diini aja, dihapus aja.

..... :

Untuk apa itu?

KETUA RAPAT:

Ya, untuk apa aja lah 500 ini.

F-PG (NUSRON WAHID) :

Apa aja di, apa aja dirinci dong untuk apa aja 509 itu. Catat disitu. Kalau saya, kurang setuju ini usulan tambahannya. Saya setuju ditambahin tapi *based on* tadi itu, kinerja. Kalau realisasinya nambah ya kita tambah. Kalau realisasi nggak nambah ya kita kurangi.

KETUA RAPAT:

Untuk saat ini kita setuju. Nanti, baru evaluasinya nanti. Nanti evaluasinya nanti. Ok, kita setujuin ya.

KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA):

Pimpinan. Pimpinan, mohon maaf.

Kalau boleh, suasana kebatinan Bu Menkeu ini kan selalu dia detail. Saran saya, kalau memang ini mau dimasukkan ke kesimpulan 509 miliar, alangkah lebih baiknya dengan nama kegiatannya supaya sinkron dengan surat dari Bappenas dan surat yang ke Beliau juga.

KETUA RAPAT:

Catat. Mana tuh Ibu disini. Tolong disampaikan disini loh.

KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA):

Jadi, surat.

KETUA RAPAT:

Datanya bu, iya. Tinggal di ketik ulang.

KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA):

Terima kasih, Bu.

KETUA RAPAT:

Secara sambil nunggu yang 500 itu, Komisi VI bersama Komisi VI DPR RI bersama Kementerian Perindustrian dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia akan mendalami sinergisitas program prioritas Kementerian Perindustrian RI dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. Setuju ini ya.

Ini ini ini mana nih, ini mengikat mengikat suasana kebatinan ini. Setuju ya.

(RAPAT:SETUJU)

Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Perindustrian RI dan BKPM untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 10 hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI. Setuju ya.

(RAPAT:SETUJU)

Nyampe juga ibu nggak pernah baca.

F-PDIP (ARIA BIMA):

Mana Pak Bahlil? Ini udah? Oke.

KETUA RAPAT:

Nggak ada itu ya, yang di WA aja suruh WA, nanti kita *copy paste*.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc):

Sambil nunggu itu, saya ada masukan ke Pak Bahlil, Pak. Kan kalau IPC ya, kalau di Perdagangan kan ITPC, seperti di Jepang. Kalau perdagangan adanya di Tokyo ya, kalau Bapak adanya di Osaka. Kenapa, TPI ini tidak dijadiin satu pintu aja, Pak? Jadi, *tourism and investment* satu pintu disatu tempat. Walaupun, anggarannya masing-masing dari pada mereka sehingga, mereka bisa kerjanya juga bisa nyatu, gitu Pak.

KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA):

Yang pertama gini, Bu kalau kerjanya di perdagangan kan yang jelas ruang lingkupnya beda, itu satu. Yang kedua, memang pernah waktu itu dirumuskan saya *check* karena saya baru di BKPM saya *check*. Kenapa nggak kalian gabung aja dengan kedutaan. Jadi, oleh investor itu kalau mereka datang kedutaan, itu merasa sudah *problem* baru karena ada standar pelayanan yang berbeda dengan kalau dilayanin langsung diluar, itu persoalannya. Jadi, seolah-olah kalau orang masuk ke kantor kedubes itu, investornya itu keberatan. Itu *problem* nya disitu.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc):

Pak Ketua, setahu saya ITPC itu selalu tidak sama dengan kedutaan tempatnya Pak Bahlil. Tidak pernah sama, yang namanya ITPC dengan kedutaan. Kenapa? Kedutaan itu tidak selalu ada di pusat *trading*. Makanya, kedutaannya di Washington, ITPC nya di New York gitu loh, ya kan juga sama dengan yang lain-lainnya. Yang saya pertanyakan ini adalah mengenai ITPC, AIPC yang di Jepang. Yang satu di Osaka, yang satu di Tokyo. Nah, ini yang menjadi sebenarnya Pak.

KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA):

Ah, begini aja Bu. Izin, ada Deputi Pelayanan bisa menjelaskan. Pak Deputi, jelaskan dulu. Eh, Deputi Promosi, Pak Ikmal. Mohon maaf, ya Bu ya supaya supaya lebih sakti jawabannya.

DEPUTI PROMOSI BKPM:

Jadi memang, makasih Bu. Mohon izin, Pak Kepala. Jadi, memang tujuan didirikan ITPC ini adalah untuk melakukan *door to door investment promotion*, Pak Bu. Jadi, kita mendatangi perusahaan satu persatu, kita identifikasi, kemudian kita lakukan pertemuan pertemuan secara intensif, karena itu sebenarnya target kami dari AIPC, Bu. Lalu kemudian, keliatannya AIPC tidak bisa digabung di kedutaan karena yang tadi ibu sampaikan juga bahwa kalau IPC ini pendekatannya bisnis to bisnis, Bu. Nah, sedangkan kalau kedutaan itu wilayah diplomatik. Mereka kadang ingin bertemu aja apa *screening* nya cukup ketat, apakah jamnya jam berapa. Tapi, kalau IPC *anytime* kapan saja mereka bisa bertemu, mau di *café* dan sebagainya. Jadi, keluasaan dalam melakukan *door to door investment promotion* itu jauh lebih baik, ketimbang kalau kita melalui jalur diplomatik, Bu.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc):

Saya nggak nangkap. Katanya, Bapak dengan kedutaan. Saya tanyanya ITPC dan AI. Jadi, jangan. Saya tanyanya kenapa *trade* ini invest apa namanya di atasnya *trade* dikita itu ITPC dan AIPC ini nggak digabung. Karena, sebenarnya kan kalau digabung masing-masing pembiayaan. Tapi, kalau satu pintu itu kan satu tempat itu lebih bagus, itu pertanyaan saya. Tidak gabung dengan kedutaan loh maksud saya, Pak dengan perdagangan dengan perdagangan. BKPM dengan perdagangan.

DEPUTI PROMOSI BKPM:

Iya, jadi memang gini Bu. Kalau targetnya BKPM itu kan adalah *door to door* promosi investasi dan kemudian mengundang investasi dari negara tempat ditugaskan itu ke Indonesia, Bu. Nah, cuma Perdagangan kan berbeda, Bu. Berbeda targetnya karena, dia kan targetnya adalah bagaimana meningkatkan perdagangan dari Indonesia ke negara yang mereka tempati itu, Bu. Jadi, ada dua dua dua target yang sangat berbeda. Yang satu targetnya adalah dari BKPM mendatangkan investor bisnis dari negara bersangkutan ke.

..(suara tidak menggunakan mic)..

KETUA RAPAT:

Sistem penganggarannya yang repot itu. Sistem penganggarannya yang repot. Bisa *..(suara tidak jelas)..cost*. Nggak, pelaporannya bagaimana. Jadi ada dua kwitansi dong entar.

KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA):

Pimpinan, saya memang dari awal masuk, mencoba untuk membuat efisiensi. Nah, rencana BKPM ini kan kita nggak punya, Pak Nusron. Kita nggak punya di England, di Eropa itu cuma di nggak, di London. Sekarang, kita udah buka di Belanda. Kita menggabungkan dengan perdagangan. Sekarang, kita mau dorong. Jadi kita, memang satu satu gini, Bu. Tempatnya saya setuju itu, supaya mereka bisa koordinasi, cuma otaknya dua duanya beda. Satu, otak menarik investor masuk ke Indonesia, satu menjual produk Indonesia di negara itu. Tapi, mungkin dalam rangka sinkronisasi, itu saya setuju tempat. Benar, Bu. Terima kasih banyak masukannya. *..(suara tidak jelas)..* kita pada hari ini. Terima kasih, Bu.

F-PDIP (ARIA BIMA):

Dikit dikit, sambil santai saja.

Pak Bahlil, itu Asosiasi Pemerintah Kota, Kabupaten atau pun Asosiasi gubernur atau Asosiasi DPRD. Bayangan saya begini, Pak Bahlil. Untuk *big data* tadi, sekaligus juga tentang bagaimana pola pembangunan industri nasional yang Indonesia sentris ini, dimungkinkan nggak, masuk akal nggak. Misalnya, ada anggaran Rakor semi workshop gitu, di 34 provinsi kabupaten kota bersama BKPM dengan anggaran yang kita putuskan untuk lebih meng-*cluster* tadi, masuk akal nggak bekerja sama dengan Menteri Perindustrian?

KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA):

Jadi, apa yang Pimpinan tadi mengusulkan. Itu adalah instrumen untuk kita Rakor per wilayah. Jadi, kalau datanya masternya.

F-PDIP (ARIA BIMA):

Maksudnya apa Pak? Provinsi?

KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA):

Provinsi.

F-PDIP (ARIA BIMA):

Dengan Ibu Kota, Kabupaten.

KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA):

Yes. Jadi, contoh gini Pak. Wilayah Maluku, Maluku Utara kita bikin dimana? Ternate atau di Ambon. Panggil semua disitu.

F-PDIP (ARIA BIMA):

Tiap tahun anggaran ada?

KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA):

Gimana, Pak?

F-PDIP (ARIA BIMA):

Tiap tahun anggaran ada?

KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA):

Harusnya kan yang kita butuhkan, yang kita buat itu dulu, Pak *masterplan* untuk inventarisasi peta potensi itu, Pak. Kalau nggak.

F-PDIP (ARIA BIMA):

Materinya?

KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA):

Materinya dulu. Kalau nggak ada materi.

F-PDIP (ARIA BIMA):

..(*suara tidak jelas*).. kena *top down* maksud saya di rakor itu ada yang ..(*suara tidak jelas*)..

KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA):

Dengan itu, itu yang instrument untuk ketemu.

F-PDIP (ARIA BIMA):

Iya, ada anggaran ini?

KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA):

Sudah ada, Pak. Per wilayah, Pak. Jadil, kita sudah tahu apa.

KETUA RAPAT:

Yang 200 juta itu ya?

KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA):

Kita sudah tau apa yang Pimpinan mau. Sekarang adalah bagaimana Pimpinan tahu apa yang kita mau itu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Jadi, jadi memang. Tadi ini ini pentingnya BKPM memang untuk mengkoordinasikan itu karena selama ini saya lihat juga kalau kalau pameran di luar negeri itu, kalau yang di daerah daerah itu hanya sehari aja tapi seminggu yang ikut itu. Dia pasang, pasang barang barangnya, pembukaan dia ikut, besoknya hilang semua, ditutup ininya. Nah itu kondisinya. Sudah ya, oke.

Kita mulai yang lima ya. Ini Undang-Undang Kesehatan udah ini nih. Nanti, dihukum oleh *..(suara tidak jelas)..* nanti. Kita baca apa Pak Bahlil cek dulu, bener nggak itu. Kalau sudah benar kita nggak usah baca dong biar cepat. Terus, terus, bawah.

KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA):

Supaya Bu Sri Mulyani tidak coret. Itu yang satu, yang nomor delapan kan 40 itu, a. 3 miliar aja, supaya satuannya kalau nggak ditanya apa nih, ruang lingkupnya. Detail banget dia soalnya.

F-PDIP (ARIA BIMA):

Teliti juga ya Pak Kepala BKPM.

KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA):

Waduh, Boss. Kita kita nggak pernah mikir gini gini, tiba-tiba hitungannya banyak kali ini Pemerintah ini.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Mas Bimo, ini ketemu ini pandai ini mainnya ini.

KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA):

Ok, izin Pimpinan. Untuk menambah narasi aja yang 150 miliar per bu apa untuk diatas atas. Iya, jadi gini analoginya. Ini kan Undang-Undang Cipta Lapangan eh Cipta Lapangan Kerja ini adalah begitu diimplementasikan, langsung eh begitu di sahkan langsung diimplementasikan. Nah, selama ini yang menjadi *problem* itu kan kabupaten, kota, provinsi kan nggak *online* ke pusat. Kenapa? Karena kita cuma sosialisasi undang-Undanganya, programnya nggak kita kasih dan mereka akan membuat strategi untuk untuk memperlama, karena memang mata airnya ada disitu. Sementara, kita maunya cepat. Jadi, kita kasih aplikasi, kita ajarin mereka, kita kasih *hardware*, kemudian kita dampingi. Itu lah per daerah 200 juta per kabupaten itu. Itu biar ketika ditanya, nggak ini aja.

Makasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya, selanjutnya hasil pembahasan RKA maupun RKP ini akan disampaikan ke kementerian eh ke Badan Anggaran, kemudian di sinkronisasi.

Ada *closing statement*? Cukup ya? Cukup.

Terima kasih atas kehadiran Pak Menteri Perindustrian dan Bapak Kepala BKPM dan begitu juga terima kasih kepada rekan-rekan DPR RI, rekan-rekan Komisi VI DPR RI yang telah menghadiri acara ini. Maka, demikian rapat kami tutup.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 15:10 WIB)

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 23 Juni 2020

**a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,**

TTD.

**DEWI RESMINI, S.E., M.SI.
NIP. 197104071992032001**